



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENANGANAN PERKARA
**PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU)**
TAHUN 2019
DALAM ANGKA



Diterbitkan oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019

**PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
DALAM ANGKA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

TIM PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN

Penanggungjawab :
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Muhidin S.H., M.Hum.

Koordinator :
Kurniasih Panti Rahayu

Tim :
Nanang Subekti
Yuni Sandrawati
Maria Ulfah Kusumaastuti
Syarief Hidayatullah Az Zaky
Melati Kusuma Wardani
Yogi Djatnika
Debby Yelviona
Fithatue Amalia Fatla Aini
Intan Permata Putri

Editor :
Nanang Subekti

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Berkaitan dengan prinsip pengadilan yang terbuka (*open court principle*), sejak dua abad silam, Jeremy Bentham mengingatkan: *“In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks applicable to judicial injustice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of the all guards against improbity. It keeps the judge himself while trying under trial”*. Melalui pandangan itu, Bentham benar-benar ingin menegaskan, selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukaan merupakan alat untuk melawan sekaligus penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat “hakim” diadili saat ia mengadili (perkara). Terlebih lagi, seperti diketahui bersama, di hampir setiap proses persidangan di pengadilan, selalu Hakim memulai dengan kalimat “sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”, sehingga keterbukaan wajib hukumnya diwujudkan, bukan berhenti sebatas pernyataan belaka.

Di Mahkamah Konstitusi, proses dan prosedur penanganan perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019 didesain terbuka dan terukur. Semua pihak, termasuk publik, dapat ikut memonitor perjalanan perkara, sejak registrasi hingga diputus. Dalam untaian kerangka pikir semacam itu, buku **“Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Angka”** ini merupakan bagian dari ikhtiar Mahkamah Konstitusi berlaku transparan sekaligus menyingkirkan stigma perihal adanya lorong-lorong gelap di lembaga peradilan.

Buku ini memotret utuh wajah penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi dalam bentuk dan bahasa angka-angka. Deskripsi serba serbi penanganan perkara melalui bahasa angka-angka diharapkan lebih mudah dan cepat untuk dipahami. Informasi mengenai peserta pemilu tahun 2019, daerah pemilihan, hasil rekapitulasi perolehan suara, hingga ke penerimaan dan registrasi perkara, proses persidangan, ragam varian dalil permohonan, sampai putusan, seluruhnya ditampilkan menarik, sesuai persis dengan fakta yang ada. Termasuk, deskripsi angka perihal keberadaan dan kinerja layanan konsultasi yang disiapkan melayani para pencari keadilan.

Selain memberikan informasi dalam bentuk angka dan infografis pada momentum penanganan perselisihan hasil Pemilu tahun 2019, penerbitan buku ini dapat pula dikatakan sebagai semacam bundel laporan kinerja Mahkamah Konstitusi kepada publik, khususnya selama menjalankan salah

satu kewenangan konstitusionalnya: memutus perselisihan hasil tentang pemilihan umum. Sekali lagi, buku ini terbit didasari kesadaran dan komitmen kuat kami, segenap komponen di Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip transparansi.

Harapan kami, selain bermanfaat dan berdaya guna sebagai informasi publik, buku ini dapat dimanfaatkan bagi kepentingan, baik kepentingan yang bersifat akademik maupun kepentingan praktis, bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu, termasuk para pemerhati Mahkamah Konstitusi. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih, utamanya kepada tim penyusun yang telah bekerja sungguh-sungguh, dan tentu saja kepada semua pihak yang memberikan dukungan atas terbitnya buku ini.

Jakarta, Agustus 2019

PRAKATA

Kurun waktu yang tidak boleh dibilang sebentar, hampir tiga bulan bahkan lebih jika dihitung mulai dari persiapan telah dilakukan oleh seluruh komponen Mahkamah Konstitusi dalam menangani salah satu kewenangannya yaitu menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum Tahun 2019, yang konon bisa dikatakan sebagai peristiwa paling besar dalam sejarah demokrasi dunia bukanlah hiperbola semata, mengingat pemilu kali ini dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang bahkan secara bersamaan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi sebagai akhir dari penyelesaian perselisihan proses demokrasi tersebut secara nyata telah menjadikan Sembilan Hakim Konstitusi Pemutus Sengketa serta Gugus Tugas Pendukung Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 menjadi tidak hanya sebagai pekerja cerdas namun juga menjadi pekerja keras.

Banyaknya permohonan yang diajukan dengan tuntutan rentang waktu yang dibatasi oleh undang-undang, dan bertumpuknya berkas perkara yang memenuhi ruang kerja membuat seluruh Hakim Konstitusi, pegawai serta karyawan di MK harus merelakan waktu lebih dalam pengelolaannya.

Hiruk pikuk pencari keadilan dan masyarakat yang datang ke Gedung MK menjadi bagian tersendiri yang harus dilayani dengan sempurna, disamping pelayanan informasi penanganan perkara secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui penggunaan media dan teknologi informasi.

Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang dibatasi oleh waktu yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pemilu Legislatif (Pasal 78, UU MK). Dalam kewenangan ini, maka MK telah memutus baik perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden maupun PHPU Legislatif tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang ada bahkan lebih cepat. Waktu yang digunakan untuk penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu selama 12 Hari Kerja sejak dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (11 Juni sampai dengan 27 Juni 2019). Sedangkan untuk penanganan perkara PHPU Legislatif rata-rata adalah 28 Hari Kerja (1 Juli sampai dengan 6, 7, 8 dan 9 Agustus 2019) yang juga lebih cepat dari batas waktu yang diberikan oleh undang-undang.

Permohonan PHPU Legislatif tersebar di seluruh provinsi yaitu 34 Provinsi dan dimohonkan oleh seluruh Partai Politik yaitu 20 Partai Politik, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal Aceh. Dalil yang dimohonkan oleh pemohon sebagian besar yaitu mempermasalahkan mengenai pengurangan suara dan pengelembungan suara. Pengurangan suara dan pengelembungan suara

yang didalilkan yaitu pengurangan suara dan atau pengelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik kepada perolehan suara antar calon dalam satu partai politik, antar calon antar partai politik, maupun antar partai politik. Selain itu, pelanggaran administrasi pemilu juga menjadi dalil yang banyak dalam permohonan perselisihan pemilihan umum yang diajukan ke MK.

Dari 340 permohonan yang masuk untuk perkara PHPU legislatif diregistrasi menjadi 260 Perkara yang didasarkan atas permohonan per provinsi dan per partai politik (termasuk yang diajukan Lembaga Masyarakat) serta perkara *Parliamentary Threshold*. Sedangkan untuk permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diregistrasi menjadi 1 Perkara dari 1 Permohonan yang diajukan. Pada perkara PHPU Legislatif jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan sebanyak 560 Dapil dan dikoreksi setelah persidangan menjadi 553 Dapil. Secara umum setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan amar Ditolak, sedangkan untuk PHPU Legislatif diputus dengan amar 12 Dikabulkan Sebagian, 101 Ditolak, dan 104 Tidak Dapat Diterima, serta 43 Gugur serta ditarik kembali oleh Pemohon.

Kehadiran buku Penanganan Perkara Perselisihan Umum Tahun 2019 Dalam Angka ini menjadi salah satu sumber informasi data yang bisa menggambarkan bagaimana proses penanganan perkara yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Budaya untuk memberikan informasi secara detil dan terbuka kepada masyarakat telah menjadi komitmen MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya.

Oleh karena itu, dengan data dan informasi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sebagian informasi yang dibutuhkan masyarakat baik para praktisi, akademisi, peneliti maupun mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proses dan hasil penanganan perkara perselisihan pemilihan umum Tahun 2019 di MK.

Jakarta, Agustus 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	iii
Prakata Tim Penyusun	v

BAGIAN PERTAMA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (LEGISLATIF)

BAB I PENDAHULUAN	3
1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 3	
2. Daerah Pemilihan (Dapil)	6
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara	8
4. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara	8
BAB II PENERIMAAN PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA.....	11
A. Penerimaan Permohonan	11
1. Permohonan.....	11
2. Dalil Permohonan.....	15
B. Registrasi Perkara.....	17
1. Jumlah Perkara Yang Diregistrasi.....	17
2. Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Yang Dipermasalahan.....	21
3. Dalil Yang Dipermasalahan Dalam Perkara.....	26
BAB III PANEL HAKIM.....	29
BAB IV PERSIDANGAN	35
A. Persidangan Pendahuluan.....	35
B. Pemeriksaan Persidangan	36
C. Putusan Sela.....	37
D. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan).....	73
E. Alat Bukti	74
BAB V PUTUSAN AKHIR	77

BAGIAN KEDUA
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

BAB I	PENDAHULUAN	87
	1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.....	87
	2. Pemungutan dan Penghitungan Suara	88
BAB II	PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA.....	91
	1. Permohonan.....	91
	2. Registrasi Perkara.....	95
BAB III	PERSIDANGAN	97
	1. Persidangan Pendahuluan	97
	2. Sidang Pemeriksaan Persidangan	97
	3. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pemohon	98
	4. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pihak Terkait serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pihak Terkait, dan Bawaslu	99
BAB IV	PUTUSAN AKHIR	101
	1. Dalil Pelanggaran TSM.....	101
	2. Dalil Pelanggaran Administratif.....	101

BAGIAN KETIGA
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 (LAYANAN KONSULTASI)

BAB I	LAYANAN KONSULTASI.....	105
BAB II	PENUTUP	107
	Lampiran -	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Partai Politik Peserta Pemilu 2019	4
Tabel 2	Jumlah Dapil Untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tiap Provinsi di Indonesia.....	7
Tabel 3	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.....	8
Tabel 4	Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD	11
Tabel 5	Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PPU DPD RI	13
Tabel 6	Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden/Wapres Per Provinsi Per Partai	13
Tabel 7	Jumlah Jenis Dalil Permohonan PPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	16
Tabel 8	Jumlah Jenis Dalil Perkara PPU DPD RI Tahun 2019	17
Tabel 9	Jumlah Permohonan Yang Diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan ..	17
Tabel 10	Jumlah Perkara Yang Di Registrasi Untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD	18
Tabel 11	Jumlah Rincian Perkara Untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi.....	19
Tabel 12	Jumlah Rincian Perkara Untuk PPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Per Provinsi.....	20
Tabel 13	Jumlah Rincian Perkara untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Per Partai.....	20
Tabel 14	Jumlah Dapil yang Dipermasalahan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi	23
Tabel 15	Jumlah Dapil yang Dipermasalahan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Partai.....	25
Tabel 16	Jumlah Jenis Dalil Perkara PPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019	26
Tabel 17	Jumlah Jenis Dalil Perkara PPU DPD RI Tahun 2019	27
Tabel 18	Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panel I	30
Tabel 19	Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panel II	31

Tabel 20	Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panel III	32
Tabel 21	Jadwal Sidang Pendahuluan Panel I	35
Tabel 22	Jadwal Sidang Pendahuluan Panel II	35
Tabel 23	Jadwal Sidang Pendahuluan Panel III	35
Tabel 24	Jadwal Pemeriksaan Persidangan Panel I	36
Tabel 25	Jadwal Pemeriksaan Persidangan Panel II	36
Tabel 26	Jadwal Pemeriksaan Persidangan Panel III	36
Tabel 27	Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel	44
Tabel 28	Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel	45
Tabel 29	Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019).....	46
Tabel 30	Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel.....	48
Tabel 31	Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel I ..	50
Tabel 32	Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara Panel I.....	53
Tabel 33	Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel I.....	54
Tabel 34	Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel II.....	58
Tabel 35	Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara Panel II.....	59
Tabel 36	Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel II.....	61
Tabel 37	Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel III.....	66
Tabel 38	Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara Panel III....	68
Tabel 39	Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan Panel III.....	69
Tabel 40	Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) Panel I	73
Tabel 41	Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) Panel II	73
Tabel 42	Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) Panel III	73
Tabel 43	Jadwal Sidang Pengucapan Putusan	77
Tabel 44	Persentase Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019.....	80

Tabel 45	Rincian Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PPHU Legislatif 2019	83
Tabel 46	Jenis Amar Putusan Yang Dikabulkan Sebagian Perkara PPHU Legislatif 2019	83
Tabel 47	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	88
Tabel 48	Penyebaran Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	89
Tabel 49	Daftar Perkara dan Putusan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PPHU) Legislatif Tahun 2019	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019	5
Gambar 2	Jumlah Dapil Untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	6
Gambar 3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR RI Tahun 2019	9
Gambar 5	Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Partai Politik Per Provinsi Per Partai	13
Gambar 7	Jumlah Rincian Permohonan Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi Per Partai	14
Gambar 8	Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi Untuk PPHU DPD RI Berdasarkan Wilayah Provinsi Yang Dipermasalahan	15
Gambar 9	Total Dapil yang Dipermasalahan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21
Gambar 10	Total Dapil yang Dipermasalahan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Provinsi	22
Gambar 11	Total Dapil yang Dipermasalahan Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Per Partai	24
Gambar 12	Jumlah Kategori Dalil Perkara PPHU Legislatif Tahun 2019 Per Provinsi	27
Gambar 13	Jumlah Provinsi Dalam Setiap Kategori Dalil Perkara PPHU Legislatif Tahun 2019	28
Gambar 14	Jumlah Pembagian Perkara PPHU Legislatif 2019 Per Panel	29
Gambar 15	Jumlah Dapil Perkara PPHU Legislatif 2019 Per Panel	30
Gambar 16	Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitia Pengganti Panel I	32
Gambar 17	Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitia Pengganti Panel II	33

Gambar 18 Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitera Pengganti Panel III	34
Gambar 19 Jumlah Kuasa Hukum Para Pihak Yang Menghadiri Sidang Putusan Sela 22 Juli 2019	37
Gambar 20 Jumlah Para Pihak (Prinsipal) Yang Menghadiri Sidang Putusan Sela 22 Juli 2019	37
Gambar 21 Jumlah Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019	38
Gambar 22 Jumlah Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 Per Panel.....	38
Gambar 23 Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019 Per Panel.....	39
Gambar 24 Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019	39
Gambar 25 Jumlah Kategori Pertimbangan Mahkamah Pada Perkara Yang Diputus Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019	40
Gambar 26 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019	41
Gambar 27 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019 Per Panel.....	41
Gambar 28 Jumlah Dapil Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019	42
Gambar 29 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pengumuman 22 Juli 2019 Per Panel.....	42
Gambar 30 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)	43
Gambar 31 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel	43
Gambar 32 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019).....	44
Gambar 33 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel.....	45
Gambar 34 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019).....	46
Gambar 35 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)	47
Gambar 36 Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Per Panel.....	47

Gambar 37 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I.....	48
Gambar 38 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I.....	49
Gambar 39 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I.....	49
Gambar 40 Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel I.....	50
Gambar 41 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II.....	56
Gambar 42 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II.....	57
Gambar 43 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II.....	57
Gambar 44 Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel II.....	58
Gambar 45 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III.....	64
Gambar 46 Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III.....	65
Gambar 47 Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III.....	65
Gambar 48 Jumlah Dapil Dalam Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019) Panel III.....	66
Gambar 49 Jumlah Alat Bukti PPHU Legislatif Tahun 2019.....	74
Gambar 50 Rincian Jumlah Alat Bukti PPHU Legislatif Tahun 2019 Panel I.....	74
Gambar 51 Rincian Jumlah Alat Bukti PPHU Legislatif Tahun 2019 Panel II.....	75
Gambar 52 Rincian Jumlah Alat Bukti PPHU Legislatif Tahun 2019 Panel III.....	75
Gambar 53 Jumlah Jenis Putusan Perkara PPHU Legislatif 2019.....	78
Gambar 54 Jumlah Jenis Amar Ketetapan Perkara PPHU Legislatif 2019.....	78
Gambar 55 Jumlah Jenis Amar Putusan Perkara PPHU Legislatif 2019.....	79
Gambar 56 Jumlah Jenis Amar Putusan Perkara PPHU Legislatif 2019 (Ditolak Seluruhnya + Ditolak Sebagian = Ditolak).....	79
Gambar 57 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PPHU Legislatif 2019 Keseluruhan Dapil.....	80

Gambar 58 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPR RI	81
Gambar 59 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPRD Provinsi.....	81
Gambar 60 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPRD Kabupaten/Kota.....	82
Gambar 61 Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan Perkara PHPU Legislatif 2019 Dapil DPD RI.....	82
Gambar 62 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	88
Gambar 63 Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	89
Gambar 64 Jumlah Argumen Permohonan Awal	92
Gambar 65 Jumlah Argumen Permohonan Awal Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK	93
Gambar 66 Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan.....	94
Gambar 67 Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK	95
Gambar 68 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Pendahuluan PHPU Pres/Wapres 2019 14 Juni 2019.....	97
Gambar 69 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan PHPU Pres/Wapres 2019 18 Juni 2019.....	98
Gambar 70 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019 19 Juni 2019.....	98
Gambar 71 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019 20 Juni 2019.....	99
Gambar 72 Jumlah Para Pihak Yang Hadir Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019 21 Juni 2019.....	99
Gambar 73 Jumlah Layanan Konsultasi (Per 19 Juli 2019)	105
Gambar 74 Jumlah Rata-rata Layanan Konsultasi Per Hari (Per 19 Juli 2019)	105
Gambar 75 Jumlah Jenis Layanan Konsultasi Per 19 Juli 2019	106

**BAGIAN
PERTAMA**

**PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

LEGISLATIF

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Sedangkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak, dengan peserta Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan
- c. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.














Pemilihan Umum Tahun 2019 diikuti:

- a. Terdapat 20 partai politik terdiri, yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh;
- b. Terdapat calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Terdapat 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi;
- d. Terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya secara rinci peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Tabel 1
Partai Politik Peserta Pemilu 2019

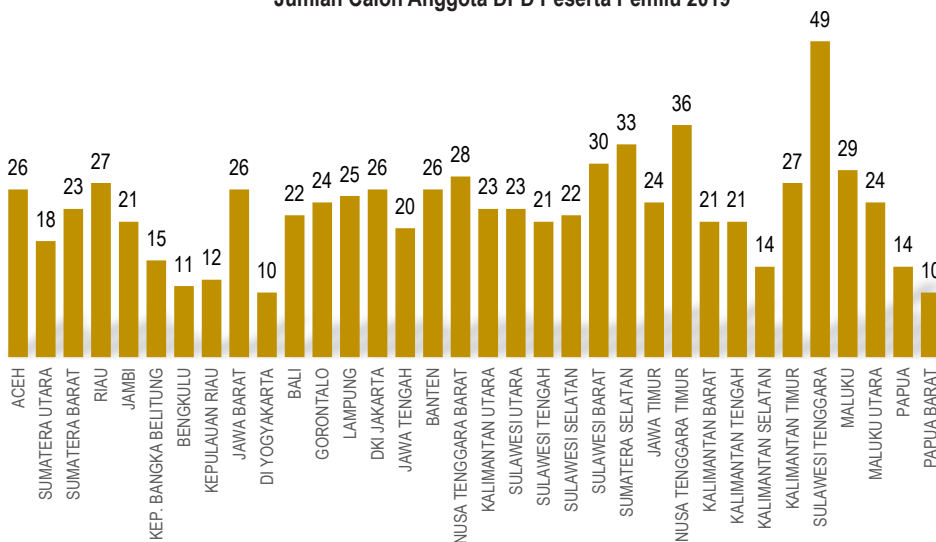
NO	PARTAI POLITIK	
1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
4		PARTAI GOLONGAN KARYA (PARTAI GOLKAR)
5		PARTAI NASDEM
6		PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
7		PARTAI BERKARYA
8		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9		PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
10		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
11		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
12		PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13		PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO		PARTAI POLITIK
14		PARTAI DEMOKRAT
15		PARTAI ACEH (PA) - Partai Politik Lokal Aceh
16		PARTAI SIRA - Partai Politik Lokal Aceh
17		PARTAI DAERAH ACEH (PD ACEH) - Partai Politik Lokal Aceh
18		PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) - Partai Politik Lokal Aceh
19		PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
20		PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sejumlah 20 Partai Politik, 16 Partai Politik merupakan Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik merupakan Partai Politik Lokal Aceh.

b. Calon Anggota DPD Tahun 2019

Gambar 1
Jumlah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019

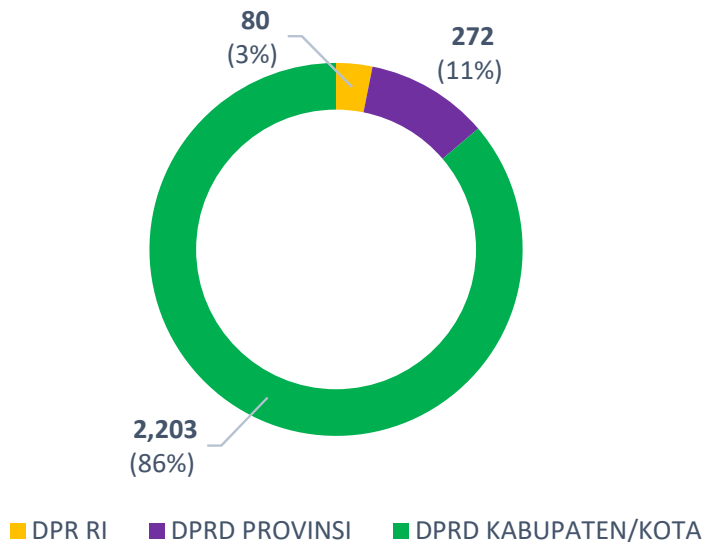


Secara total dari seluruh wilayah Indonesia, jumlah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019 berjumlah 781 Orang, jumlah terbanyak calon dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 49 Orang, sedangkan jumlah paling sedikit pada Provinsi D.I. Yogyakarta dan Papua Barat yang masing-masing hanya 10 Orang.

2. Daerah Pemilihan (Dapil)

Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan di seluruh Indonesia dengan 34 Provinsi yang meliputi 80 Daerah Pemilihan untuk DPR RI, 272 Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan 2.203 Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia.

Gambar 2
Jumlah Dapil
Untuk Pemilihan DPR RI,
DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota



Daerah dengan jumlah Dapil terbanyak pada DPR RI yaitu Jawa Barat dengan 11 Dapil, Jawa Timur dengan 11 Dapil, dan Jawa Tengah dengan 10 Dapil. Sedangkan untuk DPRD Provinsi secara berturut-turut jumlah Dapil terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah 15, 14, dan 13 Daerah Pemilihan. Hal tersebut juga diikuti dengan jumlah Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota dengan Dapil terbanyak pada daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan masing-masing 200, 186, dan 145 Daerah Pemilihan.

Tabel 2
Jumlah Dapil
Untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Tiap Provinsi di Indonesia

NO	PROVINSI	DPR RI	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TOTAL
1	Aceh	2	10	95	107
2	Sumatera Utara	3	12	141	156
3	Sumatera Barat	2	8	71	81
4	Riau	2	8	59	69
5	Jambi	1	6	46	53
6	Kepulauan Bangka Belitung	1	7	25	33
7	Bengkulu	1	8	36	45
8	Kepulauan Riau	1	7	26	34
9	Jawa Barat	11	15	145	171
10	DI Yogyakarta	1	7	27	35
11	Bali	1	9	46	56
12	Gorontalo	1	7	24	32
13	Lampung	2	6	79	87
14	DKI Jakarta	3	10	-	13
15	Jawa Tengah	10	13	186	209
16	Banten	3	10	44	57
17	Nusa Tenggara Barat	2	8	46	56
18	Kalimantan Utara	1	4	14	19
19	Sulawesi Utara	1	6	54	61
20	Sulawesi Tengah	1	6	51	58
21	Sulawesi Selatan	3	11	110	124
22	Sulawesi Barat	1	6	22	29
23	Sumatera Selatan	2	10	75	87
24	Jawa Timur	11	14	200	225
25	Nusa Tenggara Timur	2	8	91	101
26	Kalimantan Barat	2	8	65	75
27	Kalimantan Tengah	1	5	48	54
28	Kalimantan Selatan	2	7	51	60
29	Kalimantan Timur	1	6	41	48
30	Sulawesi Tenggara	1	6	69	76
31	Maluku	1	7	39	47
32	Maluku Utara	1	5	31	37
33	Papua	1	7	102	110
34	Papua Barat	1	5	44	50
Jumlah		80	272	2.203	2.555

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan serentak dengan Pemilihan Anggota DPD RI, serta Pemilihan Presiden dan Calon Presiden yaitu pada tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019. Tahapan tersebut sebelumnya dimulai dengan Kampanye oleh Calon Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 3
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019

TANGGAL	KEGIATAN
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 21 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
21 Mei 2019 Pukul 01:46	Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

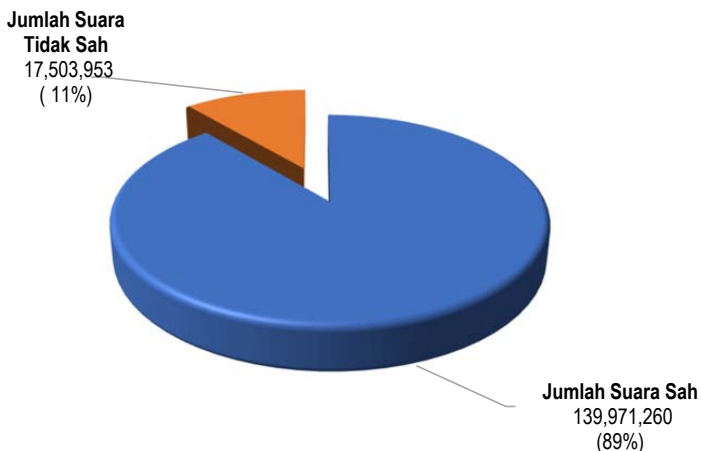
4. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, menunjukkan bahwa:

- a. Rekapitulasi Perhitungan Suara Partai Politik Pemilu DPR 2019

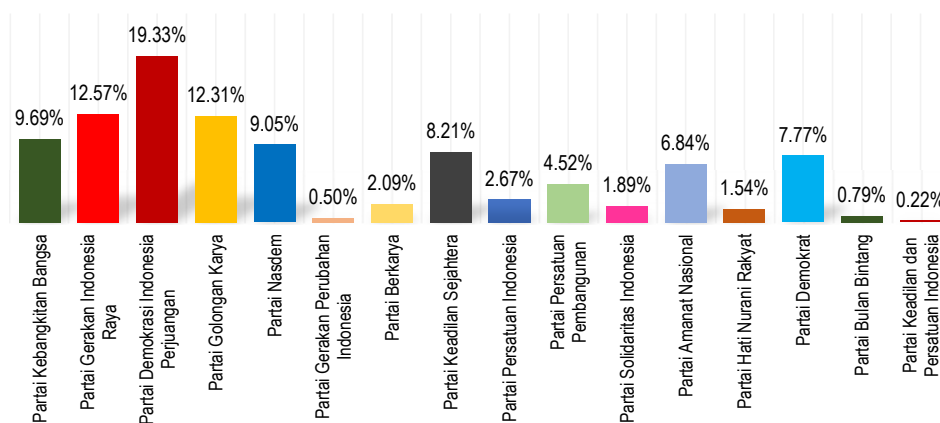
Pada pemilihan Anggota DPR, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 157.475.213 emilih, dari jumlah tersebut untuk suara sah sejumlah 139.971.260 suara atau 89%, sedangkan sisanya yaitu 17.503.953 atau 11% merupakan suara tidak sah.

Gambar 3
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
Pemilu DPR RI Tahun 2019



Perolehan suara partai politik pada pemilu 2019, terbanyak yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejumlah 19,33%, diikuti oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 12,57% dan Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar 12,31%. Untuk partai politik yang paling sedikit memperoleh suara yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang masing-masing 0,22% dan 0,50%.

Gambar 4
Jumlah Perolehan Suara Partai Politik
Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019



BAB II

PENERIMAAN PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA

A. Penerimaan Permohonan

1. Permohonan

Jumlah keseluruhan permohonan yang diterima didasarkan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) sejumlah 340 Permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi
Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD

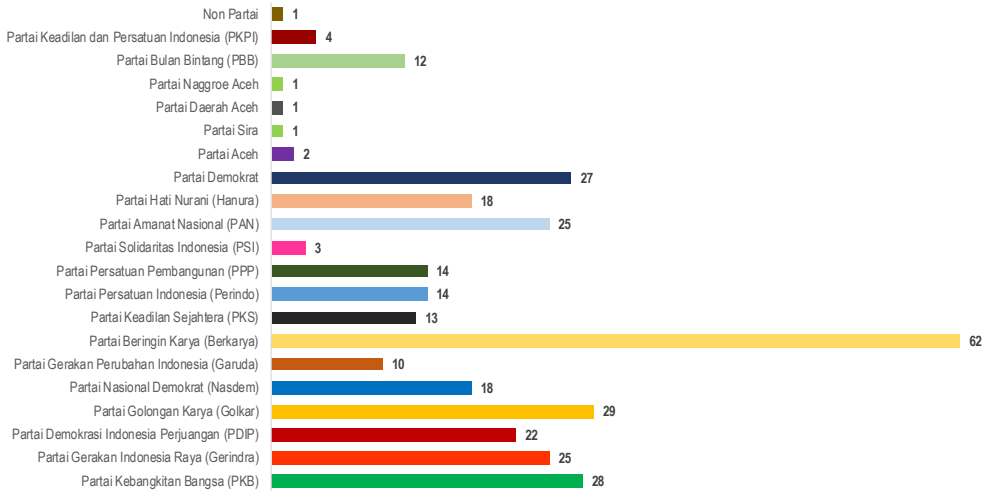
NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH
1	PPHU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota	330
2	PPHU DPD	10
	JUMLAH	340

a. Permohonan PPHU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari Partai atau Subyek Pemohon, dari 330 Permohonan PPHU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah terbanyak yaitu permohonan Partai Berkarya sejumlah 62 Permohonan, selanjutnya Partai Golkar 29 Permohonan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 28 Permohonan dan Partai Demokrat 27 Permohonan.

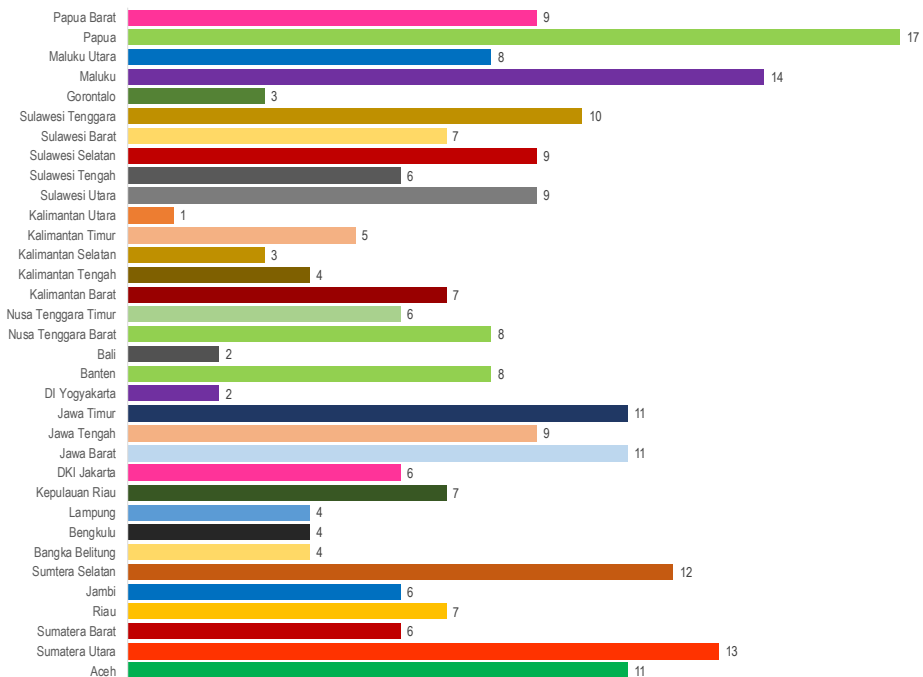
Sedangkan permohonan paling sedikit yaitu 1 Permohonan, yang diajukan oleh partai lokal aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai Sira. Selain partai politik, pada penanganan perkara tahun ini terdapat permohonan yang diajukan oleh Non Partai (Kelompok/Lembaga Masyarakat) sebanyak 1 Permohonan.

Gambar 5
Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi
Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Berdasarkan Partai Politik



Jika dilihat dari wilayah provinsi yang dipermasalahkan dari masing-masing 330 Permohonan, maka jumlah terbanyak yaitu Provinsi Papua dan Jawa Barat yang masing-masing sejumlah 22 Permohonan. Sedangkan yang paling sedikit yaitu pada provinsi Kalimantan Utara sejumlah 1 Permohonan. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6
Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi
Untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Berdasarkan Wilayah Provinsi Yang Dipermasalahkan



b. Permohonan PPHU DPD RI

Permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima meja registrasi sejumlah 10 Permohonan selama masa penerimaan permohonan. Sepuluh permohonan tersebut, permasalahan di 6 wilayah provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Tabel 5
Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi
Untuk PPHU DPD RI

NO	PROVINSI	PEMOHON (Perseorangan Calon Anggota DPD)
1	Sumatera Utara (Sumut)	1. H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag 2. Prof. Dr. Ir. Hj DARMAYANTI LUBIS
2	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD
3	Sulawesi Tenggara (Sultra)	FATMAYANI HARLI TOMBILI
4	Maluku Utara (Malut)	1. IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M. 2. Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.
5	Papua	1. CAREL SIMON PETRUS SUEBU 2. HASBI SUAIB, S.T., M.H 3. Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS
6	Papua Barat	ABDULLAH MANARAY, ST.

Dari keseluruhan permohonan tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan wilayah provinsi yang dimohonkan setiap partai, individu atau kelompok masyarakat adalah sejumlah 260 Permohonan/Provinsi/Partai dengan rincian sebagai berikut:

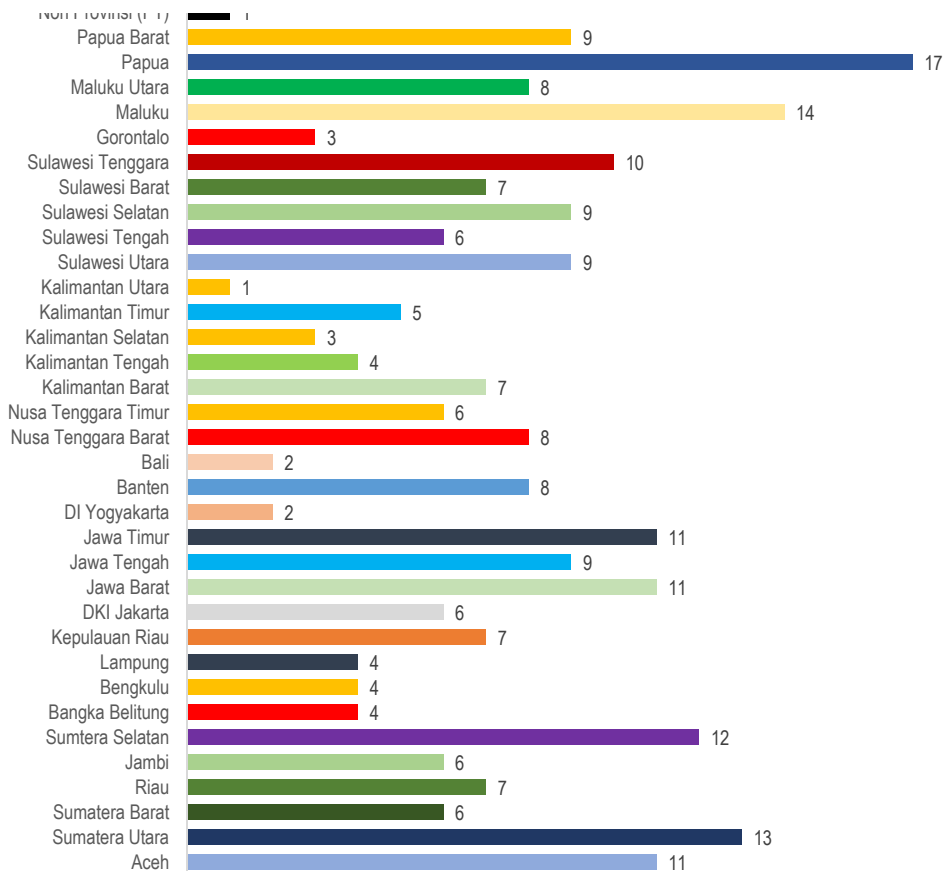
Tabel 6
Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi
Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden/Wapres
Per Provinsi Per Partai

NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PER PROVINSI/PARTAI
1	PPHU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota	250
2	PPHU DPD	10
	JUMLAH	260

Secara rinci apabila permohonan dikategorikan dalam wilayah per provinsi per partai, maka jumlah permohonan PPHU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan sejumlah 250 Permohonan. Jumlah terbanyak pada Provinsi Papua yaitu jumlah keseluruhan Partai Politik Nasional sebanyak 16 Partai dan 1 Permohonan Non Partai jadi berjumlah 17 Permohonan Per Provinsi Per Partai. Berikutnya adalah pada Provinsi Maluku dengan jumlah 14 Permohonan Per Provinsi Per Partai.

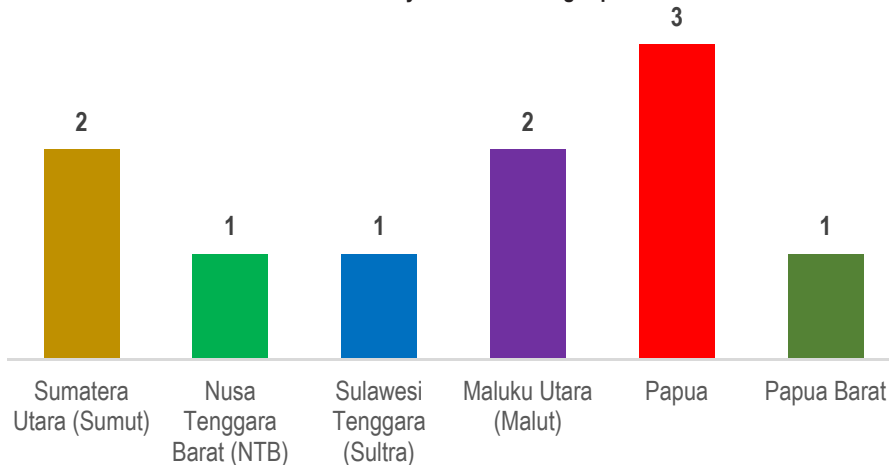
Sedangkan jumlah paling sedikit yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara yang hanya 1 Partai Politik yang mempermasalahkan. Selain itu, terdapat permohonan yang jika diidentifikasi permohonannya merupakan permohonan mengenai *Parliamentary Treshold* (PT) dengan wilayah beberapa provinsi yang dipermasalahkan.

Gambar 7
Jumlah Rincian Permohonan
Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Provinsi Per Partai



Selanjutnya, untuk jumlah terbanyak untuk permohonan PPHU DPD yaitu pada Provinsi Papua sebanyak 3 Permohonan, selanjutnya 2 Permohonan masing-masing pada wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Maluku Utara, sedangkan untuk Provinsi NTB, Sultra, dan Papua Barat masing-masing 1 Permohonan.

Gambar 8
Jumlah Permohonan Yang Masuk Meja Registrasi
Untuk PPHU DPD RI
Berdasarkan Wilayah Provinsi Yang Dipermasalahan



2. Dalil Permohonan

Berdasarkan analisis dalil yang diidentifikasi dalam setiap permohonan, terdapat 11 dalil utama yang dalam setiap permohonan yang di ajukan dalam PPHU Legislatif Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Pengurangan Suara;
2. Pengelembungan Suara;
3. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Surat Suara yang telah tercoblos;
6. Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan);
7. TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif);
8. Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
9. Politik uang (*money politic*);
10. Pembukaan Kotak Suara; dan
11. Tindak Pidana Pemilu.

Atas dasar pengkategorian dalil diatas, maka jumlah dalil yang diajukan dalam permohonan pada setiap partai politik sejumlah 482 dalil, dimana setiap permohonan ada yang mendalilkan lebih dari satu kategori dalil. Secara rinci jumlah dalil yang diajukan per partai adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Jenis Dalil Permohonan
PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019

No	Kategori Dalil	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah Permohonan per Provinsi
1	Pengurangan Suara	172	52,1%
2	Penggelembungan Suara	193	58,5%
3	Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu	4	1,2%
4	Pelanggaran administrasi Pemilu	51	15,5%
5	Surat Suara yang telah tercoblos	1	0,3%
6	Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan)	19	5,8%
7	TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif)	21	6,4%
8	Netralitas ASN, TNI dan POLRI	3	0,9%
9	Politik uang (money politik)	5	1,5%
10	Pembukaan Kotak Suara	7	2,1%
11	Tindak Pidana Pemilu	6	1,8%
Jumlah		482	Jumlah Permohonan 330

Dalil terbanyak yang diajukan yaitu mengenai Penggelembungan Suara yaitu sekitar 193 Permohonan atau sekitar 58,5 % dari jumlah permohonan, selanjutnya adalah dalil mengenai Pengurangan Suara sebanyak 172 Permohonan atau sekitar 52,1% dari total permohonan yang diterima di meja registrasi. Sedangkan dalil yang paling sedikit adalah mengenai Surat Suara yang telah tercoblos yang hanya 1 Permohonan atau sekitar 0,3% permohonan yang mendalilkan.

Untuk dalil TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif) untuk Permohonan PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebanyak 21 Permohonan atau sekitar 6,4% dari total permohonan.

Pada permohonan PHPU DPR RI, dari keseluruhan perkara, jika diidentifikasi dalil yang diajukan berjumlah 17 dalil, dengan jumlah terbanyak pada dalil Penggelembungan Suara sebanyak 6 Dalil atau 60% dari jumlah Permohonan PHPU DPR RI.

Tabel 8
Jumlah Jenis Dalil Perkara PPHU DPD RI
Tahun 2019

No	Dalil	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah Perkara
1	Pengurangan Suara	5	50%
2	Penggelembungan Suara	6	60%
3	Pelanggaran administrasi Pemilu	4	40%
4	Politik uang (<i>money politic</i>)	1	10%
5	Tindak Pidana Pemilu	1	10%
Jumlah		17	

B. Registrasi Perkara

1. Jumlah Perkara Yang Diregistrasi

Dari jumlah permohonan PPHU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota yang diajukan terdapat beberapa permohonan yang tidak dilengkapi dengan permohonannya namun hanya menyampaikan Surat Kuasa dan atau Surat Persetujuan DPP Parpol, sehingga diterbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon.

Selain itu, terdapat satu permohonan yang ditarik yaitu pada Partai Gerindra untuk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan PPHU Tahun 2019 tertanggal 28 Mei 2019 dan diterima meja registrasi pada tanggal 28 Mei 2019 yang juga di terbitkan Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan Pemohon (AP4).

Tabel 9
Jumlah Permohonan Yang Diterbitkan
Akta Pembatalan Pengajuan Permohonan

No	Partai	Provinsi	Nomor AP3	Nomor AP4
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	Nusa Tenggara Timur (NTT)	341-04-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	03-04-19/AP4-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sumatera Barat (Sumbar)	342-04-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	02-04-03/AP4-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kalimantan Selatan	89-02-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	01-02-22/AP4-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dari keseluruhan permohonan, Permohonan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) pada Hari Senin, 1 Juli 2019. Didasarkan atas permohonan per partai dan per provinsi maka jumlah perkara yang diregistrasi untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yaitu sejumlah 250 Perkara yang terdiri dari :

- PPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di ajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan Partai Politik sejumlah 248 Perkara;
- PPU DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di ajukan oleh Kelompok Masyarakat sejumlah 1 Perkara; dan
- PPU DPR RI di ajukan oleh Partai Politik yang mendalilkan *Parliamentary Threshold* dari Partai Berkarya yang secara khusus di registrasi sejumlah 1 Perkara.

Untuk Permohonan Calon Anggota DPD pada PPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika didasarkan pada seluruh permohonan calon anggota DPD maka jumlah perkara yang di registrasi sejumlah 10 Perkara. Secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10
Jumlah Perkara Yang Di Registrasi
Untuk PPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	a. PPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota di ajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan	248
	b. PPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten-Kota diajukan oleh Kelompok Masyarakat	1
	c. PPU DPR RI (<i>Parliamentary Threshold</i>)	1
2	PPU DPD	10
	TOTAL	260

Perkara PPU DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diregistrasi terdapat pada seluruh wilayah 34 Provinsi di Indonesia dengan Perkara terbanyak pada Provinsi Papua yaitu sebanyak 17 perkara yang terdiri dari 16 Perkara dengan pemohon Partai Politik, dan 1 Perkara dengan pemohon Kelompok Masyarakat, sedangkan permohonan paling sedikit pada Provinsi Kalimantan Utara yang hanya 1 Perkara.

Tabel 11
Jumlah Rincian Perkara
Untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Provinsi

NO	PROVINSI	JUMLAH PERKARA
1	Aceh	11
2	Sumatera Utara	13
3	Sumatera Barat	6
4	Riau	7
5	Jambi	6
6	Sumtera Selatan	12
7	Bangka Belitung	4
8	Bengkulu	4
9	Lampung	4
10	Kepulauan Riau	7
11	DKI Jakarta	6
12	Jawa Barat	11
13	Jawa Tengah	9
14	Jawa Timur	11
15	DI Yogyakarta	2
16	Banten	8
17	Bali	2
18	Nusa Tenggara Barat	8
19	Nusa Tenggara Timur	6
20	Kalimantan Barat	7
21	Kalimantan Tengah	4
22	Kalimantan Selatan	3
23	Kalimantan Timur	5
24	Kalimantan Utara	1
25	Sulawesi Utara	9
26	Sulawesi Tengah	6
27	Sulawesi Selatan	9
28	Sulawesi Barat	7
29	Sulawesi Tenggara	10
30	Gorontalo	3
31	Maluku	14
32	Maluku Utara	8
33	Papua	17*
34	Papua Barat	9
35	Non Provinsi (PT)	1
Jumlah		250
*termasuk pengajuan kelompok masyarakat sebanyak satu (1) perkara		

Perkara PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdapat pada 6 Provinsi di Indonesia. Dari total perkara di 6 Provinsi jumlah terbanyak terdapat pada provinsi Papua dengan jumlah 3 Perkara, sedangkan untuk Provinsi NTB, Sultra, dan Papua Barat masing-masing hanya 1 Perkara.

Tabel 12
Jumlah Rincian Perkara
Untuk PHPU Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Per Provinsi

NO	PROVINSI	JUMLAH PERKARA
1	Sumatera Utara	2
2	Nusa Tenggara Barat	1
3	Sulawesi Tenggara	1
4	Maluku Utara	2
5	Papua	3
6	Papua Barat	1
Jumlah		10

Jika didasarkan dari Partai yang mengajukan permohonan, perkara paling banyak adalah perkara Partai Berkarya sebanyak 35 Perkara yang terdiri dari perkara di 34 Provinsi di Indonesia dan 1 Perkara *Parliamentary Threshold*. Sedangkan perkara paling sedikit pada Partai lokal aceh yang masing-masing dihitung 1 Perkara.

Tabel 13
Jumlah Rincian Perkara
untuk PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Partai

NO	PARTAI	JUMLAH PERKARA
1	Lembaga Masyarakat	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	17
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	21
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	20
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	19
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	16
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	9
8	Partai Beringin Karya (Berkarya)	35*
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	13
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	13
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3

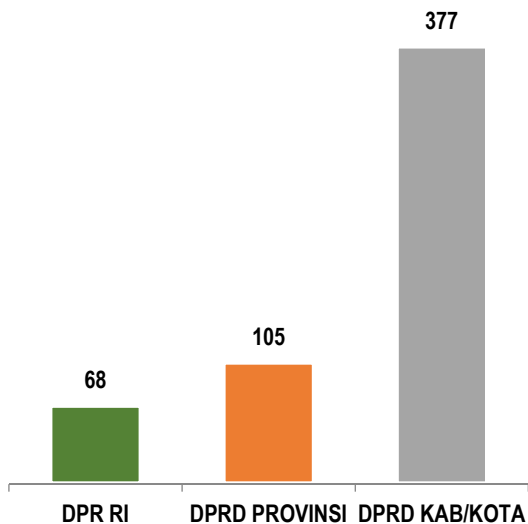
NO	PARTAI	JUMLAH PERKARA
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	16
14	Partai Hati Nurani (Hanura)	14
15	Partai Demokrat	23
16	Partai Aceh	1
17	Partai Sira	1
18	Partai Daerah Aceh	1
19	Partai Naggroe Aceh	1
20	Partai Bulan Bintang (PBB)	12
21	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3
	Jumlah	250

*termasuk Perkara *Parliamentary Treshold* = 1 Perkara

2. Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Yang Dipermasalahkan

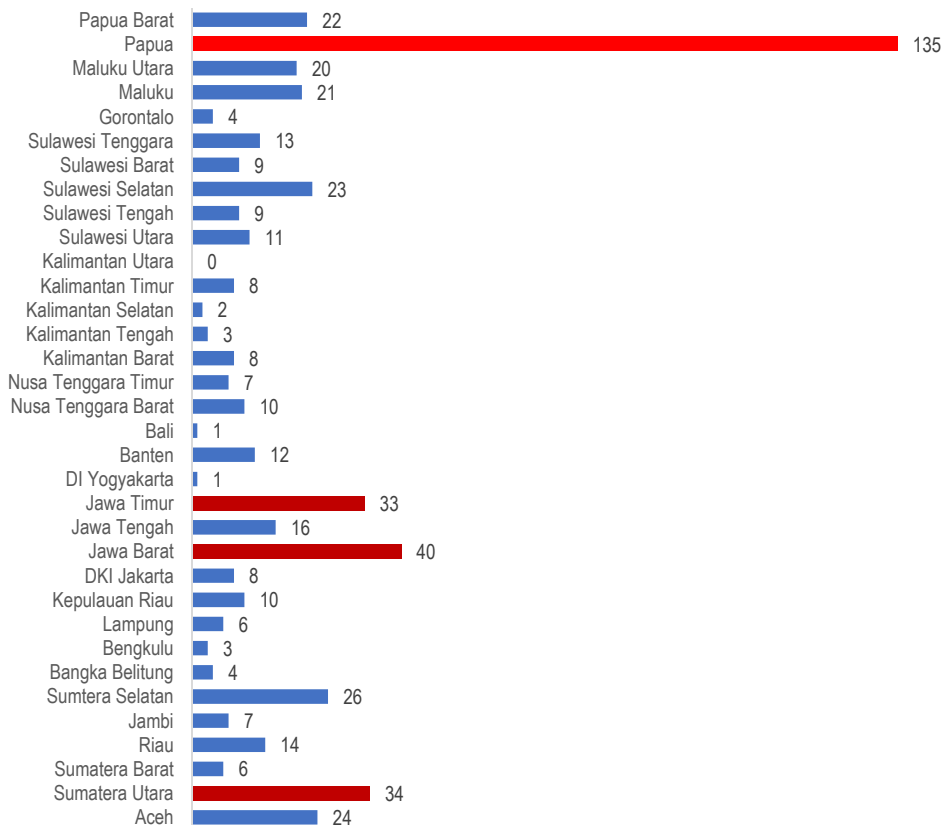
Dari keseluruhan perkara, jika diidentifikasi dari dalil permohonan yang diajukan terdapat 550 Dapil yang dipermasalahkan untuk PPHU DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yaitu untuk perkara DPR RI sejumlah 68 Dapil, DPRD Provinsi 107 Dapil dan untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 377 Dapil.

Gambar 9
Total Dapil yang Dipermasalahkan
Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota



Dari keseluruhan Dapil yang dipermasalahkan, jika dilihat dari penyebarannya, Dapil terbanyak yang dipermasalahkan yaitu pada Provinsi Papua dengan jumlah total sebanyak 135 Dapil diikuti Provinsi Jawa Barat sejumlah 40 Dapil, sedangkan untuk Dapil terkecil yaitu pada Provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan Kalimantan Utara tidak terdapat dapil yang dipermasalahkan dikarenakan permohonan yang ada tidak dapat diidentifikasi.

Gambar 10
Total Dapil yang Dipermasalahkan
Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Provinsi

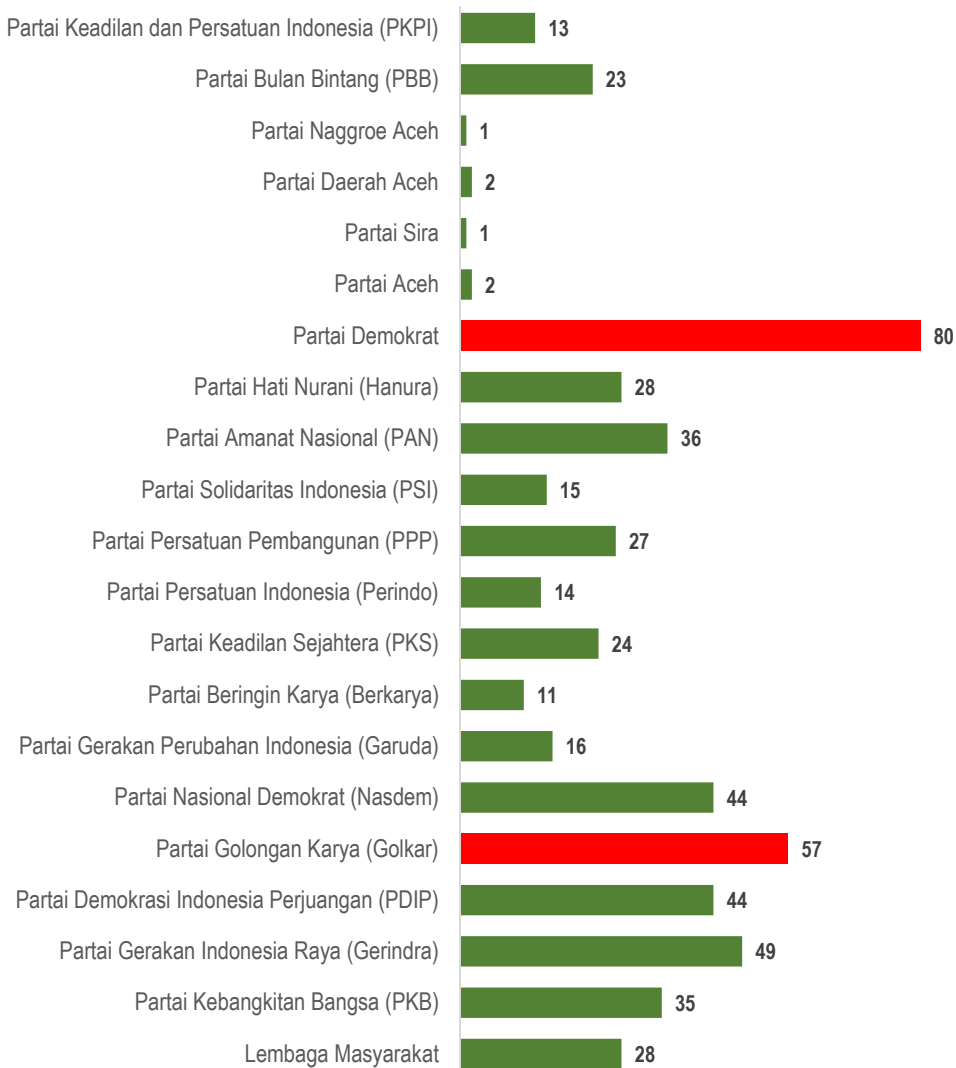


Tabel 14
Jumlah Dapil yang Dipermasalahan
Dalam Perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Provinsi

NO	PROVINSI	JUMLAH DAPIL			
		DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA	TOTAL
1	Aceh	2	9	13	24
2	Sumatera Utara	2	3	29	34
3	Sumatera Barat	1	1	4	6
4	Riau	2	2	10	14
5	Jambi	0	1	6	7
6	Sumatera Selatan	1	4	21	26
7	Bangka Belitung	2	0	2	4
8	Bengkulu	0	2	1	3
9	Lampung	1	1	4	6
10	Kepulauan Riau	0	2	8	10
11	DKI Jakarta	5	3	0	8
12	Jawa Barat	10	6	24	40
13	Jawa Tengah	7	2	7	16
14	Jawa Timur	8	3	22	33
15	DI Yogyakarta	0	1	0	1
16	Banten	3	1	8	12
17	Bali	0	1	0	1
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	8	10
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	6	7
20	Kalimantan Barat	1	3	4	8
21	Kalimantan Tengah	0	0	3	3
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2
23	Kalimantan Timur	1	0	7	8
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	2	0	9	11
26	Sulawesi Tengah	1	2	6	9
27	Sulawesi Selatan	4	3	16	23
28	Sulawesi Barat	2	3	4	9
29	Sulawesi Tenggara	0	2	11	13
30	Gorontalo	0	1	3	4
31	Maluku	1	9	11	21
32	Maluku Utara	1	8	11	20
33	Papua	7	24	104	135
34	Papua Barat	2	7	13	22
		68	105	377	550

Apabila perkara dilihat berdasarkan dapil pada masing-masing partai, dapil terbanyak dipermasalahkan pada Partai Demokrat yaitu sebanyak 82 Dapil. Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 57 dapil. Sedangkan dapil tersedikit yang dipermasalahkan yaitu oleh Partai Lokal Aceh.

Gambar 11
Total Dapil yang Dipermasalahkan
Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Partai



Tabel 15
Jumlah Dapil yang Dipermasalahan
Dalam Perkara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Per Partai

NO	PARTAI	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA	JUMLAH
1	Lembaga Masyarakat	1	3	24	28
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	10	20	35
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	14	12	23	49
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	3	36	44
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	9	10	38	57
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	10	8	26	44
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	0	2	14	16
8	Partai Beringin Karya (Berkarya)	0	2	9	11
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	5	17	24
10	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	2	12	14
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	6	17	27
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	3	12	15
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	5	25	36
14	Partai Hati Nurani (Hanura)	0	7	21	28
15	Partai Demokrat	11	18	51	80
16	Partai Aceh	0	2	0	2
17	Partai Sira	0	0	1	1
18	Partai Daerah Aceh	0	1	1	2
19	Partai Naggroee Aceh	0	1	0	1
20	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	2	21	23
21	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	3	9	13
JUMLAH		72	68	105	550

3. Dalil Yang Dipermasalahkan Dalam Perkara

Sesuai dengan dengan analisis dalil yang diidentifikasi dalam setiap permohonan, 11 dalil utama yang identifikasi dalam setiap perkara PHPU Legislatif Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Pengurangan Suara;
2. Pengelembungan Suara;
3. Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Surat Suara yang telah tercoblos;
6. Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan);
7. TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif);
8. Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
9. Politik uang (*money politic*);
10. Pembukaan Kotak Suara; dan
11. Tindak Pidana Pemilu.

3.1 Dalil PHPU Legislatif

Jika identifikasi dalil permohonan sebelumnya dikelompokan dalam perkara yang diregistrasi, maka jumlah dalil yang diajukan dalam perkara sejumlah 436 dalil, dimana setiap perkara ada yang mendalilkan lebih dari satu kategori dalil, dan untuk perkara yang terdiri dari beberapa permohonan dihitung dalil tunggal. Secara rinci jumlah dalil yang diajukan setiap perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Jumlah Jenis Dalil Perkara
PHPU DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019

No	Kategori Dalil	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah Permohonan per Provinsi
1	Pengurangan Suara	156	62,4%
2	Pengelembungan Suara	170	68,0%
3	Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu	4	1,6%
4	Pelanggaran administrasi Pemilu	47	18,8%
5	Surat Suara yang telah tercoblos	1	0,4%
6	Ketidakjelasan Daftar Pemilih (Baik Tetap maupun Tambahan)	18	7,2%
7	TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif)	19	7,6%
8	Netralitas ASN, TNI dan POLRI	3	1,2%
9	Politik uang (money politik)	5	2,0%
10	Pembukaan Kotak Suara	7	2,8%
11	Tindak Pidana Pemilu	6	2,4%
Jumlah		436	Jumlah Perkara 250

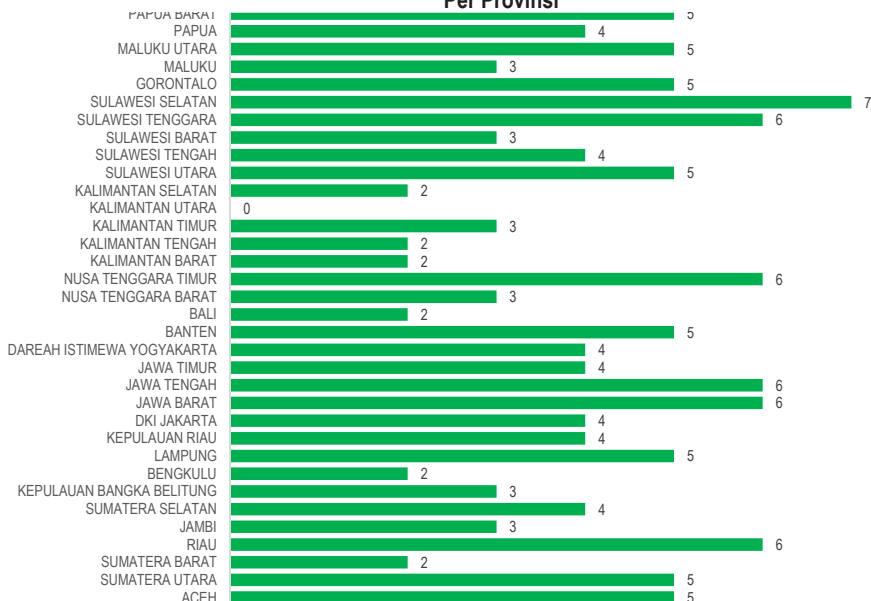
Dalil terbanyak yang diajukan yaitu mengenai Penggelembungan Suara yaitu sekitar 170 Perkara atau sekitar 68 % dari jumlah perkara, selanjutnya adalah dalil mengenai Pengurangan Suara sebanyak 156 Perkara atau sekitar 62,4% dari total perkara yang diregistrasi. Sedangkan dalil yang paling sedikit adalah mengenai Surat Suara Yang Telah Tercoblos yang hanya 1 Perkara atau sekitar 0,4% yang mendalilkan.

Pada dalil TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) untuk Perkara PPHU DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebanyak 19 Perkara atau sekitar 7,6% dari total perkara. Selanjutnya untuk perkara PPHU DPD RI penghitungannya masih sama dengan dalil dalam permohonan karena dari 10 permohonan yang masuk seluruhnya diregistrasi menjadi 10 Perkara. Maka, untuk perkara DPD dalilnya berjumlah 17 dalil, dengan jumlah terbanyak pada dalil Penggelembungan Suara sebanyak 6 Dalil atau 60% dari jumlah Perkara PPHU DPD.

Tabel 17
Jumlah Jenis Dalil Perkara PPHU DPD RI
Tahun 2019

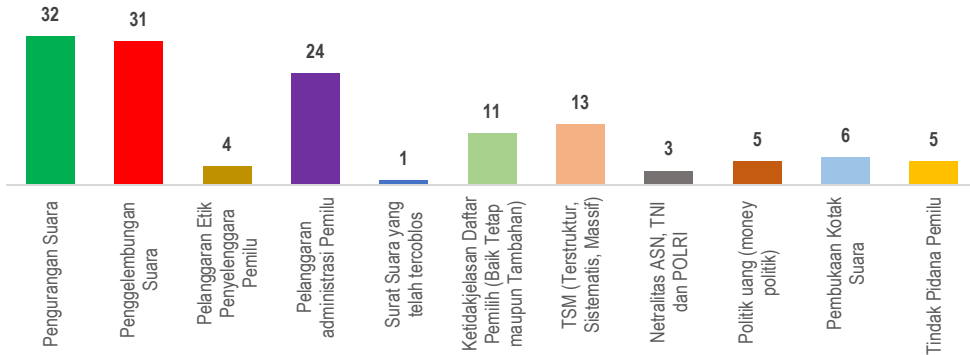
No	Dalil	Jumlah	Persentase terhadap Jumlah Perkara
1	Pengurangan Suara	5	50%
2	Penggelembungan Suara	6	60%
3	Pelanggaran administrasi Pemilu	4	40%
4	Politik uang (<i>money politic</i>)	1	10%
5	Tindak Pidana Pemilu	1	10%
Jumlah		17	Jumlah Perkara 10

Gambar 12
Jumlah Kategori Dalil Perkara PPHU Legislatif Tahun 2019
Per Provinsi



Dari 11 kategori dalil bila dilihat pada setiap provinsi yang dipermasalahkan secara rata-rata setiap provinsi mendalilkan 4 jenis kategori dalil. Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak yaitu memiliki 7 Dalil dari 11 kategori Dalil, dan paling sedikit yaitu 2 Dalil, kecuali Provinsi Kalimantan Utara yang tidak ada dalil karena permohonannya tidak dapat diidentifikasi.

Gambar 13
Jumlah Provinsi Dalam Setiap Kategori Dalil Perkara PPHU Legislatif
Tahun 2019



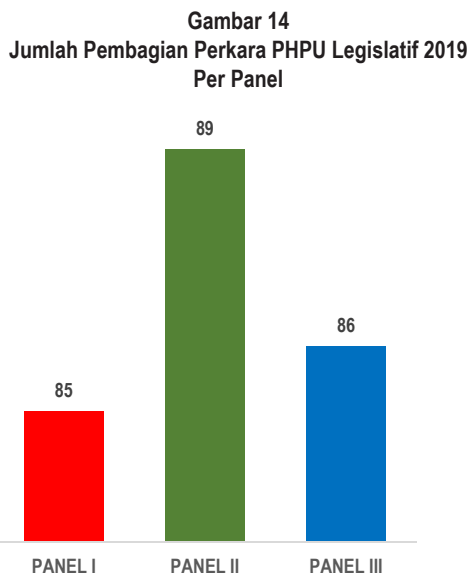
Dalil pengurangan suara didalilkan di 32 Provinsi dan Pengelembungan Suara didalilkan di 31 Provinsi sehingga dapat dikatakan bahwa lebih dari 91% Provinsi dipermasalahkan mengenai kedua dalil dimaksud. Selain itu dalil Pelanggaran Administrasi Pemilu dipermasalahkan di 24 Provinsi atau 71%.

BAB III PANEL HAKIM

Dalam penanganan perkara PPHU Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi membagi dalam 3 Panel Hakim yaitu:

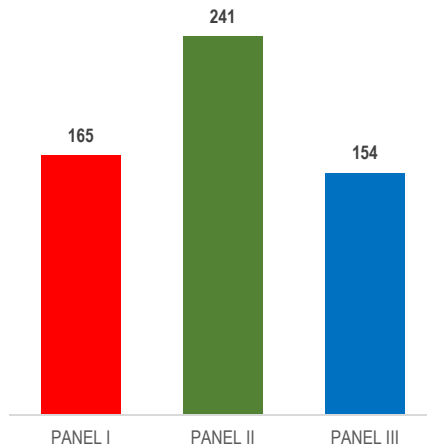
1. Panel I terdiri dari **Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**; **Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.**; dan **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**
2. Panel II terdiri dari **Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM.**; **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA**; dan **Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H.**
3. Panel III terdiri dari **Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.**; **Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.**; dan **Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H.**

Dari keseluruhan total perkara legislatif yaitu sebanyak 260 Perkara untuk PPHU DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan 10 perkara untuk PPHU DPD, dibagi dalam tiga (3) Panel dengan mengikuti pembagian provinsi.



Panel I menangani sebanyak 85 Perkara dengan total dapil yang dipermasalahkan sebanyak 165 Dapil, Panel II menangani paling banyak yaitu 89 Perkara dengan jumlah Dapil sebanyak 241 Dapil, sedangkan Panel III menangani 86 Perkara dengan 154 Dapil yang dipermasalahkan.

Gambar 15
Jumlah Dapil Perkara PPHU Legislatif 2019
Per Panel



Secara detail untuk pembagian perkara per panel adalah sebagai berikut:

a. Panel I

Pada Panel I untuk perkara PPHU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 11 Provinsi dan 1 Perkara *Parliamentary Threshold* (PT) dengan jumlah total perkara sebanyak 82 Perkara. Sedangkan untuk PPHU DPD sebanyak 3 Perkara, sehingga total perkara legislatif yang di tangani oleh Panel I adalah sebanyak 85 Perkara yang diregistrasi.

Tabel 18
Jumlah Perkara dan Dapil
Yang Ditangani Panel I

NO	PROVINSI	JUMLAH PERKARA	JUMLAH DAPIL			TOTAL
			DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA	
1	Aceh	11	2	9	13	24
2	Sumatera Utara	13	2	3	29	34
3	Riau	7	2	2	10	14
4	Jambi	6	0	1	6	7
5	Bangka Belitung	4	2	0	2	4
6	DKI Jakarta	6	5	3	0	8
7	Jawa Timur	11	8	3	22	33
8	Nusa Tenggara Timur	6	1	0	6	7
9	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0
10	Sulawesi Barat	7	2	3	4	9
11	Papua Barat	9	2	7	13	22
12	<i>Parliamentary Threshold</i>	1				
Jumlah		82	26	31	105	162
DPD RI						
1	Sumatera Utara			2		2
2	Papua Barat			1		1
Jumlah				3		3
Total		85				165

Dari total 82 perkara untuk perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang di tangani Panel I, jumlah dapil yang dipermasalahkan sebanyak 162 Dapil. Dan untuk perkara DPD dihitung 3 Dapil untuk 3 Perkara yang terdiri 9 wilayah kabupaten/kota yang dipermasalahkan. Sehingga total dapil yang ditangani oleh Panel I berjumlah 165 Dapil diluar perkara PT.

b. Panel II

Pada Panel II untuk perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 12 Provinsi dengan jumlah total perkara sebanyak 86 Perkara. Sedangkan untuk PHPU DPD sebanyak 3 Perkara, sehingga total perkara legislatif yang di tangani oleh Panel I adalah sebanyak 89 Perkara yang diregistrasi.

Tabel 19
Jumlah Perkara dan Dapil
Yang Ditangani Panel II

NO	PROVINSI	JUMLAH PERKARA	JUMLAH DAPIL			TOTAL
			DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA	
1	Sumatera Selatan	12	1	4	21	26
2	Bengkulu	4	0	2	1	3
3	Lampung	4	1	1	4	6
4	Kepulauan Riau	7	0	2	8	10
5	Jawa Tengah	9	7	2	7	16
6	DI Yogyakarta	2	0	1	0	1
7	Banten	8	3	1	8	12
8	Bali	2	0	1	0	1
9	Kalimantan Tengah	4	0	0	3	3
10	Gorontalo	3	0	1	3	4
11	Maluku	14	1	9	11	21
12	Papua	17	7	24	104	135
Jumlah		86	20	48	170	238
DPD RI						
1	Papua		3			3
Jumlah			3			3
Total		89				241

Dari total 86 perkara untuk perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang di tangani Panel II, jumlah dapil yang dipermasalahkan sebanyak 238 Dapil. Dan untuk perkara DPD dihitung 3 Dapil untuk 3 Perkara yang terdiri 17 wilayah kabupaten/kota yang dipermasalahkan. Sehingga total dapil yang ditangani oleh Panel II berjumlah 241 Dapil.

c. Panel III

Pada Panel III untuk perkara PHPU DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terdiri dari 11 Provinsi dengan jumlah total perkara sebanyak 82 Perkara. Sedangkan untuk PHPU DPD sebanyak 4 Perkara, sehingga total perkara legislatif yang di tangani oleh Panel I adalah sebanyak 86 Perkara yang diregistrasi.

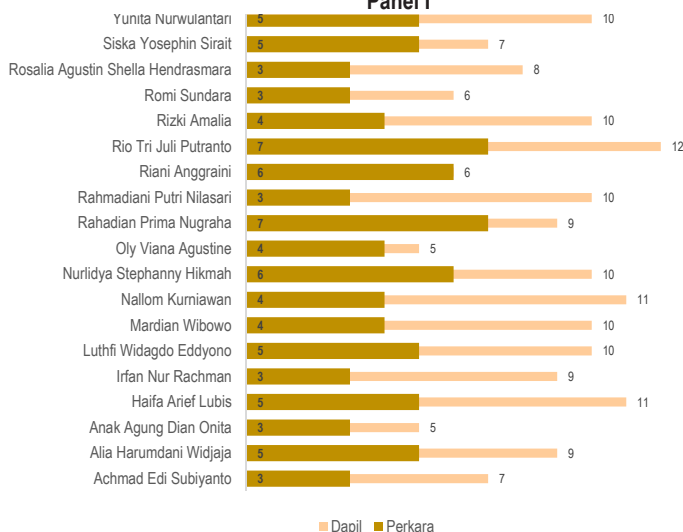
Tabel 20
Jumlah Perkara dan Dapil
Yang Ditangani Panel III

NO	PROVINSI	JUMLAH			TOTAL
		PARTA/PERKARA	DPR RI	DPRD PROVINSI	
1	Sumatera Barat	6	1	1	6
2	Jawa Barat	11	10	6	40
3	Nusa Tenggara Barat	8	1	1	10
4	Kalimantan Barat	7	1	3	8
5	Kalimantan Selatan	3	0	0	2
6	Kalimantan Timur	5	1	0	8
7	Sulawesi Utara	9	2	0	11
8	Sulawesi Tengah	6	1	2	9
9	Sulawesi Selatan	9	4	3	23
10	Sulawesi Tenggara	10	0	2	13
11	Maluku Utara	8	1	8	20
Jumlah		82	22	26	150
DPD RI					
1	Nusa Tenggara Barat			1	1
2	Sulawesi Tenggara			1	1
3	Maluku Utara			2	2
Jumlah				4	4
Total		86			154

Dari total 82 perkara untuk perkara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang di tangani Panel III, jumlah dapil yang dipermasalahkan sebanyak 150 Dapil. Dan untuk perkara DPD dihitung 4 Dapil untuk 4 Perkara yang terdiri 10 wilayah kabupaten/kota yang dipermasalahkan. Sehingga total dapil yang ditangani oleh Panel III berjumlah 154 Dapil.

Dalam menangani perkara, Hakim Konstitusi dibantu oleh Panitera Pengganti yang terbagi juga dalam setiap Panel Hakim. Pada Panel I, Panitera Pengganti yang membantu menangani perkara sejumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut:

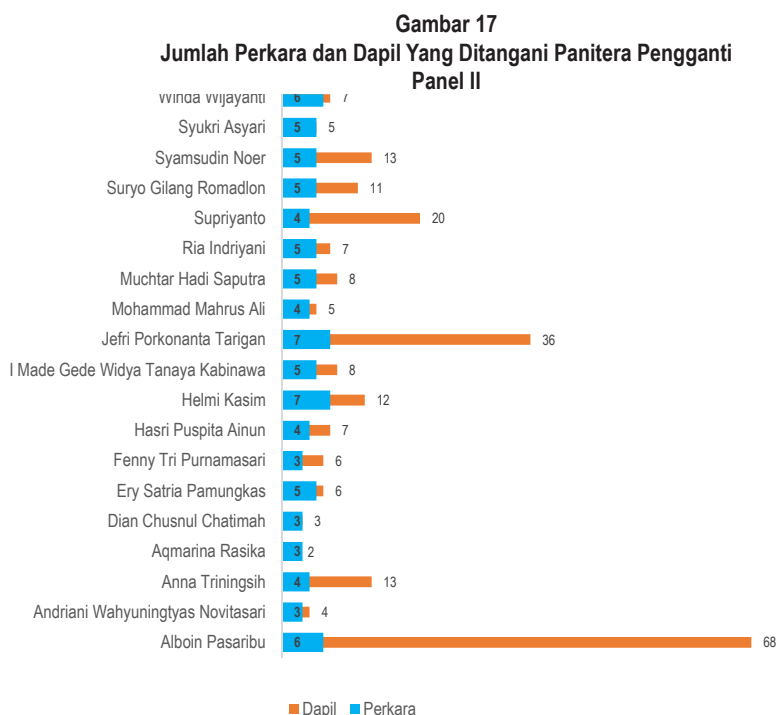
Gambar 16
Jumlah Perkara dan Dapil Yang Ditangani Panitera Pengganti
Panel I



Dari 19 Panitia Pengganti yang membantu menangani perkara Panel I, jumlah perkara terbanyak maksimal 7 Perkara yang di tangani masing-masing oleh Rio Tri Juli Putranto dan Rahadian Prima Nugraha. Sedangkan paling sedikit Panitia Pengganti di Panel I menangani 3 Perkara yaitu masing-masing oleh Rosalia Agustin, Romi Sundara, Rahmadiani Putri Nilasari, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, dan Achmad Edi Subiyanto.

Jika dilihat dapil yang ditangani, paling banyak yaitu Rio Tri Juli Putranto sebanyak 12 Dapil diikuti oleh Nallom Kurniawan dan Haifa Arief Lubis yang masing-masing sebanyak 11 Dapil. Dapil yang paling sedikit ditangani oleh Oli Viana Agustine dan Anak Agung Dian Onita yang masing-masing sebanyak 5 Dapil.

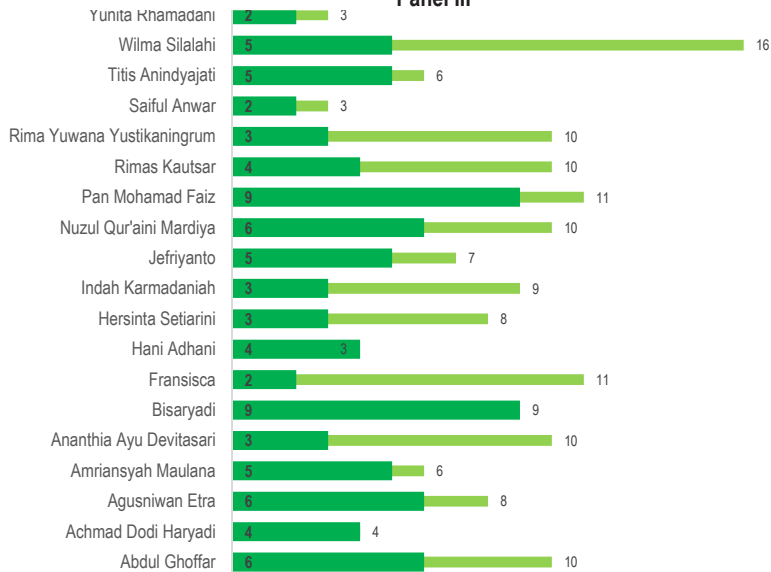
Pada Panel II, Panitia Pengganti yang membantu menangani perkara sejumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut:



Untuk Panel II dari 19 Panitia Pengganti yang membantu menangani perkara, jumlah perkara yang ditangani terbanyak yaitu 7 Perkara oleh Helmi Kasim, sedangkan paling sedikit adalah 3 perkara yang masing-masing ditangani oleh Fenny Tri Pusnamasari, Dian Chusnul Chatimah, Aqmarina Rasika, dan Alboin Pasaribu.

Dari sisi jumlah dapil, dapil terbanyak ditangani oleh Alboin Pasaribu yaitu 68 Dapil, kemudian Jefri Porkonanta yang membantu menangani 36 Dapil. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Aqmarina dengan 2 Dapil, dan Dian Chusnul Chatimah dengan 3 Dapil.

Gambar 18
Jumlah Perkara dan Dapil
Yang Ditangani Panitera Pengganti
Panel III



Panel III juga ditangani oleh 19 Panitera Pengganti, dengan perkara terbanyak 9 Perkara yang ditangani masing-masing oleh Bisaryadi dan Pan Mohamad Faiz. Dapil terbanyak pada Panel III sejumlah 16 Dapil yang ditangani oleh Wilma Silalahi, kemudian 11 Dapil yang ditangani masing-masing oleh Pan Mohamad Faiz dan Fransisca.

BAB IV PERSIDANGAN

A. Persidangan Pendahuluan

Sesuai dengan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, setelah Permohonan yang masuk di registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan mulai tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019, dalam rangka memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Sidang Pendahuluan dilakukan oleh masing-masing Panel dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 21
Jadwal Sidang Pendahuluan
Panel I

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 9 Juli 2019	Jawa Timur, Aceh, dan <i>Parliamentary Treshold</i> (PT)
2	Rabu, 10 Juli 2019	Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat
3	Kamis, 11 Juli 2019	Sumatera Utara dan Papua Barat
4	Jum'at, 12 Juli 2019	Kalimantan Utara, Jambi, Bangka Belitung, dan Riau

Tabel 22
Jadwal Sidang Pendahuluan
Panel II

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 9 Juli 2019	Papua
2	Rabu, 10 Juli 2019	Jawa Tengah, Banten dan Lampung
3	Kamis, 11 Juli 2019	Maluku, Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau
4	Jum'at, 12 Juli 2019	Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, dan Bengkulu

Tabel 23
Jadwal Sidang Pendahuluan
Panel III

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 9 Juli 2019	Jawa Barat dan Maluku Utara
2	Rabu, 10 Juli 2019	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
3	Kamis, 11 Juli 2019	Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur
4	Jum'at, 12 Juli 2019	Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan

Dalam persidangan pendahuluan terjadi beberapa koreksi atas Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipermasalahkan dalam perkara. Mekanisme perubahan dilakukan melalui renvoi maupun secara langsung ditarik dalam persidangan. Sehingga, pasca persidangan pendahuluan jumlah dapil dalam Perkara Legislatif berkurang 7 Dapil, yaitu yang semula berjumlah 560 Dapil menjadi 553 Dapil.

B. Pemeriksaan Persidangan

Pada tahap Pemeriksaan Persidangan merupakan tahap persidangan dalam rangka mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti. Secara umum jadwal pemeriksaan persidangan pada setiap panel adalah pada tanggal 15 – 18 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24
Jadwal Pemeriksaan Persidangan
Panel I

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Senin, 15 Juli 2019	Jawa Timur dan Aceh
2	Selasa, 16 Juli 2019	Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat
3	Rabu, 17 Juli 2019	Sumatera Utara dan Papua Barat
4	Kamis, 18 Juli 2019	Jambi, Bangka Belitung, dan Riau

Tabel 25
Jadwal Pemeriksaan Persidangan
Panel II

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Senin, 15 Juli 2019	Papua dan Jawa Tengah
2	Selasa, 16 Juli 2019	Banten, Lampung, dan Maluku
3	Rabu, 17 Juli 2019	Gorontalo, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Bali
4	Kamis, 18 Juli 2019	Sumatera Selatan dan Bengkulu

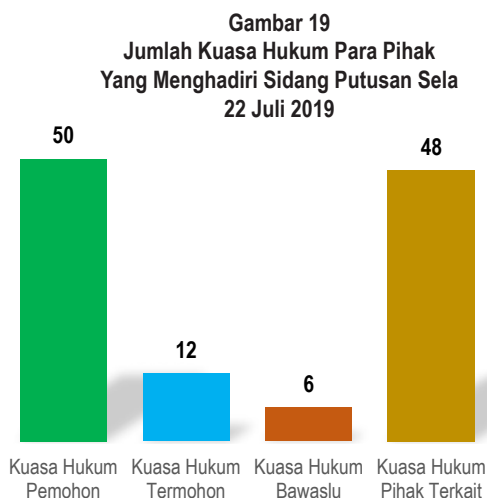
Tabel 26
Jadwal Pemeriksaan Persidangan
Panel III

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Senin, 15 Juli 2019	Jawa Barat dan Maluku Utara
2	Selasa, 16 Juli 2019	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
3	Rabu, 17 Juli 2019	Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara
4	Kamis, 18 Juli 2019	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat

C. Putusan Sela

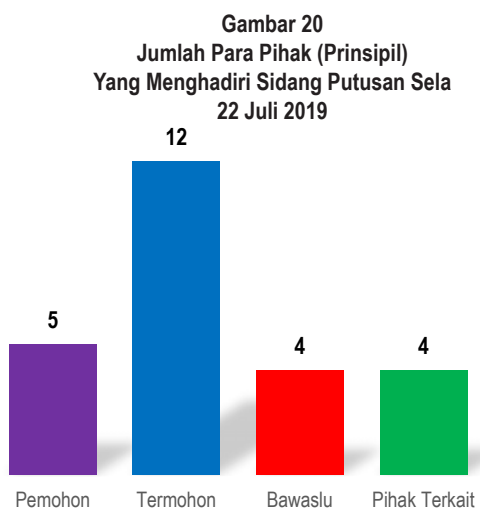
C.1 Putusan Sela dan Pengumuman

Sidang pleno pengucapan putusan sebelum putusan akhir (sela) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 13.11 – 13.59 WIB. Sidang di hadiri oleh para pihak yang berjumlah 141 orang dengan rincian sebagai berikut:



Secara keseluruhan yang mewakili para pihak yaitu Kuasa Hukum yang hadir berjumlah 116 orang. Kuasa Hukum Pemohon yang hadir sebanyak 50 orang, Kuasa Hukum Termohon 12 orang, Kuasa Hukum Bawaslu sebanyak 6 orang, dan Kuasa Hukum Pihak Terkait sebanyak 48 orang.

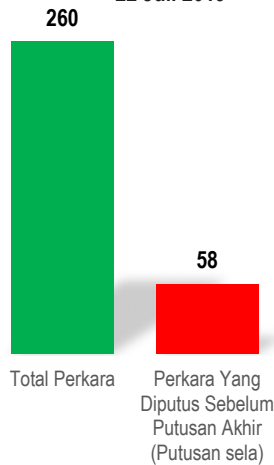
Sedangkan untuk Para Pihak (Prinsipil) yang secara langsung hadir dalam sidang berjumlah 25 Orang, dengan rincian sebagai berikut:



Jumlah Pemohon sebanyak 5 orang, Termohon sebanyak 12 orang, untuk Bawaslu dan Pihak Terkait yang hadir dalam sidang masing-masing yaitu sebanyak 4 orang.

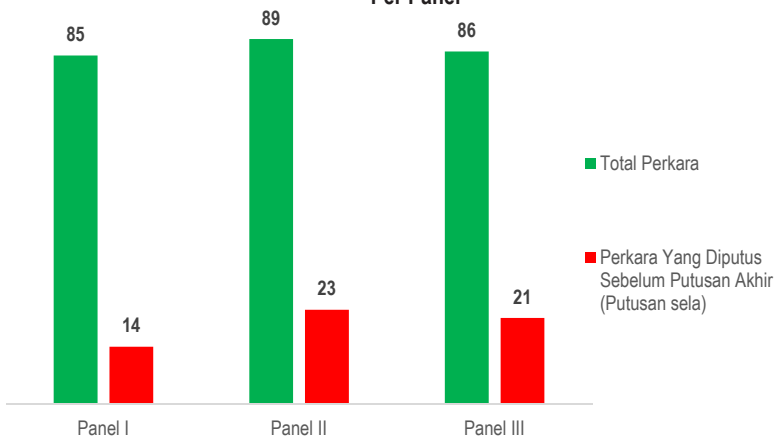
Dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dengan agenda pembacaan Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela), diikuti juga dengan pembacaan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian. Dari 260 Perkara yang di tangani Mahkamah Konstitusi, jumlah Perkara Yang Sebagian Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian melalui Putusan Sela berjumlah 58 Perkara.

Gambar 21
Jumlah Perkara Yang Diputus
Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela)
22 Juli 2019



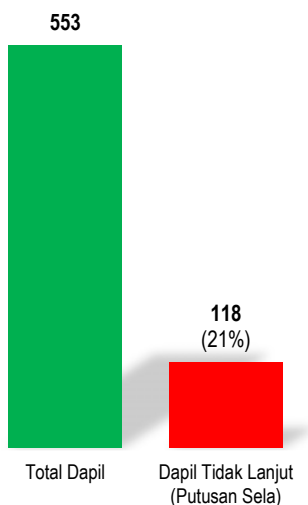
Jika dilihat per panel, jumlah terbanyak Putusan Sela pada Panel II sebanyak 23 Perkara, diikuti Panel III 21 Perkara dan Panel I sebanyak 14 Perkara.

Gambar 22
Jumlah Perkara Yang Diputus
Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela)
22 Juli 2019
Per Panel



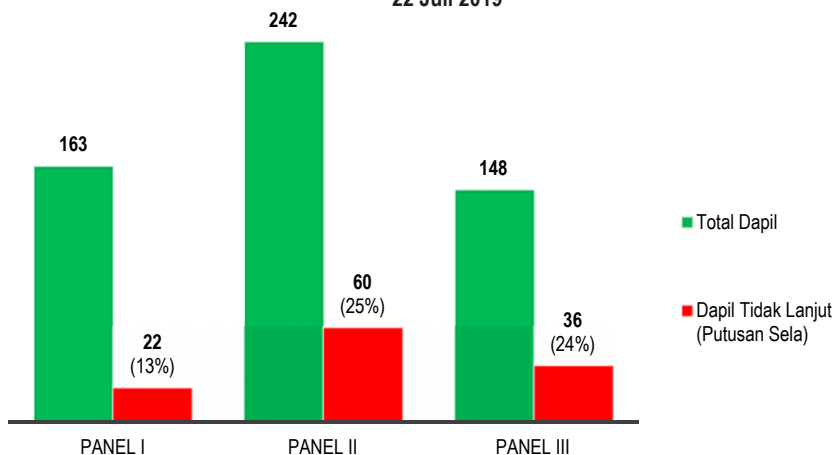
Dari 58 Perkara yang diputus dalam Putusan Sela, jika dilihat dapil yang dipermasalahkan, jumlah dapil yang tidak dilanjutkan dalam sidang pembuktian adalah sejumlah 118 Dapil atau 21% dari total dapil.

Gambar 23
Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus
Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019
Per Panel



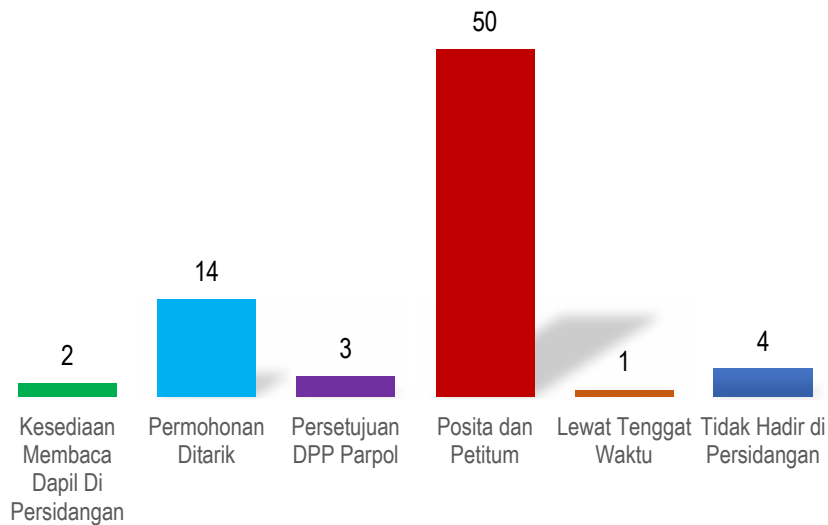
Apabila dilihat per Panel, jumlah terbanyak Dapil yang diputus tidak dilanjutkan dalam Putusan Sela yaitu Panel II sebanyak 60 Dapil atau sejumlah 25% dari Dapil yang ditangani. Selanjutnya adalah Panel III sebanyak 36 Dapil atau 24%, dan untuk Panel I sebanyak 22 Dapil atau 15% dari Dapil yang ditangani.

Gambar 24
Jumlah Dapil Perkara Yang Diputus
Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela)
22 Juli 2019



Jika diperhatikan dalam Putusan 22 Juli 2019, dengan mengkategorikan pertimbangan Mahkamah atas Dapil yang tidak dilanjutkan dalam sidang pembuktian, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 25
Jumlah Kategori Pertimbangan Mahkamah
Pada Perkara Yang Diputus
Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) 22 Juli 2019

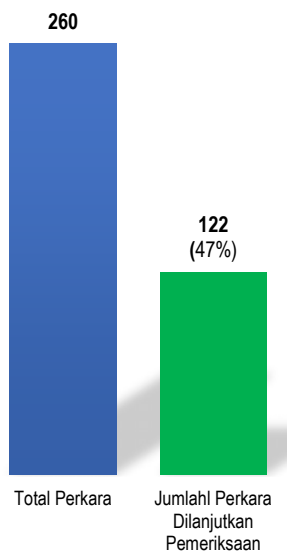


Pertimbangan Mahkamah pada Putusan Sela paling banyak adalah karena ketidakjelasan posita dan/atau petitum, atau tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon termasuk objek permohonan yaitu terdapat pada 50 perkara. Pertimbangan lainnya yaitu karena Permohonan Ditarik oleh Pemohon atau kuasanya sebanyak 14 Perkara/Permohonan, pemohon/kuasa tidak hadir di persidangan sebanyak 4 Perkara/Permohonan, tidak adanya persetujuan DPP Parpol sebanyak 3 Perkara.

Disamping itu terdapat kuasa hukum pemohon yang tidak bersedia membacakan Dapil yang dipermasalahkan dalam permohonan pada 2 Perkara/Permohonan, serta permohonan yang lewat waktu pengajuan permohonan sebanyak 1 perkara/permohonan.

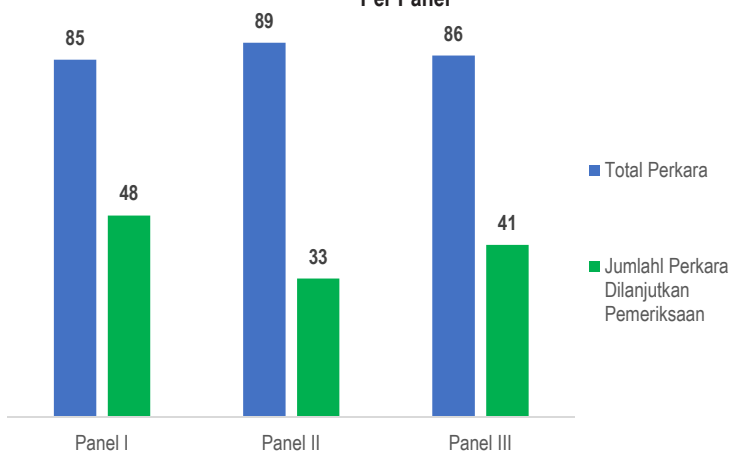
Selain Putusan Sela, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, Mahkamah juga membacakan Pengumuman atas Perkara-Perkara yang dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, yang didalamnya termasuk Perkara atau Sebagian Perkara dari Putusan Sela sebelumnya yaitu Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 122 Perkara.

Gambar 26
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan
Pengumuman 22 Juli 2019



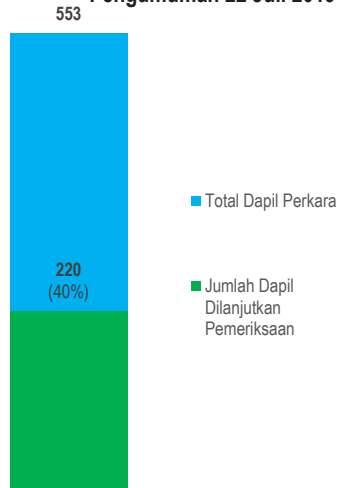
Jika dilihat per panel, jumlah Perkara yang dilanjutkan paling banyak yaitu pada Panel I sejumlah 48 Perkara, kemudian Panel III sejumlah 41 Perkara, selanjutnya untuk Panel II sejumlah 33 Perkara.

Gambar 27
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan
Pengumuman 22 Juli 2019
Per Panel



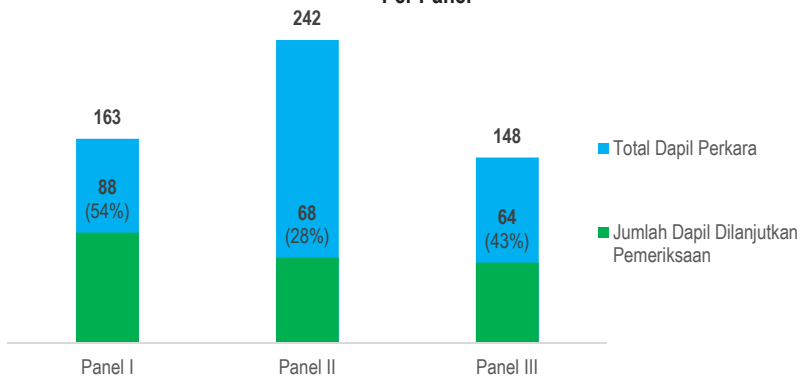
Dilihat dari jumlah dapil yang ditangani, dari total 553 Dapil yang dipermasalahkan, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 220 Dapil atau 40%.

Gambar 28
Jumlah Dapil Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pemeriksaan
Pengumuman 22 Juli 2019



Apabila dirinci per panel, dari Perkara Yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, jumlah Dapil terbanyak yaitu Panel I sejumlah 88 Dapil atau 54% dari keseluruhan Dapil yang ditangani Panel I. Sedangkan untuk Panel II sebanyak 68 Dapil atau 28% dari dapil yang ditangani, dan Panel III sejumlah 64 Dapil atau 43% dari total dapil yang ditangani Panel III.

Gambar 29
Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pengumuman 22 Juli 2019
Per Panel

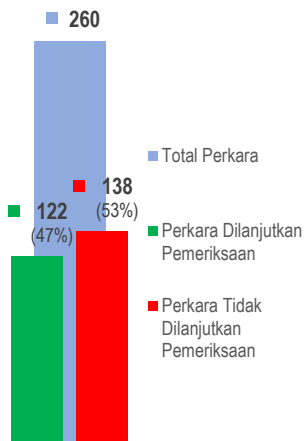


C.2 Perkembangan Perkara Pasca Putusan Sela dan Pengumuman

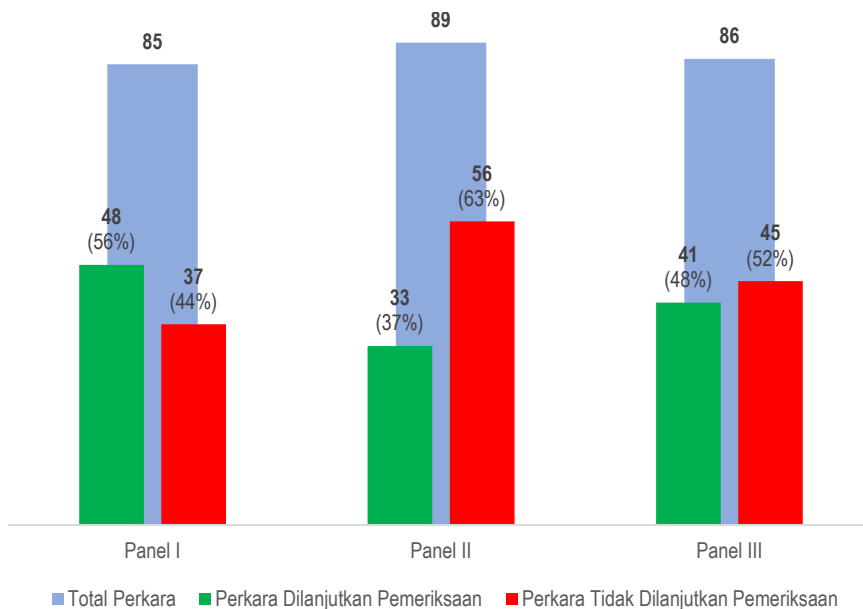
Dari total 260 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019

dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 122 Perkara (47%) dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 138 Perkara (53%).

Gambar 30
Perkembangan Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)



Gambar 31
Perkembangan Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Per Panel



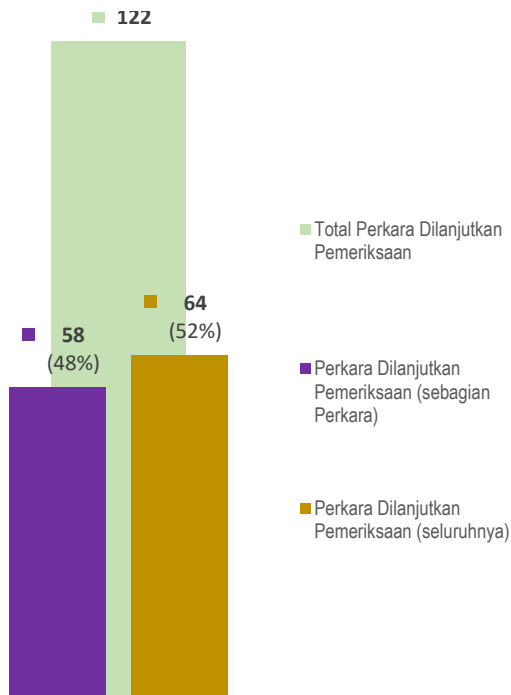
Jika dibandingkan Per Panel, jumlah perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian paling banyak yaitu pada Panel I yaitu sebanyak 48 Perkara, sedangkan paling sedikit yaitu Panel II yaitu 33 Perkara.

Tabel 27
Perkembangan Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Per Panel

Kategori	Panel I	Panel II	Panel III	Jumlah
Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan	48	33	41	122
Perkara Tidak Dilanjutkan Pemeriksaan	37	56	45	138
Total Perkara	85	89	86	260

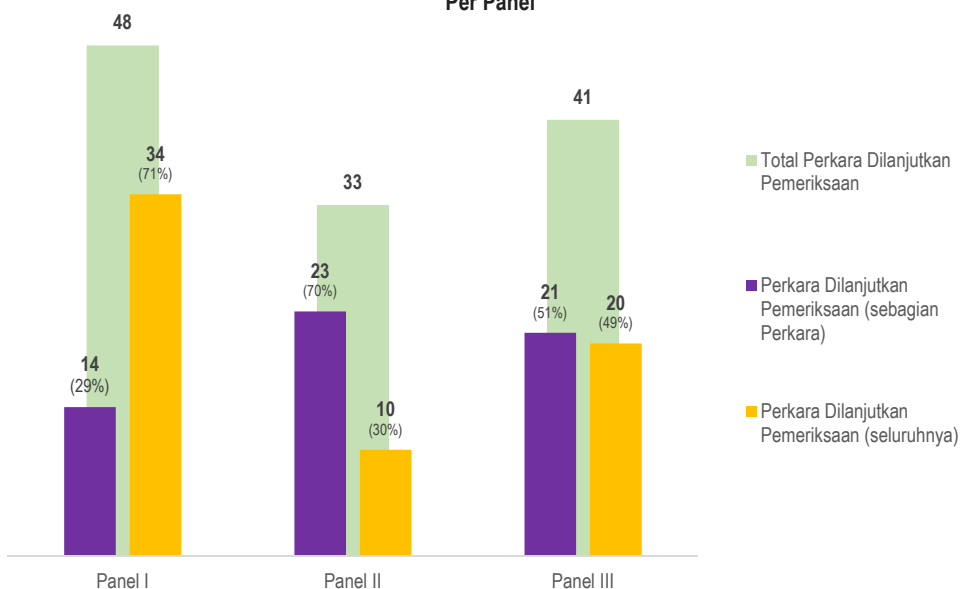
Dari 122 Perkara yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian (Pemeriksaan), yang merupakan Perkara Yang Dilanjutkan Sebagian sejumlah 58 Perkara dan Perkara Yang Dilanjutkan Keseluruhan sejumlah 64 Perkara.

Gambar 32
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)



Jika dilihat dari masing-masing Panel untuk untuk perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian, jumlah perkara yang merupakan perkara tunggal (keseluruhan) terbanyak yaitu pada panel I sejumlah 34 Perkara, sedangkan untuk Panel III dan Panel II masing-masing sebanyak 20 dan 10 Perkara. Sedangkan untuk perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yang merupakan sebagian perkara, terbanyak pada Panel II yaitu 23 Perkara, sedangkan pada Panel III dan I masing-masing 21 dan 14 Perkara.

Gambar 33
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Per Panel

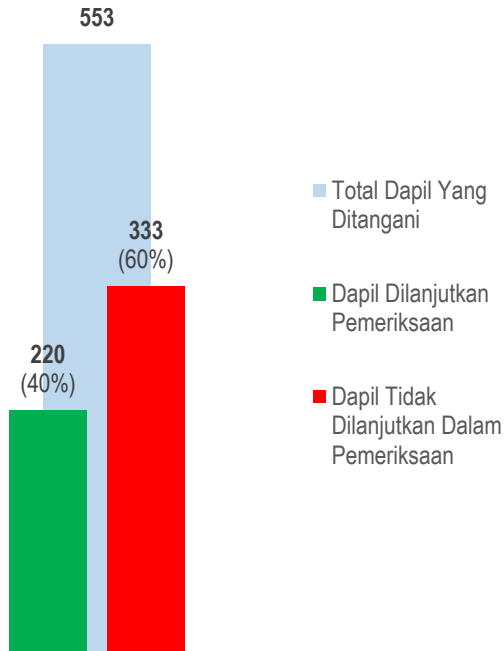


Tabel 28
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Per Panel

Kategori	Panel I	Panel II	Panel III
Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan (sebagian Perkara)	14	23	21
Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan (seluruhnya)	34	10	20
Total Perkara Dilanjutkan Pemeriksaan	48	33	41

Dilihat dari jumlah dapil yang ditangani, dari total 553 Dapil yang dipermasalahkan, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 220 Dapil atau 40%. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 333 Dapil atau 60%.

Gambar 34
Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)

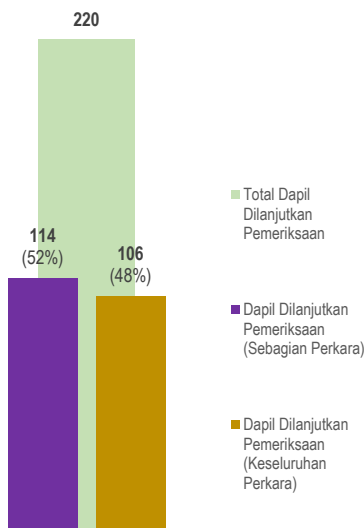


Tabel 29
Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)

Kategori	Panel I	Panel II	Panel III	Total
Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan	88	68	64	220
Dapil Tidak Dilanjutkan Dalam Pemeriksaan	75	174	84	333
Total Dapil	163	242	153	553

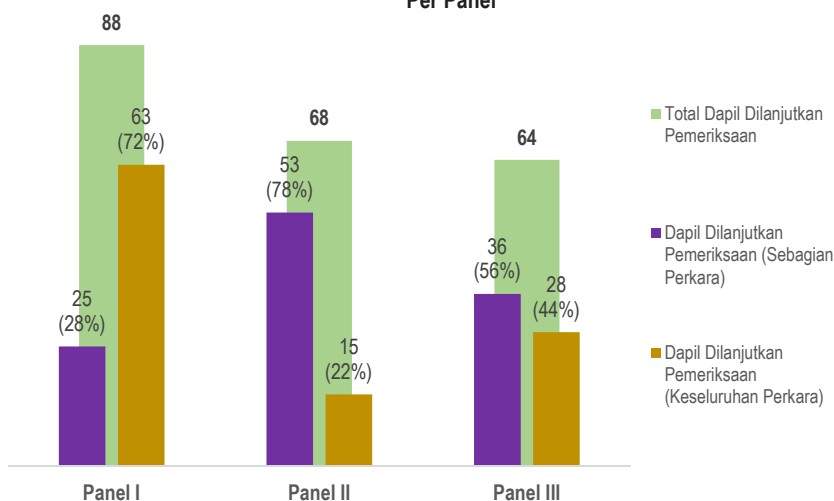
Pada Dapil Perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yaitu 220 Dapil, 114 Dapil atau 52% merupakan dapil dari sebagian perkara dan 106 Dapil atau 48% dari dapil perkara secara keseluruhan.

Gambar 35
Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)



Apabila dirinci per panel, dari Perkara Yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, dapil yang merupakan dapil dari sebagian perkara terbanyak yaitu pada Panel II sebanyak 53 Dapil, kemudian Panel III sebanyak 36 Dapil, dan selanjutnya adalah Panel I sebanyak 25 Dapil. Sedangkan Perkara Yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian untuk dapil perkara secara keseluruhan terbanyak pada Panel I sejumlah 63 Dapil dan pada Panel III dan Panel II masing-masing 28 Dapil dan 15 Dapil.

Gambar 36
Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Per Panel



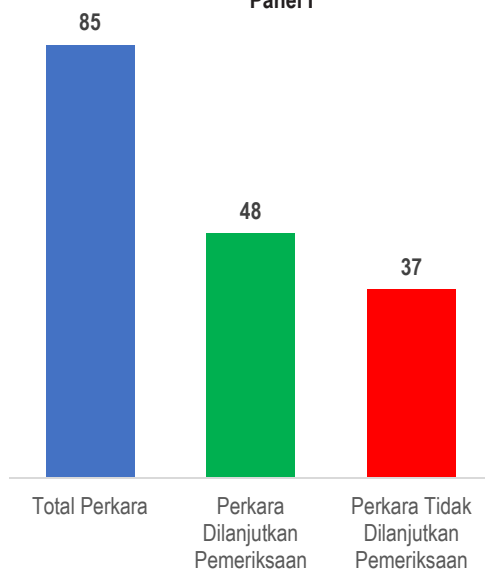
Tabel 30
Jumlah Dapil Dalam Perkara yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Per Panel

Kategori	Panel I	Panel II	Panel III	
Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan (Sebagian Perkara)	25	53	36	120
Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan (Keseluruhan Perkara)	63	15	28	100
Total Dapil Dilanjutkan Pemeriksaan	88	68	64	220

C.2.1. Panel I

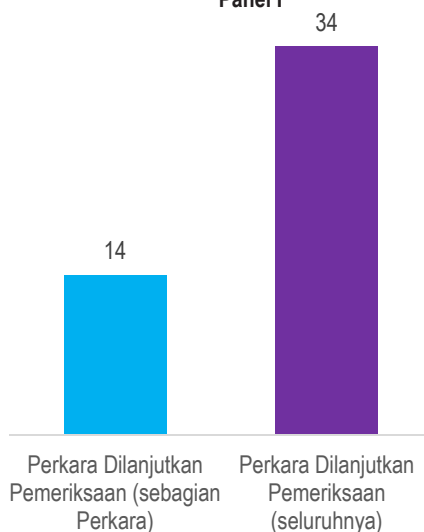
Dari total 85 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani oleh Panel I, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 48 Perkara dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 37 Perkara.

Gambar 37
Perkembangan Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel I



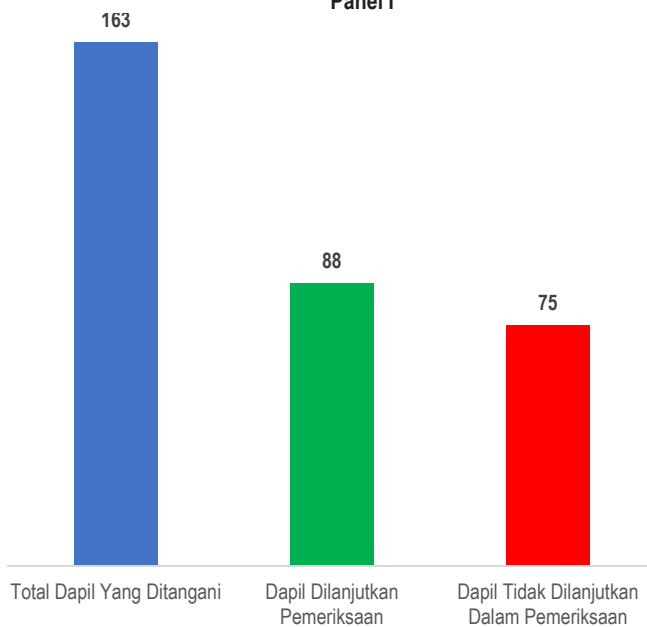
Untuk 48 Perkara yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian (Pemeriksaan), yang merupakan Perkara Yang Dilanjutkan Sebagian sejumlah 14 Perkara dan Perkara Yang Dilanjutkan Keseluruhan sejumlah 34 Perkara.

Gambar 38
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel I



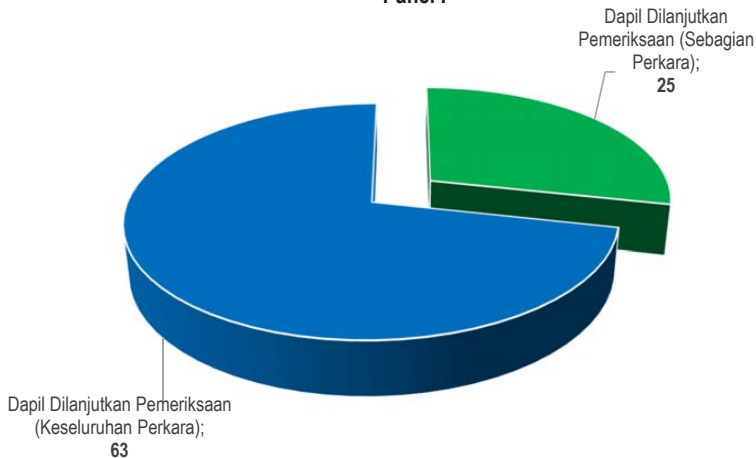
Dari 163 Dapil dalam Perkara yang ditangani oleh Panel I, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 88 Dapil. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 75 Dapil.

Gambar 39
Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel I



Pada Dapil Perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yaitu 88 Dapil, 25 Dapil merupakan dapil dari sebagian perkara dan 63 Dapil dari dapil perkara secara keseluruhan.

Gambar 40
Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel I



Secara rinci untuk 34 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan
Panel I

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1	162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Papua Barat
2	26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jambi
3	70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Riau
4	92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Aceh
5	97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jambi
6	39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani (Hanura)	Nusa Tenggara Timur (NTT)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
7	100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Nusa Tenggara Timur (NTT)
8	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Nusa Tenggara Timur (NTT)
9	02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sumatera Utara (Sumut)
10	131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sumatera Utara (Sumut)
11	72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jambi
12	87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sumatera Utara (Sumut)
13	197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sumatera Utara (Sumut)
14	07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Aceh
15	248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Daerah Aceh	Partai Daerah Aceh	Aceh
16	65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kepulauan Bangka Belitung
17	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jawa Timur (Jatim)
18	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	HERIL PAWILOY	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua Barat
19	119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Papua Barat
20	171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Papua Barat
21	38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani (Hanura)	Sulawesi Barat (Sulbar)
22	82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Barat (Sulbar)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
23	177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Barat (Sulbar)
24	187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sulawesi Barat (Sulbar)
25	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Nanggroe Aceh	Partai Nanggroe Aceh	Aceh
26	84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Papua Barat
27	174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
28	37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jawa Timur (Jatim)
29	139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Jawa Timur (Jatim)
30	189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Aceh
31	117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sumatera Utara (Sumut)
32	205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sumatera Utara (Sumut)
33	05-34/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	ABDULLAH MANARAY, ST.	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Papua Barat
34	04-02/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Sumatera Utara (Sumut)

Secara rinci untuk 14 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara
Panel I

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1	186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Timur (Jatim)
2	14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jawa Timur (Jatim)
3	143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Sumatera Utara (Sumut)
4	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sumatera Utara (Sumut)
5	46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Aceh	Partai Aceh	Aceh
6	66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Aceh
7	23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sumatera Utara (Sumut)
8	63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Papua Barat
9	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Riau
10	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Aceh
11	195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
12	157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jawa Timur (Jatim)
13	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	DRS. AGOENG PRASODJO	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Timur (Jatim)
14	173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sumatera Utara (Sumut)

Secara rinci untuk 37 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Kesuruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan
Panel I

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1	31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	ZAFILUDDIN	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Papua Barat
2	234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Jambi
3	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Nusa Tenggara Timur (NTT)
4	245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Nusa Tenggara Timur (NTT)
5	33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani (Hanura)	Sumatera Utara (Sumut)
6	217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Nusa Tenggara Timur (NTT)
7	108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jawa Timur (Jatim)
8	43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani (Hanura)	Jambi
9	50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Jambi
10	246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Sumatera Utara (Sumut)
11	91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Kepulauan Bangka Belitung
12	148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kepulauan Bangka Belitung
13	231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kepulauan Bangka Belitung
14	227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Papua Barat
15	164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Barat (Sulbar)
16	237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Barat (Sulbar)

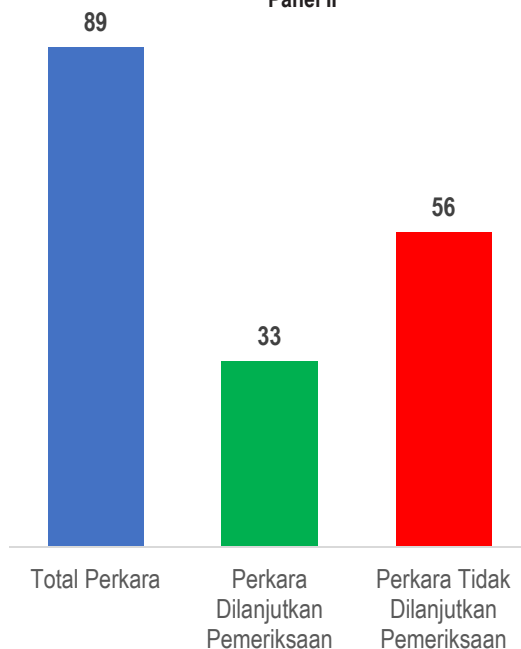
No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
17	241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Sulawesi Barat (Sulbar)
18	95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Papua Barat
19	89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	SAID MUSTAJAB, S.Sos.	Partai Sira (Aceh)	Aceh
20	103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Aceh
21	219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Aceh
22	249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	PT
23	29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019	AHMAD IMAN	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
24	53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
25	150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
26	214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)
27	22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Jawa Timur (Jatim)
28	124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Timur (Jatim)
29	208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Jawa Timur (Jatim)
30	52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sumatera Utara (Sumut)
31	216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Utara (Kaltara)
32	17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Riau
33	34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Riau

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
34	152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Riau
35	212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Riau
36	240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Riau
37	09-02/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Prof. Dr. Ir. Hj DAR-MAYANTI LUBIS	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Sumatera Utara (Sumut)

C.2.2. Panel II

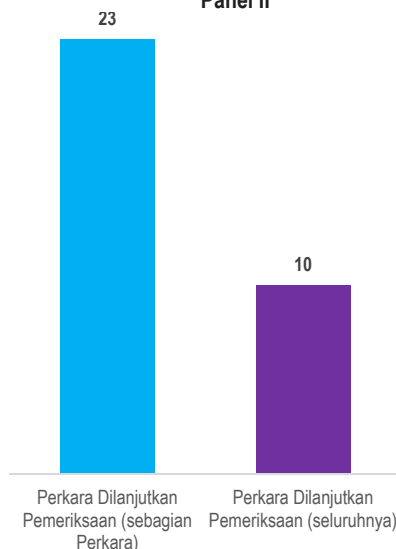
Dari total 89 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani oleh Panel II, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 33 Perkara dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 56 Perkara.

Gambar 41
Perkembangan Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel II



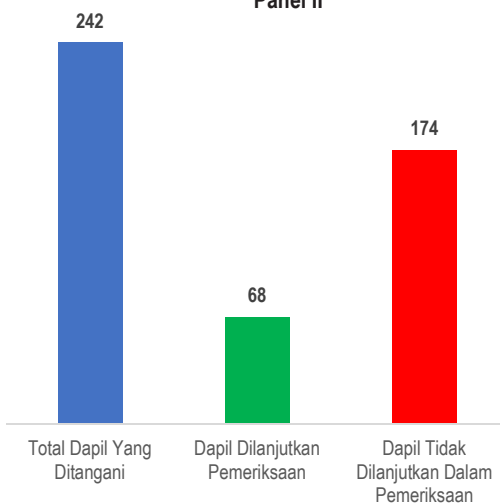
Untuk 33 Perkara yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian (Pemeriksaan), yang merupakan Perkara Yang Dilanjutkan Sebagian sejumlah 23 Perkara dan Perkara Yang Dilanjutkan Keseluruhan sejumlah 10 Perkara.

Gambar 42
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel II



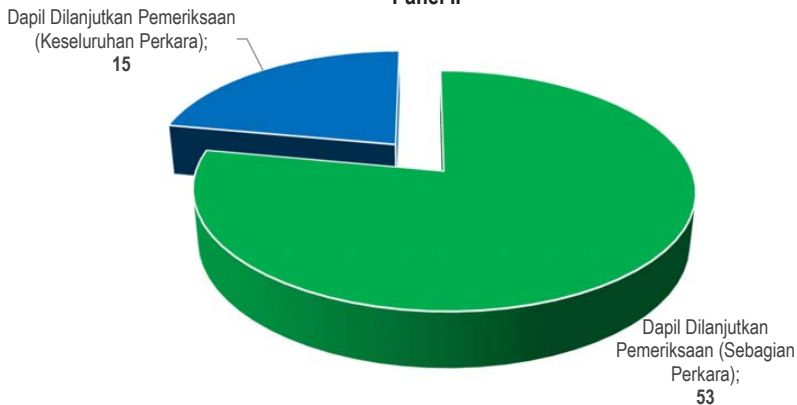
Dari 242 Dapil dalam Perkara yang ditangani oleh Panel II, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 68 Dapil. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 174 Dapil.

Gambar 43
Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel II



Pada Dapil Perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yaitu 68 Dapil, 53 Dapil merupakan dapil dari sebagian perkara dan 15 Dapil dari dapil perkara secara keseluruhan.

Gambar 44
Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel II



Secara rinci untuk 10 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan
Panel II

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1.	06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Lampung
2.	190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Maluku
3.	106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sumatera Selatan (Sumsel)
4.	96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Papua
5.	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jawa Tengah (Jateng)
6.	03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Gorontalo

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
7.	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kepulauan Riau
8.	05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Maluku
9.	08-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	HASBI SUAIB, S.T., M.H	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Papua
10.	10-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Papua

Secara rinci untuk 23 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara
Panel II

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1.	20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua
2.	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani (Hanura)	Papua
3.	203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Papua
4.	88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Sumatera Selatan (Sumsel)
5.	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sumatera Selatan (Sumsel)
6.	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Kepulauan Riau
7.	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Kepulauan Riau
8.	149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Lampung
9.	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sumatera Selatan (Sumsel)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
10.	175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Maluku
11.	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Papua
12.	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Papua
13.	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Papua
14.	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	ABDUL GANING, S.E.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Papua
15.	137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Papua
16.	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Banten
17.	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Tengah (Jateng)
18.	11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Papua
19.	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Papua
20.	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Papua
21.	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Agus Wariono	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jawa Tengah (Jateng)
22.	144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Papua
23.	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Papua

Secara rinci untuk 56 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan
Panel II

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1.	170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	ABAS KATINUR	Partai Golongan Karya (Golkar)	Papua
2.	243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Papua
3.	250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Purwn. Paus Kogoya, S.I.P.,	Bukan Partai	Papua
4.	236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Lampung
5.	49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sumatera Selatan (Sumsel)
6.	93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sumatera Selatan (Sumsel)
7.	126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sumatera Selatan (Sumsel)
8.	132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sumatera Selatan (Sumsel)
9.	153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Bali
10.	178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sumatera Selatan (Sumsel)
11.	230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bali Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Bali
12.	30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd. Si.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
13.	135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	ANDI RUSLAN dan ANDI KUSUMA	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Kepulauan Riau
14.	225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
15.	105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kepulauan Riau

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
16.	223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kepulauan Riau
17.	239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Kepulauan Riau
18.	48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Lampung
19.	54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Banten
20.	74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Banten
21.	128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Banten
22.	25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Maluku
23.	40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Maluku
24.	109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Maluku
25.	235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Maluku
26.	247-06-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Maluku
27.	28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	JUKAN	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Bengkulu
28.	107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bengkulu
29.	181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Bengkulu
30.	228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Bengkulu
31.	24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	H. NASRUN ASWARI	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sumatera Selatan (Sumsel)
32.	36-13-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sumatera Selatan (Sumsel)

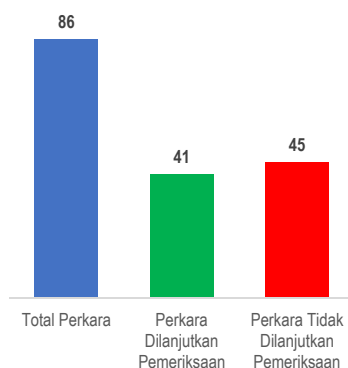
No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
33.	209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sumatera Selatan (Sumsel)
34.	27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Banten
35.	35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Banten
36.	169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Banten
37.	206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Banten
38.	45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	H. AGUS SETYOBUDI, S.E., M.M.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jawa Tengah (Jateng)
30.	85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Maluku
40.	112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jawa Tengah (Jateng)
41.	210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Jawa Tengah (Jateng)
42.	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	TETY INDARTI, S.H.	Partai Demokrat	Jawa Tengah (Jateng)
43.	115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Tengah (Jateng)
44.	138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	JOKO MUSTIKO	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Jawa Tengah (Jateng)
45.	78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Gorontalo
46.	220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Gorontalo
47.	57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kalimantan Tengah (Kalteng)
48.	129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	H. ADIE SETH JINU	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kalimantan Tengah (Kalteng)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
49.	172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Kalimantan Tengah (Kalteng)
50.	222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Tengah (Kalteng)
51.	59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Maluku
52.	99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Maluku
53.	127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Maluku
54.	136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Maluku
55.	155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Maluku
56.	07-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	CAREL SIMON PETRUS SUEBU	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Papua

C.2.3. Panel III

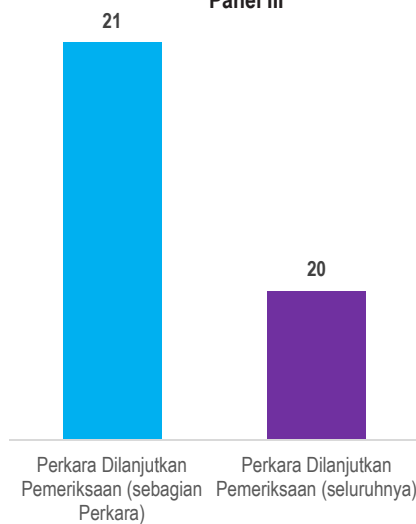
Dari total 86 Perkara PHPU Legislatif yang ditangani oleh Panel III, pasca Putusan Sebelum Putusan Akhir (Putusan Sela) yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum dan Pengumuman atas Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 dan, jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 41 Perkara dan Perkara yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sebanyak 45 Perkara.

Gambar 45
Perkembangan Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel III



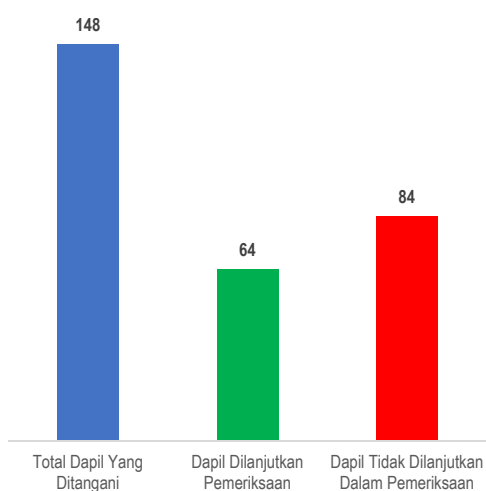
Untuk 41 Perkara yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian (Pemeriksaan), yang merupakan Perkara Yang Dilanjutkan Sebagian sejumlah 21 Perkara dan Perkara Yang Dilanjutkan Keseluruhan sejumlah 20 Perkara.

Gambar 46
Jumlah Perkara Yang Dilanjutkan Pemeriksaan
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel III



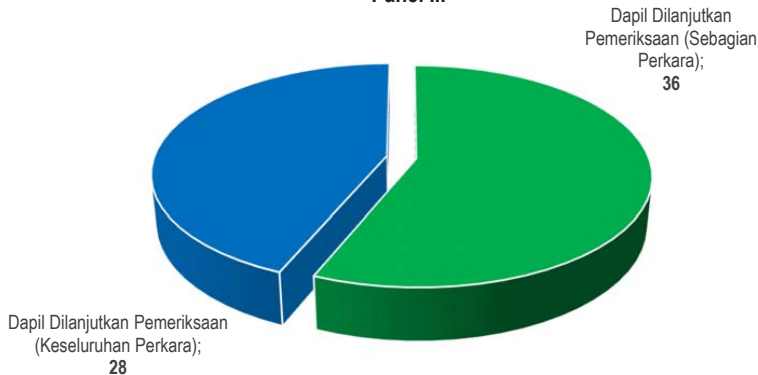
Dari 148 Dapil dalam Perkara yang ditangani oleh Panel III, jumlah Dapil yang Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 64 Dapil. Sedangkan untuk Dapil Yang Tidak Dilanjutkan Dalam Sidang Pembuktian sejumlah 84 Dapil.

Gambar 47
Perkembangan Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel III



Pada Dapil Perkara yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian yaitu 64 Dapil, 36 Dapil merupakan dapil dari sebagian perkara dan 28 Dapil dari dapil perkara secara keseluruhan.

Gambar 48
Jumlah Dapil Dalam Perkara
Pasca Putusan Sela dan Pengumuman (22 Juli 2019)
Panel III



Secara rinci untuk 20 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan
Panel III

NO	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1	81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Utara (Sulut)
2	01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kalimantan Barat (Kalbar)
3	41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	1. SUGIYANTO MARSAOLY 2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Maluku Utara (Malut)
4	90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Maluku Utara (Malut)
5	104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sumatera Barat (Sumbar)
6	09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sulawesi Tenggara (Sultra)

NO	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
7	80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
8	165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
9	198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
10	79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
11	10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jawa Barat (Jabar)
12	19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	1. SYARIF HIDAYAT-ULLAH 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sulawesi Tengah (Sulteng)
13	04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kalimantan Selatan (Kalsel)
14	191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Nusa Tenggara Barat (NTB)
15	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah (Sulteng)
16	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Jawa Barat (Jabar)
17	154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kalimantan Barat (Kalbar)
18	02-32/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2020	IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Maluku Utara (Malut)
19	03-18/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Nusa Tenggara Barat (NTB)
20	06-29/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	FATMAYANI HARLI TOMBILI	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Sulawesi Tenggara (Sultra)

Secara rinci untuk 21 Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Perkara yang Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Sebagian Perkara
Panel III

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jawa Barat (Jabar)
2	121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sulawesi Utara (Sulut)
3	18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Maluku Utara (Malut)
4	125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sumatera Barat (Sumbar)
5	142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Maluku Utara (Malut)
6	201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Maluku Utara (Malut)
7	110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
8	151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
9	168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Barat (Jabar)
10	13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
11	180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	KANNA, S.H., M.H.	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
12	44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
13	182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	1. M. YUNAN KADIR 2. Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Kalimantan Timur (Kaltim)

14	94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Nusa Tenggara Barat (NTB)
15	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Barat (Jabar)
16	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jawa Barat (Jabar)
17	156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jawa Barat (Jabar)
18	58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kalimantan Barat (Kalbar)
19	47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Jawa Barat (Jabar)
20	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Barat (Jabar)
21	229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Selatan (Sulsel)

Secara rinci untuk 45 Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Perkara yang Tidak Dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian Secara Keseluruhan
Panel III

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
1	163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Utara (Sulut)
2	184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	JERRY SAMBUAGA	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Utara (Sulut)
3	213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Tengah (Sulteng)
4	15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kalimantan Barat (Kalbar)
5	51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sumatera Barat (Sumbar)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
6	73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sumatera Barat (Sumbar)
7	60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Maluku Utara (Malut)
8	67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sulawesi Utara (Sulut)
9	196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sumatera Barat (Sumbar)
10	232-07-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sumatera Barat (Sumbar)
11	08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
12	62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sulawesi Selatan (Sulsel)
13	166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	1. Ir. ARIFIN DAENG MAROLA 2. Muhammad Yasir, S.H., M.H. 3. Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
14	114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	IRPAN	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
15	130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	HJ. RATNA, S. PD, M.PD	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
16	141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
17	215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Tenggara (Sultra)
18	133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sulawesi Utara (Sulut)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
19	204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Sulawesi Utara (Sulut)
20	238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Utara (Sulut)
21	244-06-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Sulawesi Utara (Sulut)
22	61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kalimantan Selatan (Kalsel)
23	224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Selatan (Kalsel)
24	64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kalimantan Timur (Kaltim)
25	118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kalimantan Timur (Kaltim)
26	140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Kalimantan Timur (Kaltim)
27	218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Timur (Kaltim)
28	56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Nusa Tenggara Barat (NTB)
29	77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Nusa Tenggara Barat (NTB)
30	113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	SOPYAN HAKIM, S.Kep.Ners.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Nusa Tenggara Barat (NTB)
31	160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Nusa Tenggara Barat (NTB)
32	179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Nusa Tenggara Barat (NTB)

No	No Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Partai	Provinsi
33	226-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Nusa Tenggara Barat (NTB)
34	32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sulawesi Tengah (Sulteng)
35	98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sulawesi Tengah (Sulteng)
36	211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Maluku Utara (Malut)
37	242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Maluku Utara (Malut)
38	122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kalimantan Barat (Kalbar)
39	134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Kalimantan Barat (Kalbar)
40	233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Barat (Kalbar)
41	69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jawa Barat (Jabar)
42	147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Tengah (Sulteng)
43	221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Jawa Barat (Jabar)
44	101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	SAINUDDIN, S. Sos	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sulawesi Selatan (Sulsel)
45	01-32/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Maluku Utara (Malut)

D. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)

Pada tahap Pemeriksaan Persidangan (lanjutan) ini merupakan tahap persidangan dalam rangka Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Secara umum jadwal pemeriksaan persidangan lanjutan pada setiap panel adalah pada tanggal 23 – 30 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan)
Panel I

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 23 Juli 2019	Jawa Timur
2	Rabu, 24 Juli 2019	Aceh
3	Kamis, 25 Juli 2019	Sumatera Utara
4	Jum'at, 26 Juli 2019	Papua Barat
5	Senin, 29 Juli 2019	Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Barat
6	Selasa, 30 Juli 2019	Jambi, Kep. Bangka Belitung, Riau

Tabel 41
Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan)
Panel II

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 23 Juli 2019	Sumatera Selatan, Banten, Gorontalo
2	Rabu, 24 Juli 2019	Lampung, Kepulauan Riau
3	Kamis, 25 Juli 2019	Jawa Tengah, Maluku, Kepulauan Riau
4	Jum'at, 26 Juli 2019	Papua
5	Senin, 29 Juli 2019	Papua
6	Selasa, 30 Juli 2019	Papua

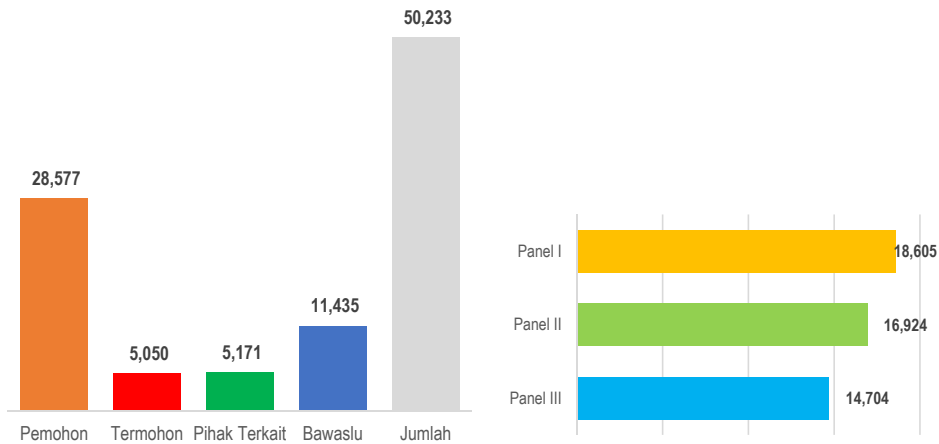
Tabel 42
Jadwal Pemeriksaan Persidangan (lanjutan)
Panel III

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 23 Juli 2019	Jawa Barat
2	Rabu, 24 Juli 2019	Maluku Utara, Sulawesi Utara
3	Kamis, 25 Juli 2019	Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat
4	Jum'at, 26 Juli 2019	-
5	Senin, 29 Juli 2019	Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara
6	Selasa, 30 Juli 2019	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah

E. Alat Bukti

Total keseluruhan alat bukti yang diterima dan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 50.233 Alat Bukti, dengan jumlah terbanyak yaitu alat bukti dari Pemohon yaitu sejumlah 28.577 Alat Bukti. Selanjutnya jumlah kedua terbanyak yaitu alat bukti yang disampaikan oleh Bawaslu yaitu sebanyak 11.435 Alat Bukti, sedangkan untuk bukti dari Pihak Terkait sejumlah 5.171 Alat Bukti, dan Termohon sejumlah 5.050 Alat Bukti.

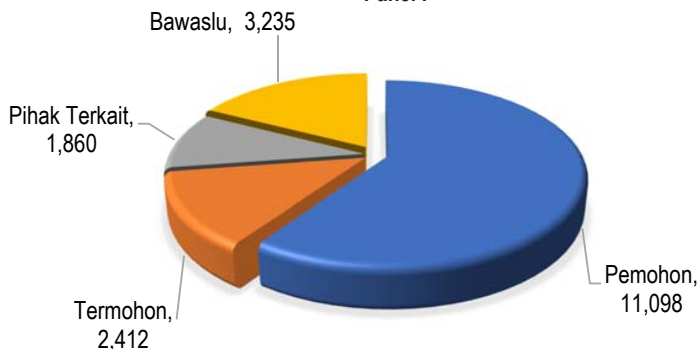
Gambar 49
Jumlah Alat Bukti
PHPU Legislatif Tahun 2019



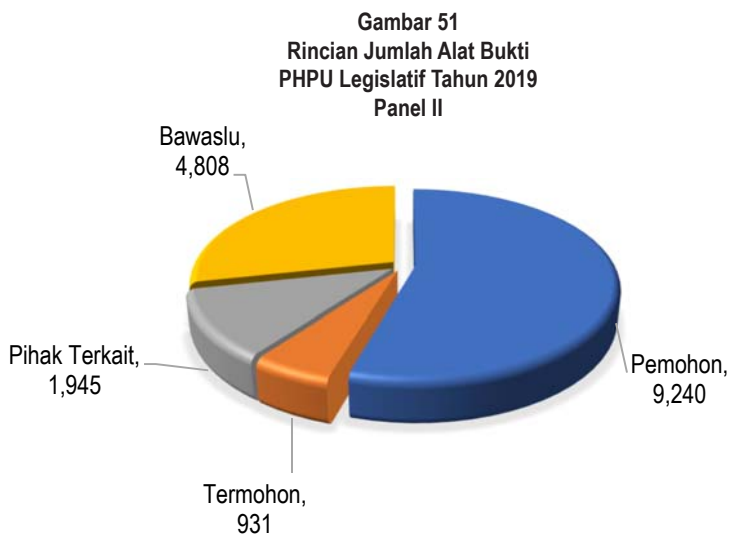
Jika dilihat per Panel, Panel I mengelola bukti paling banyak, yaitu 18.605 Alat Bukti, sedangkan Panel II dan III masing-masing sejumlah 16.924 Alat Bukti dan 14.704 Alat Bukti.

Secara rinci, untuk Panel I jumlah bukti Pemohon sejumlah 11.098 Alat Bukti, sedangkan untuk Termohon sejumlah 2.412 Alat Bukti, Pihak Terkait sejumlah 1.860 Alat Bukti, dan Bawaslu sejumlah 3.235 Alat Bukti.

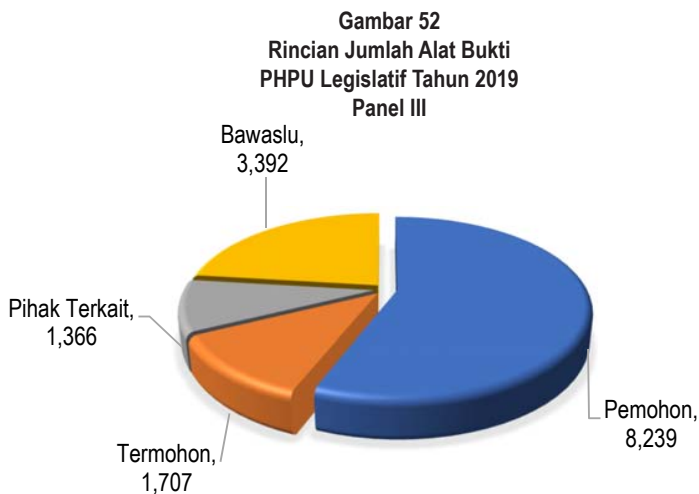
Gambar 50
Rincian Jumlah Alat Bukti
PHPU Legislatif Tahun 2019
Panel I



Pada Panel II dari 16.924 Alat Bukti yang dikelola, Pemohon berjumlah 9.240 Alat Bukti, sedangkan untuk Termohon 931 Alat Bukti, Pihak Terkait 1.945 Alat Bukti dan Bawaslu berjumlah 4.808 Alat Bukti.



Selanjutnya untuk Panel III dari 14.704 Alat Bukti yang dikelola, Pemohon berjumlah 8.239 Alat Bukti, sedangkan untuk Termohon 1.707 Alat Bukti, Pihak Terkait 1.366 Alat Bukti dan Bawaslu berjumlah 3.392 Alat Bukti.



BAB V PUTUSAN AKHIR

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan

Tahapan paling akhir dalam penanganan perkara PPHU Legislatif Tahun 2019 adalah Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan, yaitu persidangan untuk membacakan putusan akhir dari setiap perkara yang dilakukan secara pleno oleh keseluruhan 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi. Secara umum jadwal sidang pembacaan putusan/ketetapan adalah pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut:

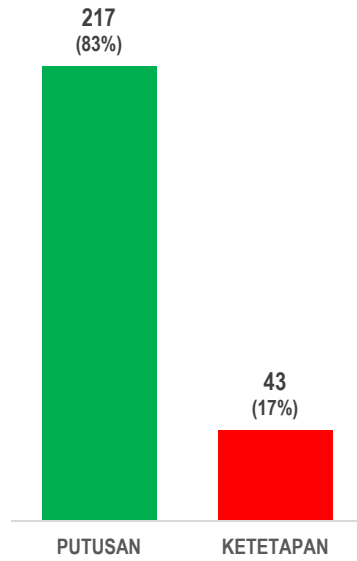
Tabel 43
Jadwal Sidang Pengucapan Putusan

NO	HARI/TANGGAL	PERKARA/PROVINSI
1	Selasa, 6 Agustus 2019	Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara
2	Rabu, 7 Agustus 2019	Jawa Tengah, Lampung, Gorontalo, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi
3	Kamis, 8 Agustus 2019	Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Aceh, PT (Parliamentary Threshold), Aceh, Banten, Maluku
4	Jum'at, 9 Agustus 2019	Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua

1. Putusan

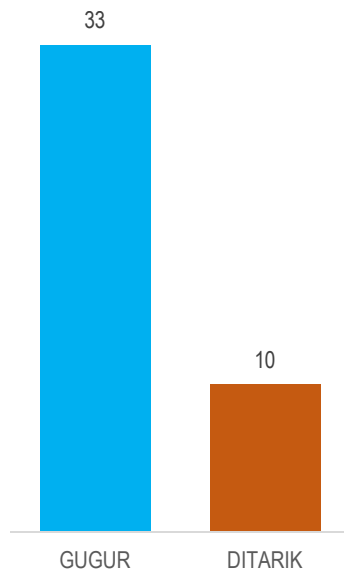
Pada sidang pembacaan putusan/ketetapan pada tanggal 6 – 9 Agustus 2019 terdapat 2 jenis putusan akhir yaitu Putusan dan Ketetapan dengan rincian Putusan sebanyak 217 Putusan atau 83% dan Ketetapan sebanyak 43 Putusan atau 17% dari keseluruhan perkara.

Gambar 53
Jumlah Jenis Putusan
Perkara PPHU Legislatif 2019



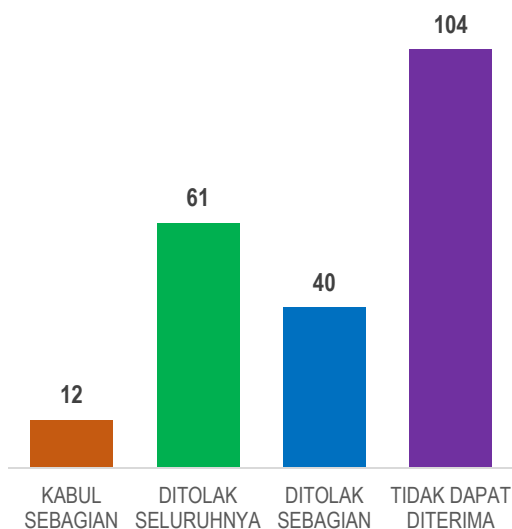
Untuk amar Ketetapan yaitu sebanyak 33 Putusan yang menyatakan Gugur dan 10 Putusan yang menyatakan Ditarik.

Gambar 54
Jumlah Jenis Amar Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019



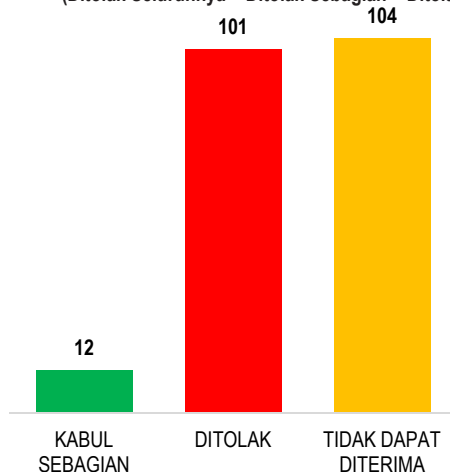
Sedangkan amar Putusan yaitu 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 61 putusan menyatakan ditolak seluruhnya, dan 40 putusan menyatakan ditolak sebagian (terdapat dabil yang tidak diterima, gugur, dan ditarik), serta 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Gambar 55
Jumlah Jenis Amar Putusan
Perkara PPHU Legislatif 2019



Jika kategori Putusan Ditolak Seluruhnya dan Putusan Ditolak Sebagian digabungkan menjadi satu kategori Putusan Ditolak maka, 12 Putusan menyatakan dikabulkan sebagian, 101 putusan menyatakan ditolak dan 104 putusan yang menyatakan tidak dapat diterima.

Gambar 56
Jumlah Jenis Amar Putusan
Perkara PPHU Legislatif 2019
(Ditolak Seluruhnya + Ditolak Sebagian = Ditolak)

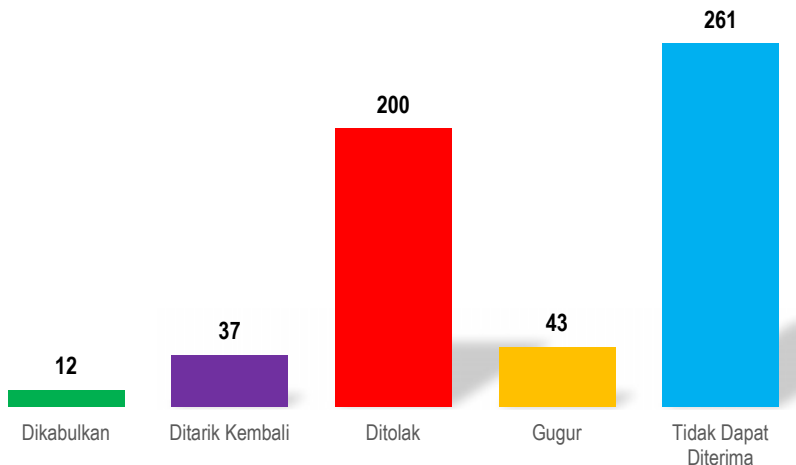


Tabel 44
Persentase Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019

NO	PUTUSAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Kabul Sebagian	12	5%
2	Ditolak	101	39%
3	Tidak Dapat Diterima	104	40%
4	Gugur/Ditarik (Ketetapan)	43	17%
Jumlah		260	100%

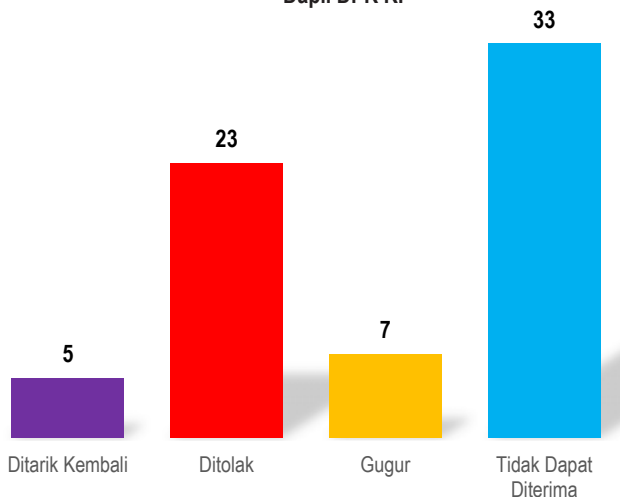
Apabila dilihat dari Dapil yang dipermasalahkan dalam setiap perkara, maka dari 553 Dapil, jumlah Dapil yang dikabulkan sebanyak 12 Dapil, Ditarik Kembali 37 Dapil, Ditolak 200 Dapil, Gugur 43 Dapil dan Tidak Dapat Diterima sebanyak 261 Dapil.

Gambar 57
Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019
Keseluruhan Dapil



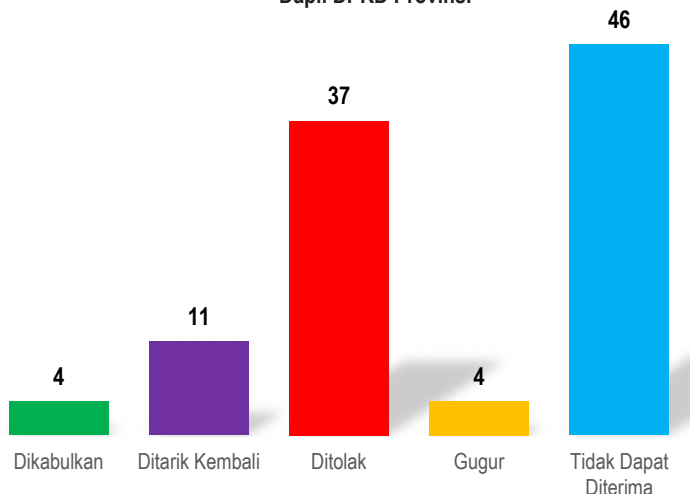
Apabila diperhatikan per jenis dapil, untuk Putusan per Dapil DPR RI sebanyak 5 Dapil dinyatakan ditarik kembali, 23 Ditolak, 7 Gugur, dan 33 Dapil dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Gambar 58
Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019
Dapil DPR RI



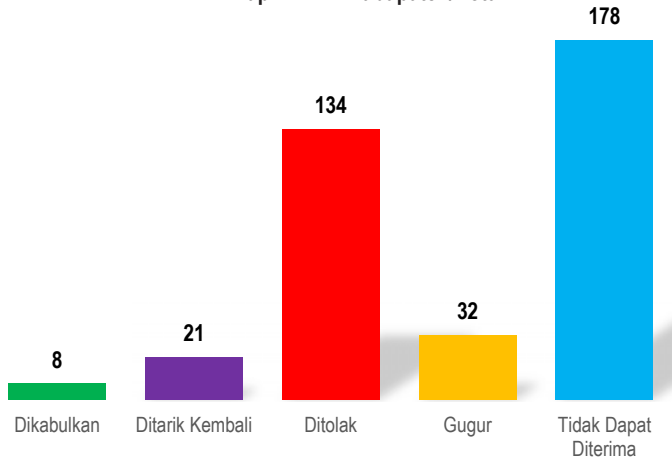
Pada Putusan per Dapil DPRD Provinsi sebanyak 4 Dapil dinyatakan dikabulkan, 11 Ditarik Kembali, 37 Dapil Ditolak, 4 Gugur, dan 46 Tidak Dapat Diterima.

Gambar 59
Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019
Dapil DPRD Provinsi



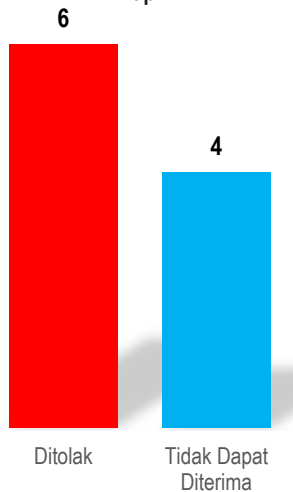
Putusan per Dapil DPRD Kabupaten Kota sebanyak 8 Dapil dinyatakan dikabulkan, 21 Ditarik Kembali, 134 Dapil Ditolak, 32 Gugur, dan 176 Tidak Dapat Diterima.

Gambar 60
Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019
Dapil DPRD Kabupaten/Kota



Pada Putusan per Dapil DPD RI dimana Dapil pada perkara DPD adalah wilayah provinsi sebanyak 6 dinyatakan ditolak dan 4 dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Gambar 61
Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019
Dapil DPD RI



Tabel 45
Rincian Jumlah Jenis Amar Putusan/Ketetapan
Perkara PPHU Legislatif 2019

NO	AMAR	DAPIL				JUMLAH
		DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kab/Kota	DPD	
1	Dikabulkan		4	8		12
2	Ditarik Kembali	5	11	21		37
3	Ditolak	23	37	134	6	200
4	Gugur	7	4	32		43
5	Tidak Dapat Diterima	33	46	178	4	261
Total		68	102	373	10	553

Rincian untuk Perkara yang dikabulkan sebagian adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Jenis Amar Putusan Yang Dikabulkan Sebagian
Perkara PPHU Legislatif 2019

a. Pemungutan Suara Ulang

NO	NOMOR PERKARA	PARTAI	PROVINSI	KASUS	AMAR
1	86-03-26/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang

b. Penghitungan Suara Ulang

NO	NOMOR PERKARA	PARTAI	PROVINSI	KASUS	AMAR
1	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang
2	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Jawa Timur (Jatim)	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang
3	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sumatera Utara (Sumut)	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang
4	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Timur (Jatim)	DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Suara Ulang

NO	NOMOR PERKARA	PARTAI	PROVINSI	KASUS	AMAR
				Dapil Kota Surabaya 4	
5	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	DPRA Dapil Aceh 6	Penghitungan Suara Ulang
6	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Barat (Jabar)	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2	Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi Ulang

c. Penetapan Perolehan Suara Yang Benar

NO	NOMOR PERKARA	PARTAI	PROVINSI	KASUS	AMAR
1	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
2	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kepulauan Riau	DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
3	154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kalimantan Barat (Kalbar)	DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
4	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
5	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Aceh	DPRK Kota Dapil Kota Banda Aceh 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar

**BAGIAN
KEDUA**

**PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak, dengan peserta Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota,
- b. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan
- c. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum Tahun 2019 diikuti dengan

- a. Terdapat 20 partai politik terdiri, yang terdiri dari 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh;
- b. Terdapat calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Terdapat 812 calon anggota DPD untuk 34 provinsi;
- d. Terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin;
2. H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 yaitu 2 Pasangan Calon. Pertama, pasangan calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, diusulkan oleh 7 Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan PKPI. Kedua, pasangan calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, yang diusulkan oleh 4 Partai Politik yaitu: Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat.

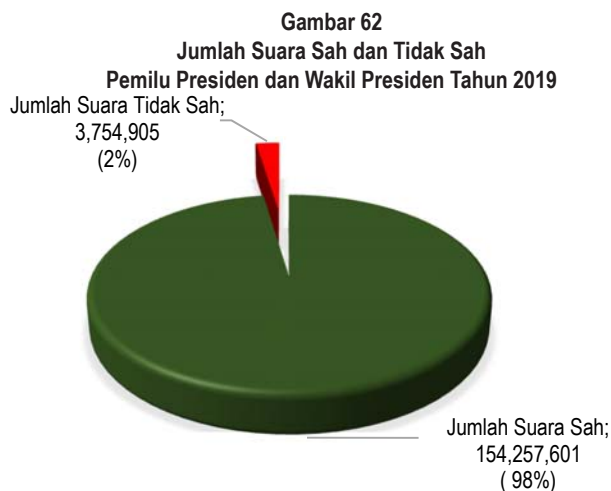
2. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan serentak dengan Pemilihan Anggota DPD RI, serta Pemilihan Presiden dan Calon Presiden yaitu pada tanggal 8 April 2019 – 17 April 2019. Tahapan tersebut sebelumnya dimulai dengan Kampanye oleh Calon Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel 47
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019

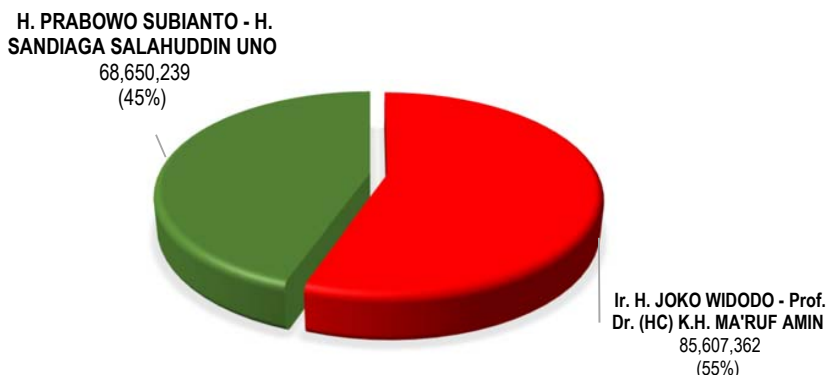
TANGGAL	KEGIATAN
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 21 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
21 Mei 2019 Pukul 01:46	Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

Dari hasil perhitungan KPU, terdapat 158.012.506 pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden dan Wapres 2019. Dari jumlah tersebut, perhitungan suara sah sejumlah 154.257.601 pemilih atau sebesar 98%, sedangkan suara tidak sah sejumlah 3.754.905 pemilih atau sebesar 2% dari keseluruhan pemilih.



Perolehan suara secara nasional, untuk 34 Provinsi dan 1 Wilayah Luar Negeri untuk Pasangan Calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar 85.607.362 suara atau sejumlah 55%, sedangkan Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sejumlah 68.650.239 atau sejumlah 45% suara.

Gambar 63
Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019



Untuk penyebaran perolehan suara secara nasional, Pasangan Calon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin memperoleh suara lebih dari 50% di 21 Provinsi dan 1 Wilayah Luar Negeri, sedangkan Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara lebih dari 50% di 13 Provinsi.

Tabel 48
Penyebaran Perolehan Suara Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

NO	RINCIAN	PASANGAN CALON		SELISIH	PERSENTASE SUARA	
		Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) K.H. MA'RUF AMIN	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO		Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) K.H. MA'RUF AMIN	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
1	ACEH	404.188	2.400.746	1.996.558	14,41	85,59
2	SUMATERA UTARA	3.936.515	3.587.786	348.729	52,32	47,68
3	SUMATERA BARAT	407.761	2.488.733	2.080.972	14,08	85,92
4	RIAU	1.248.713	1.975.287	726.574	38,73	61,27
5	JAMBI	859.833	1.203.025	343.192	41,68	58,32
6	SUMATERA SELATAN	1.942.987	2.877.781	934.794	40,30	59,70
7	BENGKULU	583.488	585.999	2.511	49,89	50,11
8	LAMPUNG	2.853.585	1.955.689	897.896	59,34	40,66
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	495.729	288.235	207.494	63,23	36,77
10	KEPULAUAN RIAU	550.692	465.511	85.181	54,19	45,81
11	DKI JAKARTA	3.279.547	3.066.137	213.410	51,68	48,32
12	JAWA BARAT	10.750.568	16.077.446	5.326.878	40,07	59,93
13	JAWA TENGAH	16.825.511	4.944.447	11.881.064	77,29	22,71

NO	RINCIAN	PASANGAN CALON		SELISIH	PERSENTASE SUARA	
		Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) K.H. MA'RUF AMIN	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO		Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) K.H. MA'RUF AMIN	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
14	DI YOGYAKARTA	1.655.174	742.481	912.693	69,03	30,97
15	JAWA TIMUR	16.231.668	8.441.247	7.790.421	65,79	34,21
16	BANTEN	2.537.524	4.059.514	1.521.990	38,46	61,54
17	BALI	2.351.057	213.415	2.137.642	91,68	8,32
18	NUSA TENGGARA BARAT	951.242	2.011.319	1.060.077	32,11	67,89
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.368.982	305.587	2.063.395	88,57	11,43
20	KALIMANTAN BARAT	1.709.896	1.263.757	446.139	57,50	42,50
21	KALIMANTAN TENGAH	830.948	537.138	293.810	60,74	39,26
22	KALIMANTAN SELATAN	823.939	1.470.163	646.224	35,92	64,08
23	KALIMANTAN TIMUR	1.094.845	870.443	224.402	55,71	44,29
24	SULAWESI UTARA	1.220.524	359.685	860.839	77,24	22,76
25	SULAWESI TENGAH	914.588	706.654	207.934	56,41	43,59
26	SULAWESI SELATAN	2.117.591	2.809.393	691.802	42,98	57,02
27	SULAWESI TENGGARA	555.664	842.117	286.453	39,75	60,25
28	GORONTALO	369.803	345.129	24.674	51,73	48,27
29	SULAWESI BARAT	475.312	263.620	211.692	64,32	35,68
30	MALUKU	599.457	392.940	206.517	60,40	39,60
31	MALUKU UTARA	310.548	344.823	34.275	47,39	52,61
32	PAPUA	3.021.713	311.352	2.710.361	90,66	9,34
33	PAPUA BARAT	508.997	128.732	380.265	79,81	20,19
34	KALIMANTAN UTARA	248.239	106.162	142.077	70,04	29,96
35	LUAR NEGERI	570.534	207.746	362.788	73,31	26,69

BAB II

PERMOHONAN DAN REGISTRASI PERKARA

1. Permohonan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di ajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno melalui Tim Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019. Permohonan diterima pada tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22.35 WIB dan Perbaikan Permohonan diterima pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 16.59 WIB.

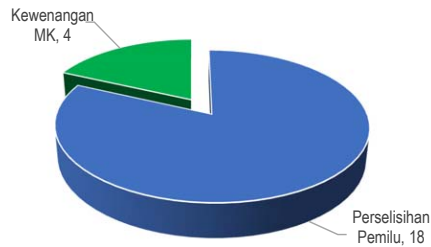
a. Dalil Permohonan Awal

Dari permohonan awal yang disampaikan pemohon, terdapat 4 (empat) dalil utama yang diajukan dengan 10 sub dalil yang disampaikan dalam permohonan, sehingga secara total terdapat 14 dalil, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi perlu mengadili kecurangan pemilu;
2. Penyelenggara Pemilu melakukan Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 - Ketidaknetralan Polisi;
 - Ketidaknetralan intelejen;
 - Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum;
 - Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;
 - Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/atau Program Pemerintah;
 - Penyalahgunaan Anggaran BUMN;
 - Pembatasan Kebebasan Media dan Pers.
3. Argumentasi Kecurangan Kuantitatif;
 - Daftar Pemilih Tetap tidak masuk Akal;
 - Kekacauan Situng KPU;
 - Dokumen C7 secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah;
4. Sanksi Diskualifikasi terkait kecurangan yang terjadi.

Secara detail, permohonan memuat 22 argumen, dengan jumlah argumen mengenai perselisihan pemilu sebanyak 18 argumen dan mengenai kewenangan MK sebanyak 4 argumen.

Gambar 64
Jumlah Argumen Permohonan Awal



Dari 22 argumen yang disampaikan dalam permohonan pemohon, terdapat 4 argumen yang apabila didefinisikan sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu memiliki argumen masing-masing atas 2 dan 3 bentuk perselisihan pemilu. Sehingga secara keseluruhan argumen dapat dimaknai sejumlah 18 argumen.

Berdasarkan uraian Dalil yang dicantumkan pada permohonan awal tersebut dalil dalil tersebut dikategorikan kedalam sengketa Proses, Sengketa Administrasi, Tindak Pidana Pemilu.

Pengertian dari sengketa proses dijelaskan dalam Pasal Sengketa proses Pemilu yakni meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. sengketa yang terjadi Peserta Pemilu dengan dikeluarkannya keputusan dan keputusan KPU. Dalam penyelesaian sengketa proses ini dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta melalui Pengadilan Tata Usaha negara. sengketa proses dimaksud yang diselesaikan melalui Peradilan TUN meliputi verifikasi Partai Politik, Penetapan Pasangan Calon anggota Legislatif, dan Penetapan Pasangan Calon (dasar hukum Pasal 469 ayat (1)).

Pasal 416 ayat (1) yang berbunyi: Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa pelanggaran dimaksud tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Bahwa macam dari tindak pidana pemilu yakni dijelaskan dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

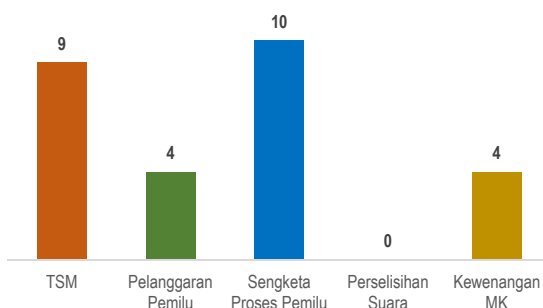
Sebelumnya dalam UU No 8 Tahun 2012 klasifikasi terkait tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan. Dari ketentuan UU No 8/2012 tersebut tindak pidana cenderung terdiri dari Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Biasa. Perkembangan dari pengaturan tindak pidana Pemilu tersebut lebih baru diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Pelanggaran Kode etik diatur dalam Pasal 456 UU No7/2017 yakni Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Jalur penyelesaian dari pelanggaran Kode Etik dimaksud melalui Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mengadili pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN. Sengketa yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 terdapat satu hal lagi yakni Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang di adili oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, terkait Perselisihan hasil cukup jelas dan tidak diuraikan lebih lanjut.

Jika diperhatikan secara detail, dari empat dalil permohonan tersebut dan beberapa sub dalil yang disampaikan di atas, apabila diklasifikasikan sesuai dengan jenis klasifikasi dalil berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat di jelaskan sebagai berikut:

Gambar 65
Jumlah Argumen Permohonan Awal
Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK



Dalam permohonan, terdapat 27 Argumen yang mendukung setiap dalil yang diajukan oleh pemohon. Argumen yang diajukan meliputi argumen mengenai dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebanyak 9 argumen; Pelanggaran Pemilu sebanyak 4 Argumen, dan Sengketa Proses Pemilu sebanyak 10 Argumen, namun justru pemohon tidak menyampaikan argumen terkait Perselisihan Hasil Suara Pemilu. Disamping itu, Pemohon juga menyampaikan argumen yang menyoal tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 Argumen.

b. Dalil Perbaikan Permohonan

Dari permohonan yang diajukan kedua oleh pemohon yang dianggap perbaikan permohonan oleh pemohon, terdapat 6 (enam) dalil utama yang diajukan dengan 27 Sub Dalil yang disampaikan, sehingga secara total dalil yang disampaikan adalah berjumlah 33 Dalil, yaitu:

1. Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden;
2. Cacat materiil;
 - sumbangan dana kampanye.
3. Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”;
 - Jaminan terhadap Prinsip Dasar pemilu yang jujur dan Adil;
 - Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif;
 - Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang bebas dan rahasia;
 - Pelanggaran TSM atas asas pemilu jujur dan adil;

- Penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah;
 - penyalahgunaan birokrasi dan BUMN;
 - ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen;
 - Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
 - diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakkan Hukum;
 - kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam pilpres 2019;
 - Manipulasi input data pilpres.
4. Tentang beban pembuktian, menjaga konstiusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.
- Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;
 - Kekacuan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;
 - Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;
 - Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia;
 - Ada indikasi *adjustment* Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang;
 - Terdapat jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan;
 - Perjalanan input data Situng KPU;
 - Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK;
 - Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;
 - Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur.
5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1
- Hasil Suara Pemohon Berdasarkan Formulir C1;
 - Fakta Penggelembungan Suara;
 - Konfirmasi Penggelembungan Suara;
 - Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;
 - DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman.
6. Ada masalah dalam penggunaan dokumen C7.

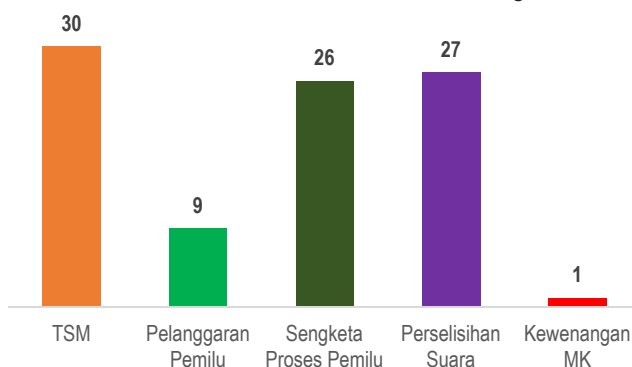
Secara detail, permohonan pemohon memuat 83 Argumen, dengan jumlah argumen mengenai perselisihan pemilu sebanyak 82 Argumen dan mengenai kewenangan MK sebanyak 1 Argumen.

Gambar 66
Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan



Secara detil, jika diperhatikan dari permohonan yang dianggap sebagai perbaikan permohonan oleh pemohon; bahwa dalil-dalil diatas didukung oleh beberapa argumen yang diajukan. Secara rinci apabila dalil diklasifikasikan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 67
Jumlah Argumen Permohonan Perbaikan
Per Jenis Perselisihan Pemilu dan Kewenangan MK



Dari 83 Argumen yang disampaikan dalam permohonan pemohon, terdapat 10 Argumen yang apabila didefinisikan sebagaimana dalam undang-undang pemilu memiliki argumen masing-masing atas 2 bentuk perselisihan pemilu. Sehingga secara keseluruhan argumen dapat dimaknai sejumlah 93 Argumen.

Dari keseluruhan argumen tersebut argumen terbanyak yaitu yang mendukung TSM sebanyak 30 Argumen, diikuti argumen mengenai Perselisihan Suara 27 Argumen, Sengketa Proses Pemilu 26 Argumen dan Pelanggaran Pemilu 9 Argumen. Disamping itu masih terdapat 1 Argumen yang menyampaikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Registrasi Perkara

Permohonan di catat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada Hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB dengan Nomor Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/209, dengan registrasi perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditangani oleh seluruh Hakim Konstitusi yaitu:

1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., DFM.
3. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
5. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
6. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
7. Dr. Manahan Sitompul, S.H., M.Hum.
8. Prof. Dr. Saldi Isra S.H., MPA.
9. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.

Dalam menangani perkara, hakim konstitusi dibantu oleh 9 Panitera Pengganti yaitu:

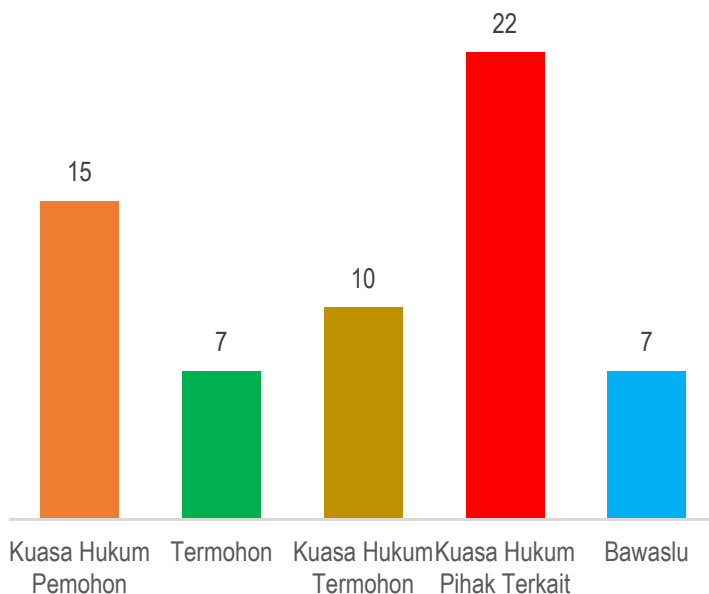
1. Syukri Asy'ari
2. Ery Satria Pamungkas
3. Yunita Rhamadani
4. Ahmad Edi Subiyanto
5. Anak Agung Dian Onita
6. Hani Adhani
7. Dian Chusnul Chatimah
8. Saiful Anwar,dan
9. Mardian Wibowo

BAB III PERSIDANGAN

1. Persidangan Pendahuluan

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara dilakukan pada Jum'at, 14 Juni 2019, Pukul 09.07 WIB sampai dengan 15.19 WIB, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu dengan masing-masing jumlah sebagai berikut:

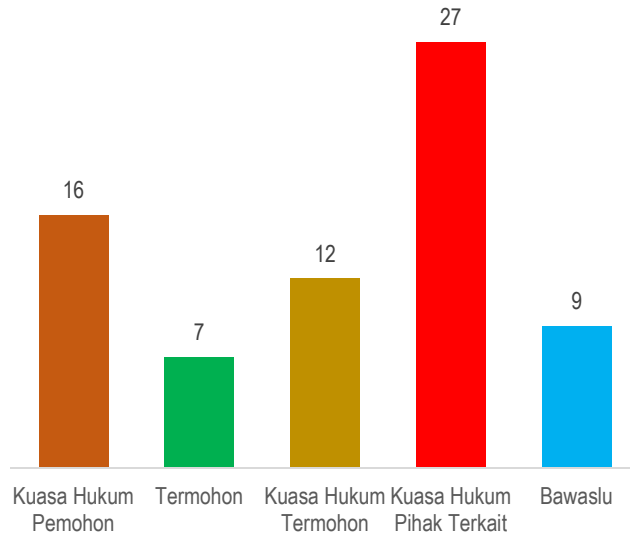
Gambar 68
Jumlah Para Pihak Yang Hadir
Dalam Sidang Pendahuluan PPHU Pres/Wapres 2019
14 Juni 2019



2. Sidang Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam rangka untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawaslu, dan pengesahan alat bukti. Sidang Pemeriksaan Persidangan dilakukan pada Selasa, 18 Juni 2019, Pukul 09.05 WIB sampai dengan 17.31 WIB.

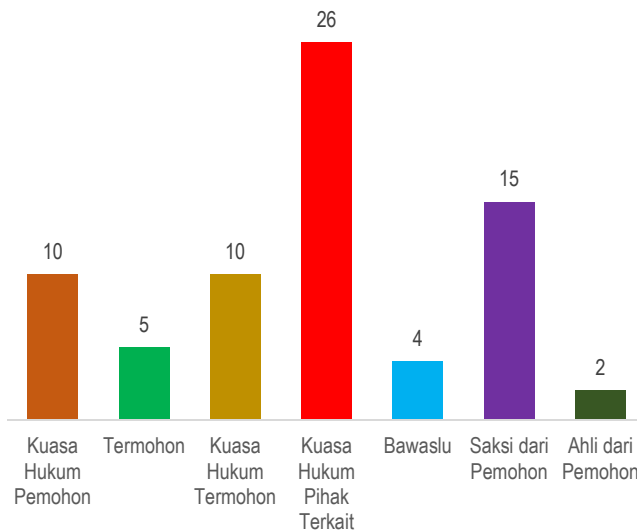
Gambar 69
Jumlah Para Pihak Yang Hadir
Dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan PPHU Pres/Wapres 2019
18 Juni 2019



3. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pemohon

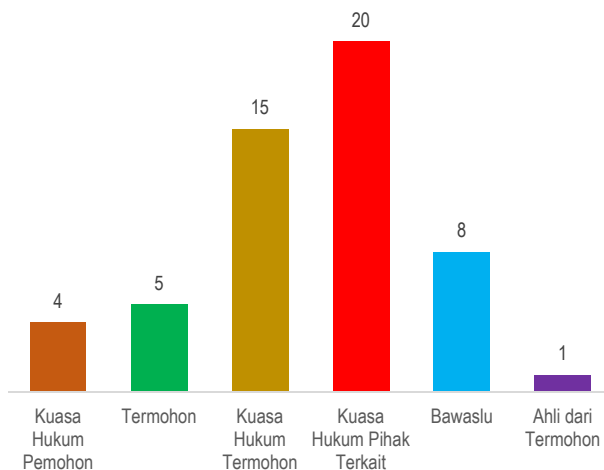
Sidang ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Juni sampai dengan Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 09.08 sampai dengan 05.00 WIB. Pada sidang ini dihadiri oleh 72 Pihak termasuk Saksi dan Ahli.

Gambar 70
Jumlah Para Pihak Yang Hadir
Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PPHU Pres/Wapres 2019
19 Juni 2019



Sidang selanjutnya untuk Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pemohon dilanjutkan pada Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 13.07 sampai dengan 15.52 WIB yang dihadiri oleh 53 Para Pihak termasuk Ahli.

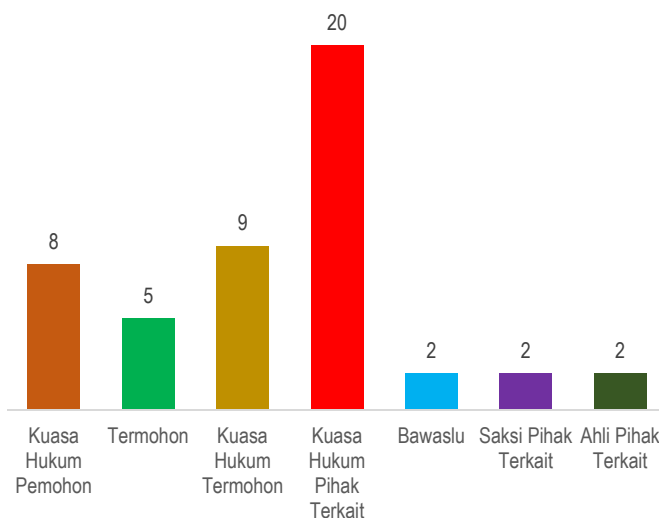
Gambar 71
Jumlah Para Pihak Yang Hadir
Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019
20 Juni 2019



4. Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pihak Terkait serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Pihak Terkait, dan Bawaslu

Sidang ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 21 Juni 2019 Pukul 09.08 sampai dengan 22.22 WIB yang dihadiri oleh 48 Para Pihak termasuk Saksi dan Ahli.

Gambar 72
Jumlah Para Pihak Yang Hadir
Dalam Sidang Mendengarkan Keterangan PHPU Pres/Wapres 2019
21 Juni 2019



BAB I

PUTUSAN AKHIR

Sidang Putusan Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dilakukan terbuka untuk umum dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019 yang selesai di ucapkan pukul 21.16 WIB dengan amar dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (ditolak).

1. Dalil Pelanggaran TSM

Dalam Putusan PHPU Pilpres 2019 terhadap dalil TSM, mahkamah memiliki pertimbangan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara;
2. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih;
3. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya;
4. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara;
5. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon;
6. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara;
7. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

2. Dalil Pelanggaran Administratif

Sedangkan dalil mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu, mahkamah memiliki pertimbangan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat;
2. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara;
3. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi;

4. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara;
5. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil;
6. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu;
7. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu;
8. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU (Termohon);
9. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu;
10. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon;
11. Bukti tidak diserahkan ke mahkamah.

**BAGIAN
KETIGA**

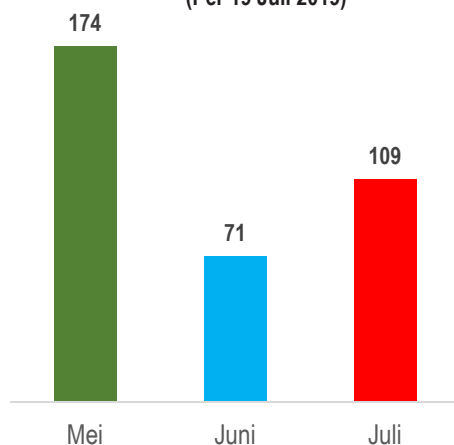
**PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

LAYANAN KONSULTASI

BAB I LAYANAN KONSULTASI

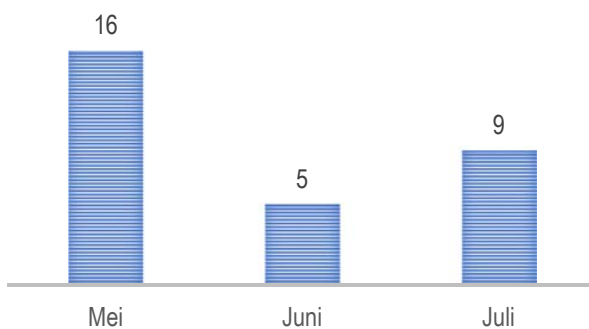
Pelayanan konsultasi selama pelaksanaan penanganan perkara PPHU mulai 21 Mei sampai dengan 19 Juli 2019 sebanyak 354 Layanan yaitu rata-rata perhari pelayanan konsultasi diberikan sebanyak 11 kali untuk 32 hari pelayanan.

Gambar 73
Jumlah Layanan Konsultasi
(Per 19 Juli 2019)

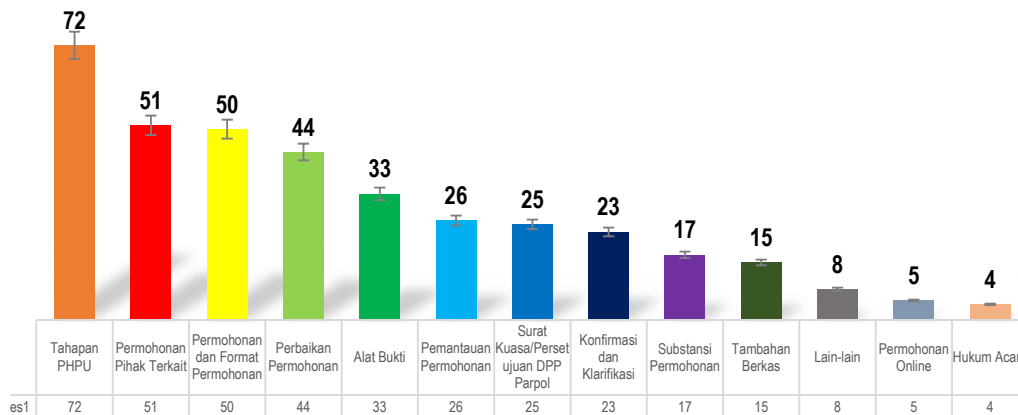


Pelayanan terbanyak pada bulan Mei, yaitu sejumlah 174 Layanan dengan rata-rata per hari 16 layanan. Selanjutnya bulan Mei yaitu sejumlah 71 Layanan dengan rata-rata per hari 5 layanan per hari, sedangkan pada bulan Juli per tanggal 19 Juli 2018 sejumlah 109 layanan dengan rata-rata per hari 9 Layanan.

Gambar 74
Jumlah Rata-rata Layanan Konsultasi Per Hari
(Per 19 Juli 2019)



Gambar 75
Jumlah Jenis Layanan Konsultasi
Per 19 Juli 2019



Berdasarkan jenis informasi yang dibutuhkan oleh para pihak, jenis konsultasi yang diberikan dikategorikan dalam beberapa jenis layanan informasi, yaitu:

1. Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di MK;
2. Permohonan Pihak Terkait;
3. Permohonan Pemohon dan Format Permohonan;
4. Perbaikan Permohonan;
5. Alat Bukti;
6. Pemantauan Permohonan;
7. Surat Kuasa/Persetujuan DPP Parpol;
8. Konfirmasi dan Klarifikasi;
9. Substansi Permohonan;
10. Tambahan Berkas;
11. Permohonan Online;
12. Hukum Acara; dan
13. Lain-lain.

Selama masa pemberian layanan konsultasi, jumlah terbanyak yaitu layanan informasi mengenai Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di MK yaitu sebanyak 72 Layanan yang diberikan. Informasi Tahapan PHPU yang dibutuhkan oleh para pihak yaitu mengenai waktu mulai pendaftaran permohonan sampai dengan penjadwalan persidangan. Berikutnya yaitu konsultasi mengenai Permohonan Pihak Terkait sebanyak 51 Layanan, dimana para pihak membutuhkan informasi bagaimana proses, syarat dan teknik penyusunan permohonan bagi pihak terkait.

Konsultasi mengenai Permohonan Pemohon dan Format Permohonan juga merupakan isu terbanyak yang dimintakan konsultasi oleh para pihak yaitu sebanyak 50 Layanan. Untuk jenis informasi ini para pihak membutuhkan informasi mengenai waktu dan syarat untuk mengajukan permohonan serta teknik menyusun permohonan.

Selain teknik menyusun permohonan, para pihak juga banyak yang melakukan konsultasi mengenai Substansi Permohonan, yaitu sebanyak 17 Layanan yang telah diberikan.

BAB II

PENUTUP

Laporan ini dibuat sebagai upaya untuk terus mengembangkan data statistik penanganan perkara pada lembaga Peradilan Konstitusi. Pada beberapa data seperti pengkategorian dalil pada permohonan maupun perkara, penghitungan data alat bukti, serta pengkategorian data konsultasi masih memungkinkan memiliki tingkat kesalahan baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis yang dilakukan.

Jumlah permohonan maupun perkara yang banyak, serta belum teridentifikasinya kebutuhan data secara baik, masih menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengelola informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini. Kami berharap kedepan, laporan seperti ini dapat disajikan dengan lebih detail dan rinci yang mampu menjawab seluruh kebutuhan informasi internal MK maupun masyarakat.

Jakarta, Agustus 2019.

LAMPIRAN -

Tabel 49
Daftar Perkara dan Putusan Akhir
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
1	01-08-20/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kalimantan Barat (Kelbar)	Kubu Raya 2	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
2	02-08-02/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	02-08-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sumatera Utara (Sumut)	Langkat 2 Kota Tebing Tinggi 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota	
3	03-08-30/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	06-08-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Gorontalo	Gorontalo 1 Kota Gorontalo 1	Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota	
4	04-08-22/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	07-08-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kalimantan Selatan (Kalsel)	Hulu Sungai Tengah 2	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
5	05-08-31/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	08-08-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Maluku	Maluku 2	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi	
6	06-08-09/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	24-08-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Lampung	Kota Metro 4	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
7	07-08-01/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	25-08-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Aceh	Aceh Singkil 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
8	08-08-27/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	26-08-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Kepulauan Selayar 5	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
9	09-08-29/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	37-08-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Sulawesi Tenggara 6	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi	
10	10-08-12/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	36-08-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jawa Barat (Jabar)	Jabar VII Indramayu 3	Tidak Dapat Diterima Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI DPRD Kabupaten/Kota	
11	11-08-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019	92-08-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Papua	Papua 4 Kepulauan Yapen 1 Mappi 1 Lanny Jaya 2	Tidak Dapat Diterima Ditolak Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
12	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	78-08-06/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Lanny Jaya 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Puncak 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Puncak 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
13	13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Sumsel II	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI		
						Sumatera Selatan 7	Ditolak	DPRD Provinsi		
						Banyuasin 1	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
14	14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	43-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jawa Timur	Buton Tengah 3	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Bombana 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Wakababi 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
15	15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jawa Timur (Jatim)	Jatim XI	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI		
						Jawa Timur 14	Ditolak	DPRD Provinsi		
						Bangkalan 1	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
16	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	134-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Kalimantan Barat (Kalbar)	Malang 6	Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota		
						Kalimantan Barat 6	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi		
						Cirebon 1	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
16	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	187-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jawa Barat (Jabar)	Bekasi 4	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Subang 7	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Kota Tasikmalaya 1	Gugur	DPRD Kabupaten/Kota	Ketelapan	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
17	17-01-04/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	169-01-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Riau	Kuantan Singingi 3	Gugur	Gugur	DPRD Kabupaten/Kota	
18	18-01-32/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	174-01-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Maluku Utara (Malut)	Malut	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPR-RI	
19	19-01-26/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	178-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	Sulteng	Ditolak		DPR-RI	
		264-01-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	SYARIF HIDAYATULLAH			Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota		
20	20-01-33/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	242-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua	Papua	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI	Penghitungan Surat Suara Ulang
		188-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019				Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota			
21	21-01-34/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	249-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	HERIL PAMILOY	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Papua Barat	Papua Barat 5	Ditolak	Dikabulkan Sebagian (Ditolak)	DPRD Provinsi	
		189-01-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)			Dikabulkan	DPRD Kabupaten/Kota			
22	22-14-14/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	261-14-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Jawa Timur (Jatim)	Jatim III	Tidak Dapat Diterima		DPR-RI	
						Jawa Timur 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi	
						Jember 6	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
						Banyuwangi 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Jombang 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Bangkalan 6	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
23	23-01-02/PHPU DPR-DPRD/XXVIII/2019	190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sumatera Utara (Sumut)	Sumatera Utara 8	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi		
					Nias Selatan 1	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota			

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
						Humbang Hasundutan 1	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
		38-01-02/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	MAHMUDDIN NASUTION			Taparuli Selatan 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
24	24-01-06/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	251-01-06/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	H. NASRUIN ASWARI	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Sumatera Selatan 7	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi Kabupaten/Kota	
		194-01-06/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)			Kota Pagar Alam 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
25	25-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	197-01-31/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Maluku	Maluku 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
		198-01-05/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jambi	Tanjung Jabung Timur 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
26	26-01-05/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	198-01-16/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Banten	Banten 6	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
27	27-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	335-01-08/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	JUKAN	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Bengkulu	Bengkulu Selatan 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
28	28-01-08/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	243-01-11/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	AHMAD IMAN	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	DKI Jakarta II	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
29	29-01-11/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	68-01-15/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd. Si.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	D.I. Yogyakarta 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
30	30-01-15/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	135-08-34/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	ZAFILUDDIN	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Papua Barat	Teluk Wondama 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Kelalapan
31	31-08-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019	103-13-26/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nuran (Hanura)	Partai Hati Nuran Rakyat (Hanura)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	Sulawesi Tengah 2	Ditarik Kembali	Ditarik Kembali	DPRD Provinsi	
32	32-13-26/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019					Taparuli Tengah 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
		153-13-02/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nuran (Hanura)	Partai Hati Nuran Rakyat (Hanura)	Sumatera Utara (Sumut)	Asahan 1	Ditarik Kembali		DPRD Kabupaten/Kota	
		41-13-02/AP3-DPR- DPRD/PAN.MK/2019	JANUJ MANGASAL RANTO BUTAR			Labuhan batu 5	Ditarik Kembali	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
33	33-13-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019					Taparuli Selatan 5	Ditarik Kembali		DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
34	34-13-04/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	157-13-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Riau	Riau 8	Ditarik Kembali	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
		32-13-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	BARITA SIDABUTAR			Kota Pekanbaru 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
35	35-13-16/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	162-13-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Banten	Tangerang 1 Kota Tangerang Selatan 6	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota	
		170-13-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Kota Palembang 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
37	37-13-14/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	173-13-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jawa Timur (Jatim)	Bangkalan 5	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
		176-13-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sulawesi Barat (Subar)	Mamuju Tengah 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
39	39-13-19/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	179-13-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Rote Ndao 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
		181-13-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Maluku	Maluku Tengah 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
41	41-13-32/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	200-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	SUGYANTO MARSAOLY	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Maluku Utara (Malut)	Maluku Utara 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi	
		185-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)			Halmahera Selatan 4	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
42	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	188-13-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Papua	Papua 4	Ditolak		DPRD Provinsi	
						Papua 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi	
						Papua 3	Tidak Dapat Diterima		Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi
						Keerom 1	Tidak Dapat Diterima			DPRD Kabupaten/Kota
						Kota Jayapura 1	Tidak Dapat Diterima			DPRD Kabupaten/Kota
43	43-13-05/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019	192-13-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jambi	Kota Jayapura 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
						Keinci 5	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
44	44-13-27/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	250-13-27/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Ir. MULE	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Enrekang 3	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
		196-13-27/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Hati Nurani (Hanura)			Bantaeng 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
45	45-13-13/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	04-13-13/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	H. AGUS SETYOBUDI, S.E., M.M.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Jawa Tengah (Jateng)	Kudus 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
		14-15-01/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Aceh		Aceh	Aceh 2	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi	
46	46-15-01/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	05-15-01/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Aceh			Aceh 4	Ditolak		DPRD Provinsi	
						Jabar 1	Ditarik Kembali		DPR-RI	
47	47-14-12/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	62-14-12/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat		Jawa Barat (Jabar)	Kuningan 1	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
						Indramayu 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
		262-14-12/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019				Kota Depok 2	Ditarik Kembali		DPRD Kabupaten/Kota	
						Jawa Barat 9	Ditolak		DPRD Provinsi	
48	48-14-09/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	252-14-09/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat		Lampung	Lampung 8	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
						Tanggamus 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
49	49-14-06/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019					Sumatera Selatan 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi	
						Musi Banyuasin 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Banyuasin 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
						Ogan Komering Ulu Timur 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Palembang 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Palembang 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
50	50-14-05/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	254-14-05/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat		Jambi	Sarolangun 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
51	51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	255-14-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Sumatera Barat (Sumbar)	Tanjung Jabung Barat 5	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
52	52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	256-14-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Sumatera Utara (Sumut)	Deli Serdang 6	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Ketetapan	
						Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
						Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
53	53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	258-14-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	DKI Jakarta 2	Ditarik Kembali	Ditarik Kembali	DPRD Provinsi		
54	54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	259-14-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Banten	Banten 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						280-14-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			
55	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	263-14-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Jawa Tengah (Jateng)	Jateng III	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi		
						09-14-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			
						266-14-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			
56	56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	265-14-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Lombok Barat 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						09-14-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			
57	57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	266-14-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Kalimantan Tengah (Kaleng)	Kapuas 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						267-14-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			
58	58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	267-14-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Kalimantan Barat (Kalbar)	Ketapang 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi		
						268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			
59	59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Maluku	Maluku 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi		
						268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Tidak Dapat Diterima			

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
60	60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	269-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Maluku Utara (Malut)	Maluku Utara 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
61	61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	270-14-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kalimantan Selatan (Kalsel)	Kota Banjarmasin 5	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
62	62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	271-14-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Sulsel III Gowa 1 Luwu Timur 2	Tidak Dapat Diterima Gugur Gugur	Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima	DPR-RI DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota	
63	63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	272-14-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Papua Barat	Papua Barat Papua Barat 1 Papua Barat 2 Papua Barat 4 Tambrau 1 Tambrau 3	Tidak Dapat Diterima Ditolak Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima Ditolak Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI DPRD Provinsi DPRD Provinsi DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota	
64	64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	273-14-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kalimantan Timur (Kalim)	Kallim Paser 2	Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima Tidak Dapat Diterima	DPR-RI DPRD Kabupaten/Kota	
65	65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	274-14-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan 4	Ditolak Ditolak	Ditolak Ditolak Seluruhnya	DPR-RI DPRD Kabupaten/Kota	
66	66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	275-14-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Aceh	Aceh 6 Aceh Timur 3 Aceh Timur 4 Aceh Singkil 3	Ditolak Ditolak Ditolak Tidak Dapat Diterima	Ditolak Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
67	67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	276-14-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat	Partai Demokrat	Sulawesi Utara (Sulut)	Minahasa Selatan 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							68	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	277-14-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrat
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota								
69	69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia	Partai Demokrasi Indonesia	Jawa Barat (Jabar)	Jabar VII				
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor A PPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
70	70-03-04/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	80-03-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Riau	Bengkalis 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
			Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		Bengkalis 5	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
			Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		Indragiri Hilir 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	Ditolak Seluruhnya
			Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		Siak 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
71	71-03-10/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	83-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Kepulauan Riau	Bintan 3	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian (Ditolak)	DPRD Kabupaten/Kota	
		11-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Bommen HutaGalung	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		Kota Batam 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
72	72-03-05/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	85-03-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Jambi	Kota Jambi 5	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
73	73-03-03/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	88-03-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sumatera Barat (Sumbang)	Sumbang 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
74	74-03-16/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	91-03-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Banten	Kota Tangerang Selatan 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
			Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		Jateng VI	Ditolak	Ditolak	DPR-RI	
75	75-03-13/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	94-03-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Jawa Tengah (Jateng)	Banyumas 5	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	Perhitungan Surat Suara Ujang
			Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)		Trenggalek 1	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian (Ditolak)	DPRD Kabupaten/Kota	
76	76-03-14/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	97-03-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Jawa Timur (Jatim)	Bangkalan 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
77	77-03-18/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019	101-03-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia	Partai Demokrasi Indonesia	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Dompu 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
78	78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	104-03-30/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Gorontalo	Pahuwalo 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Kota Gorontalo 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
79	79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	107-03-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Sulawesi Selatan 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Provinsi		
					Toreja Utara 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
80	80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	110-03-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Konawe 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
81	81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	113-03-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sulawesi Utara (Sulut)	Kota Manado 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
82	82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	117-03-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sulawesi Barat (Sulbar)	Sulbar	Ditolak	Ditolak	DPR-RI		
						Papua	Ditolak	DPR-RI		
83	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	118-03-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Papua	Mamberamo Tengah 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Lanny Jaya 1	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Puncak 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Jayapura 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Jayapura 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
84	84-03-34/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	119-03-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Papua Barat	Manokwari 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
85	85-03-31/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	124-03-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Maluku	Buru 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Pemungutan Suara Ulang
						Buru 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
86	86-03-26/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	140-03-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	Sigi 5	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian (Ditolak)	DPRD Kabupaten/Kota	
						Donggala 2	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
87	87-03-02/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	67-03-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	Simalungun 5	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
88	88-03-06/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	73-03-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Sumatera Selatan 9	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
						Musi Banyuwasin 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
89	89-16-01/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	13-16-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	SAUD MUSTA'AJIB, S.Sos.	Partai SIRA (Aceh)	Aceh	Nagan Raya 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
90	90-19-32/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	12-19-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Meluku Utara (Malut)	Kota Ternate 2	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
91	91-19-07/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	15-19-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
92	92-19-01/PPU-DPR-DPRD/XVIII/2019	17-19-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Aceh	Bireuen 2	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
93	93-19-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	16-19/06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Pidie Jaya 3	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Lahat 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Empat Lintang 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Penukal Abab Lematang Ilir 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima		
						Kota Palembang 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Kota Palembang 5	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
94	94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	19-19/18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Lombok Timur 3	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Lombok Barat 2	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Lombok Barat 4	Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota		
95	95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	18-19/34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Papua Barat	Manokwari 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Papua 3	Ditolak	DPRD Provinsi		
96	96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	20-19/33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Papua	Jayawijaya 2	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Tolikara 2	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
97	97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	21-19/05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jambi	Jambi 1	Ditolak	DPRD Provinsi		
						Tanjung Jabung Timur 1	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
98	98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	23-19/26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	Perigi Moubang 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Morowali Ujara 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
99	99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	49-19/31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Maluku	Maluku Tengah 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Alor 4	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
100	100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	338-19-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Nusa Tenggara Timur (NTT)		Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
101	101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	338-19-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	SAMUDDIN, S. Sos	Partai Bulan Bintang (PBB)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Sinjai 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
102	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	42-10-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jawa Barat (Jabar)	Ditolak	Kota Sukabumi 3	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
103	103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	108-10-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Aceh	Ditolak	Bekasi 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
										Bogor 2
104	104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	120-10-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sumatera Barat (Sumbar)	Ditolak	Aceh Tengah 2	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
										Aceh Besar 5
105	105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	123-10-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Kepulauan Riau	Ditolak	Kota Sabang 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
										Sumatera Barat 2
106	106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	127-10-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Ditolak	Kota Batam 6	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
										Musi Banyuasin 4
107	107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	128-10-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bengkulu	Ditolak	Bengkulu 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi		
										JaTim IV
108	108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	136-10-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jawa Timur (Jatim)	Ditolak	JaTim II	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
										Madun 3
						Bangkalan 2	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
109	109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	139-10-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Maluku	Bangkitan 5	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Pamekasan 4	Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota		
110	110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	142-10-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Seram Bagian Barat 5	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Susel III	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
111	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	147-10-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Papua	Takalar 1	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)		
						Papua 1	Ditolak	DPRD Provinsi		
112	112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	149-10-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jawa Tengah (Jateng)	Papua 2	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)		
						Papua 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	Ketelapan	
113	113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	53-10-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	SOPYAN HAKIM, S.Kep.Ners.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Jawa Tengah 8	Ditarik Kembali	Ditolak Kembali		
						Lombok Timur 2	Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota		
114	114-10-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	238-10-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	IRPAN	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Konawe Kepulauan 2	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Jateng V	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
115	115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	47-12-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Tengah (Jateng)	Jateng VI	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Kudus 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
116	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MKZ2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Papua	Papua 2	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)		
						Papua 3	Ditolak	DPRD Provinsi		
						Papua 6	Ditolak	DPRD Provinsi		

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
117			ABDUL GANING, S.E.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sumatera Utara (Sumut)	Jayawijaya 2	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Jayawijaya 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Puncak Jaya 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Paniai 1	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Paniai 2	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Asmat 2	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Serni 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
						Asmat 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
118	117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	54-12-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kaltimantan Timur (Kaltim)	Samosir 1	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
					Kota Samarinda 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
119	118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	59-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Papua Barat	Papua Barat 1	Ditolak	Ditolak	DPRD Provinsi		
					Sorong Selatan 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
120	119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	35-12-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	KARUBIUM AGUSTINUS MOMOT	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Lembata 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
					Sulut	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
121	120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	64-12-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sulawesi Utara (Sulut)	Bolaang Mongondow 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
					Minahasa Utara 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
122	121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kaltimantan Barat (Kalbar)	Sanggau 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
123	122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	95-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Barat (Jabar)	Kota Cimahi 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
						Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
124	124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	148-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019		Partai Amanat Nasional (PAN)	Jawa Timur (Jatim)	Jabar VIII	Ditolak	(Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI	
		28-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	JAMES MARTIN				Gugur		DPR-RI	
		27-12-12/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	JENI JAYUSMAN, S.Sos.				Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi	
125	125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	122-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sumatera Barat (Sumbar)	Agam 4	Ditolak Kembali	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
		143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)				Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
		322-12-03/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Madison Basir				Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
126	126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	156-12-06/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Musi Rawas Utara 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
127	127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	246-12-31/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Maluku	Maluku Tenggara Barat 1	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Kelelapan	
128	128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	132-12-16/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Banten	Serang 2	Ditolak Kembali	DPRD Kabupaten/Kota		
129	129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	329-12-21/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	H. ADIE SETH JINU	Partai Amanat Nasional (PAN)	Kalimantan Tengah (Kaleng)	Gunung Mas 2	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Kelelapan	
130	130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	31-12-29/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	H.J. RATNA, S. PD, M.PD	Partai Amanat Nasional (PAN)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Kota Bau Bau 2	Gugur	DPRD Kabupaten/Kota		
131	131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	29-09-02/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sumatera Utara (Sumut)	Humbang Hasundutan 2	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
132	132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	33-09-06/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Musi Rawas Utara 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
133	133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	154-09-25/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sulawesi Utara (Sulut)	Kepulauan Talaud 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
134	134-09-20/PHPU.DPR-DPRD/XXVII/2019	163-09-20/AP3-DPR-DPRD/PAN/IMK/2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Kalimantan Barat (Kalbar)	Melawi 4	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Kelelapan	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perantara		
135	135-09-10/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	286-09-10/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	ANDI RUSLIAN dan ANDI KUSUMA	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau 4	Ditolak Kembali	Ditarik Kembali	DPRD Provinsi	
							Ditolak Kembali		DPRD Kabupaten/Kota	
136	136-09-31/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	343-09-31/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Maluku	Maluku 6	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
137	137-09-33/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	195-09-33/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	SIPRIANUS BUNAI	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Papua	Jayai 1	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
138	138-09-13/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	278-09-13/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	JOKO MUSTIKO	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Jawa Tengah (Jateng)	Pati 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
139	139-09-14/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	167-09-14/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Jawa Timur (Jatim)	Jember 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
140	140-09-23/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	282-09-23/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Kalimantan Timur (Kallim)	Berau 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
141	141-09-29/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	175-09-29/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Konawe Kepulauan 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
142	142-20-32/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	30-20-32/AP3-DPR-DRPD/PAN.MKZ2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Maluku Utara (Malut)	Maluku Utara 4	Ditolak	Ditolak	DPRD Provinsi		
						Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota		
						Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
143	143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	205-20-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Sumatera Utara (Sumut)	Kepulauan Sula 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
144	144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	207-20-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Papua	Sumatera Utara 8	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi	
						Simalungun 6	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
145	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	39-02-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	IR. ALBERT P. SILITONGA	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Sumatera Utara (Sumut)	Papua	Ditolak		DPR-RI	
						Papua 4	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi	
						Kota Jayapura 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Jayapura 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Surat Suara Ulang
146	146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	63-02-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Kepulauan Riau	Sumut II	Ditank Kembali		DPR-RI	
						Sumatera Utara 9	Dikembalikan	Dikembalikan Sebagian (Ditolak)	DPRD Provinsi	
147	147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Kepulauan Riau	Kota Binjai 3	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
						Kepulauan Riau 4	Dikembalikan	Dikembalikan Sebagian (Ditolak)	DPRD Provinsi	
148	148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	66-02-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	Kota Batam 6	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
						Sulawesi Tengah 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
149	149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	69-02-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Lampung	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
						Lampung II	Tidak Dapat Diterima		DPR-RI	
150	150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	70-02-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Lampung	Tanggamus 1	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Bandar Lampung 2	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
150	150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XV/II/2019	71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Geindra)	Daerah Khusus Ibu	DKI Jakarta II	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
151	151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	74-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kota Jakarta (DKI Jakarta)	DKI Jakarta III	Dipil	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
								Ditarik Kembali	DPRD Provinsi	
								Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
151	151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	74-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Pangkajene Dan Kepulauan 2	Dipil	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
								Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
								Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota	
								Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
152	152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	77-02-04/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Riau	Riau I	Dipil	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
								Gugur	DPR-RI	
								Gugur	DPRD Provinsi	
153	153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	81-02-17/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Bali	Bali 1	Dipil	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
								Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
								Ditolak	DPR-RI	
154	154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	84-02-20/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Kalimantan Barat (Kalbar)	Kalbar 1	Dipil	Ditolak	DPR-RI	
								Dikabulkan	DPRD Provinsi	
155	155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	96-02-31/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Meluku	Maluku 1	Dipil	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
								Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
								Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
156	156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	98-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jawa Barat (Jabar)	Kota Bogor 1	Dipil	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
								Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
								Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
								Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
								Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
157	157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	100-02-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jawa Timur (Jatim)	Jatim XI	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI		
						Tidak Dapat Diterima		DPR-RI		
158	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	102-02-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 46-02-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Agus Wariono	Jawa Tengah (Jateng)	Kota Magelang 3	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
					Kudus 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota		
159	159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	105-02-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Nusa Tenggara Timur (NTT)	NTT II	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI		
					Kupang 4	Ditank Kembali		DPRD Kabupaten/Kota		
160	160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	109-02-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Lombok Tengah 6	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
					Papua	Tidak Dapat Diterima		DPR-RI		
161	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	112-02-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Papua	Papua 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi		
					Papua 7	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi		
					Jayawijaya 1	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota		
					Lanny Jaya 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota		
					Lanny Jaya 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota		
					Papua Barat	Ditolak		DPR-RI		
162	162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Papua Barat	Papua Barat 4	Ditolak		DPRD Provinsi		
					Teeluk Bintuni 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota		
					Tambrauw 1	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota		
					Tambrauw 3	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
163	163-02-25/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	244-02-25/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Utara (Sulut)	Kepulauan Sangihe 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
164	164-02-28/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	245-02-28/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Barat (Sulbar)	Sulawesi Barat 7	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
165	165-02-29/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	248-02-29/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Muna 6	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
			Muhammad Yasin, S.H., M.H.			Sulsel II	Gugur	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
			Ir. ARIFIN DAENG MAROLA			Kolaka Utara 1	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
166	166-04-27/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	114-04-27/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Selatan (Sulsel)	Sulsel II	Gugur	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
						Kepulauan Selayar 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
						Sulawesi Selatan 1	Ditolak	Ditolak	DPR-RI	
						Pangkajene Dan Kepulauan 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
167	167-04-10/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	121-04-10/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Kepulauan Riau	Britan 3	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Batam 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
168	168-04-12/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	133-04-12/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Barat (Jabar)	Jawa Barat 11	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
						Jawa Barat 10	Ditolak	Ditolak	DPRD Provinsi	
						Kota Bekasi 2	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Bekasi 6	Ditolak	Ditolak	DPRD Kabupaten/Kota	Ketelapan
169	169-04-16/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	137-04-16/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Banten	Tangerang 5	Gugur	Gugur	DPRD Kabupaten/Kota	
170	170-04-33/PHPU.DPR-DRPD/XVII/2019	144-04-33/AP3-DPR-DRPD/PAN.MIK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Papua	Papua	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
						Papua 6	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi	
						Kepulauan Yapen 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Lanny Jaya 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Lanny Jaya 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Lanny Jaya 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Dogiyai 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Jayapura 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Kota Jayapura 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Sarmi 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Sarmi 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Sarmi 3	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
171	171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	145-04-34/AP3-DPR-DPRD/PANI.MK/2019	Partai Golongan Kaya (Golkar)	Papua Barat	Papua Barat 4	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi		
172	172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PANI.MK/2019	Partai Golongan Kaya (Golkar)	Kalimantan Tengah (Kalteng)	Kapas 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
173	173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PANI.MK/2019	Partai Golongan Kaya (Golkar)	Sumatera Utara (Sumut)	Sumut II	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI		
					Kota Medan 4	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota		
					Tapanuli Tengah 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota		
					Langkat 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota		
		40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PANI.MK/2019	R. BOYSANDY MARTUA.PANE		Deli Serdang 6	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Kembali	DPRD Kabupaten/Kota		
					Tapanuli Selatan 2			DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor AP/PP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket	
							Dapil	Perkara			
174	174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	155-04-11/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	DKI Jakarta III	Ditolak	Ditolak	DPR-RI		
175	175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	158-04-31/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Maluku	Maluku	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
176	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	257-04-01/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	TEUKU JULIANSYAH	Partai Golongan Karya (Golkar)	Aceh	Kota Banda Aceh 3	Tidak Dapat Diterima	Dikembalikan (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota		
							Dikembalikan	Dikembalikan			
177	177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	165-04-28/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Barat (Sulbar)	Sulbar	Ditolak	Ditolak	DPRD Provinsi		
							Ditolak	Ditolak			
							Ditolak	Ditolak			
178	178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	171-04-06/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Musi Rawas 5	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Ketetapan	
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
179	179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	214-04-18/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	NTB I	Gugur	Gugur	DPR-RI		
							Gugur	Gugur			
180	180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	321-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Sulawesi Tenggara 5	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi		
							Ditolak	Ditolak			
181	181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	340-04-08/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)	Bengkulu	Bengkulu 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi		
							Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima			
182	182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	344-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Golongan Karya (Golkar)		Kota Samarinda 4	Ditolak	Ditolak Sebagian	DPRD Kabupaten/Kota		

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
					Kalimantan Timur (Kalim)	Kulai Barat 1	Tidak Dapat Diterima	(Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	Perhitungan Surat Suara Ulang
						Kota Surabaya 4	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
183	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	152-04-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	DRS-AGOENG PRASODJO	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jawa Timur (Jatim)	Sampang 3	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
184	184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	160-04-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	JERRY SAMBUAGA	Partai Golongan Karya (Golkar)	Sulawesi Utara (Sulut)	Pamekasan 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	Kelelepan
185	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	45-18-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nangroe Aceh	Partai Nangroe Aceh	Aceh	Sulut	Ditarik kembali	Ditarik Kembali	DPR-RI	Penghitungan Surat Suara Ulang
						Aceh 6	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian (Ditolak)	DPRD Provinsi	
						Jatim I	Ditolak		DPR-RI	
						Jawa Timur 4	Ditolak		DPRD Provinsi	
186	186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	51-05-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Timur (Jatim)	Tulungagung 1	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
						Situbondo 5	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Tulungagung 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
187	187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	184-05-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sulawesi Barat (Sulbar)	Sulawesi Barat 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi	
						Mamuju Utara 2	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
188	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	55-05-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Tengah (Jateng)	Jateng VI	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	DPR-RI	
						Jateng IV	Tidak Dapat Diterima		DPR-RI	
						Aceh I	Ditolak		DPR-RI	
189	189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	56-05-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Aceh	Aceh II	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPR-RI	
						Aceh 3	Ditolak		DPRD Provinsi	

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
						Aceh 5	Ditolak		DPRD Provinsi	
						Bireuen 2	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
190	190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	58-05-31/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Maluku	Maluku 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi	
191	191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	61-05-18/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Bima 6	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
192	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	60-05-16/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Banten	Banten III	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPR-RI	
						Banten I	Tidak Dapat Diterima		DPR-RI	
						Kota Tangerang Selatan 5	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
						Bengkalis 3	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
193	193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	72-05-04/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Riau	Bengkalis 5	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
						Siak 3	Ditarik Kembali		DPRD Kabupaten/Kota	
						Papua 2	Ditolak		DPRD Provinsi	
						Nabire 1	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
194	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	75-05-33/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Papua	Jayapura 1	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
						Jayapura 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Jayapura 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
195	195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	90-05-11/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	DKI Jakarta II	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPR-RI	
						DKI Jakarta 6	Ditarik Kembali		DPRD Provinsi	Ketetapan
196	196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	82-05-03/AP.3-DPR-DPRD/PAN.MIK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sumatera Barat (Sumbar)	Kota Padang 1	Ditarik Kembali	Ditarik Kembali	DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket	
							Dapil	Perkara			
197	197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	87-05-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sumatera Utara (Sumut)	Mandailing Natal 4 Kota Pematang Siantar 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota		
198	198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	93-05-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Buton Selatan 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota		
199	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	MUHAMMAD AARON ANNAR S	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Barat (Jabar)	Jabar IX	Ditolak		DPR-RI		Penghiutangan Surat Suara Ulung
						Jabar IX	Gugur		DPR-RI		
						Bekasi 2	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian (Ditolak)	DPRD Kabupaten/Kota		
						Bogor 4	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota		
200	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Sumatera Selatan (Sumsel)	Majalengka 5	Tidak Dapat Diterima			DPRD Kabupaten/Kota		
					Ogan Komering Ilir 3	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota			
201	201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Maluku Utara (Malut)	Empat Lawang 1	Tidak Dapat Diterima		Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota		
					Maluku Utara 5	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi			
					Halmahera Utara 2	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota			
202	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Jawa Barat (Jabar)	Kepulauan Sula 2	Ditolak			DPRD Kabupaten/Kota		
					Kepulauan Sula 4	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota			
203	203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Papua	Jawa Barat 1	Ditolak		Ditolak Seluruhnya	DPRD Provinsi		
					Papua 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Provinsi			
					Papua 3	Tidak Dapat Diterima	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Provinsi			
					Kepulauan Yapen 1	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota			

No	Nomor Perkara	Nomor APP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Depil	Perkara		
						Kepulauan Yapen 2	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
						Puncak 1	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
						Puncak 3	Ditolak		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Toikara 1	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Toikara 2	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Toikara 3	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
						Toikara 4	Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
							Tidak Dapat Diterima		DPRD Kabupaten/Kota	
204	204-11-25/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	141-11-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Sulawesi Utara (Sulut)	Minahasa Utara 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
205	205-07-02/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	159-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Sumatera Utara (Sumut)	Kota Gunungsitoli 1	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	
206	205-07-16/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	166-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Banten	Pandeglang 5	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
207	207-07-33/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	172-07-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Papua	Kota Jayapura 1	Ditolak	Ditolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)	DPRD Kabupaten/Kota	
208	208-07-14/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	177-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Jawa Timur (Jatim)	Bangkaan 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
209	209-07-06/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	180-07-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Sumatera Selatan (Sumsel)	Banyuasin 4	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	
210	210-07-13/PHPU DPR-DPRD/XVIII/2019	183-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Jawa Tengah (Jateng)	Karanganyar 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
211	211-07-32/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	186-07-32/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Maluku Utara (Malut)	Maluku Utara 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	Ketelapan
212	212-07-04/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	210-07-04/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Riau	-	-	Gugur	-	Ketelapan
213	213-07-26/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	209-07-26/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Tengah (Sulteng)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
214	214-07-11/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	212-07-11/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
215	215-07-29/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	213-07-29/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
216	216-07-24/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	215-07-24/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Utara (Kaltara)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
217	217-07-19/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	216-07-19/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Nusa Tenggara Timur (NTT)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
218	218-07-23/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	219-07-23/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Timur (Kaltim)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
219	219-07-01/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	218-07-01/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Aceh	-	-	Gugur	-	Ketelapan
220	220-07-30/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	221-07-30/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Gorontalo	-	-	Gugur	-	Ketelapan
221	221-07-12/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	220-07-12/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Jawa Barat (Jabar)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
222	222-07-21/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	222-07-21/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Tengah (Kalteng)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
223	223-07-10/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	223-07-10/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kepulauan Riau	-	-	Gugur	-	Ketelapan
224	224-07-22/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	226-07-22/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Selatan (Kalsel)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
225	225-07-15/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	227-07-15/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
226	226-07-18/PHPU.DPR-DRPD/XXVIII/2019	228-07-18/AP3-DPR-DRPD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	-	-	Gugur	-	Ketelapan

No	Nomor Perkara	Nomor AP/PP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
227	227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	229-07-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Papua Barat	-	-	Gugur	-	Ketelapan
228	228-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	230-07-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Bengkulu	-	-	Gugur	-	Ketelapan
229	229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Selatan (Sulse)	Pangkajene Dan Kepulauan 3	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPRD Kabupaten/Kota	Ketelapan
		225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	NURHIDAYAH	Partai Berkarya	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Selatan (Sulse)	Pangkajene Dan Kepulauan 3	Ditolak Kembali	Ditolak Seluruhnya	
230	230-07-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	232-07-17/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Bali	-	-	Gugur	-	Ketelapan
231	231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	233-07-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	Gugur	-	Ketelapan
232	232-07-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	234-07-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sumatera Barat (Sumbang)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
233	233-07-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	235-07-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Kalimantan Barat (Kalbar)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
234	234-07-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	236-07-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Jambi	-	-	Gugur	-	Ketelapan
235	235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	237-07-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Berkarya	Partai Berkarya	Maluku	Maluku 1	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Provinsi	Ketelapan
236	236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	239-07-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Lampung	-	-	Gugur	-	Ketelapan
237	237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	240-07-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Barat (Sulbar)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
238	238-07-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	241-07-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Partai Beringin Karya (Berkarya)	Sulawesi Utara (Sulut)	-	-	Gugur	-	Ketelapan
239	239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	279-06-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang 2	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Ketelapan
240	240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	284-06-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Riau	Kota Dumai 4	Gugur	Gugur	DPRD Kabupaten/Kota	Ketelapan
241	241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	289-06-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Sulawesi Barat (Sulbar)	Mamasa 3	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPRD Kabupaten/Kota	Ketelapan



No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
		297-07-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Bali	-	-	-	-	
		305-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Banten	-	-	-	-	
		316-07-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Bengkulu	-	-	-	-	
		288-07-04/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	-	-	-	-	
		308-07-17/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)	-	-	-	-	
		311-07-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Jambi	-	-	-	-	
		285-07-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Jawa Barat (Jabar)	-	-	-	-	
		300-07-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Jawa Tengah (Jateng)	-	-	-	-	
		302-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Partai Beringin Karya (Berikarya)	Partai Beringin Karya (Berikarya)	Jawa Timur (Jatim)	-	-	-	-	
		312-07-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Kalimantan Barat (Kalbar)	-	-	-	-	
		287-07-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Kalimantan Selatan (Kalsel)	-	-	-	-	
		314-07-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Kalimantan Tengah (Kalteng)	-	-	-	-	
		309-07-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Kalimantan Timur (Kaltim)	-	-	-	-	
		315-07-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	
		281-07-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Kepulauan Riau	-	-	-	-	
		292-07-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Lampung	-	-	-	-	
		299-07-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Maluku Utara (Malut)	-	-	-	-	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
		303-07-15/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Nusa Tenggara Barat (NTB)	-	-		-	
		307-07-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Nusa Tenggara Timur (NTT)	-	-		-	
		310-07-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Papua	-	-		-	
		313-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Riau	-	-		-	
		318-07-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Sulawesi Selatan (Sulsel)	-	-		-	
		317-07-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Sulawesi Tengah (Sulteng)	-	-		-	
		296-07-07/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Sumatera Barat (Sumbar)	-	-		-	
		294-07-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Sumatera Selatan (Sumsel)	-	-		-	
		291-07-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019			Sumatera Utara (Sumut)	-	-		-	
		250			250-00-33/PHP.U.DPR-DPRD/XXVII/2019	320-00-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019	Punwn. Paus Kogoya, S.I.P.,	Bukan Partai	Papua	
Papua 4	Gugur		Gugur	DPRD Provinsi						
Papua 5	Gugur		Gugur	DPRD Provinsi						
Papua 6	Gugur		Gugur	DPRD Provinsi						
Jayawijaya 1	Gugur		Gugur	DPRD Kabupaten/Kota						
Jayawijaya 2	Gugur		Gugur	DPRD Kabupaten/Kota						
Jayawijaya 3	Gugur		Gugur	DPRD Kabupaten/Kota						
Jayawijaya 4	Gugur		Gugur	DPRD Kabupaten/Kota						
Puncak Jaya 1	Gugur		Gugur	DPRD Kabupaten/Kota						

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
						Puncak Jaya 2	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Puncak Jaya 3	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Puncak Jaya 4	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Yahukimo 1	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Yahukimo 2	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Yahukimo 3	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Yahukimo 4	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Yahukimo 5	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Yahukimo 6	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Toilikara 1	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Toilikara 2	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Toilikara 3	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Toilikara 4	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Mamberamo Tengah 1	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Mamberamo Tengah 2	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Mamberamo Tengah 3	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Lanny Jaya 1	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Lanny Jaya 2	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	
						Lanny Jaya 3	Gugur		DPDR Kabupaten/Kota	

No	Nomor Perkara	Nomor APPP	Pemohon	Partai	Provinsi	Dapil	Putusan		Jenis Pemilihan	Ket
							Dapil	Perkara		
251	01-32/PHPU-DPD/XVII/2019	06-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019	Ir. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	-	Maluku Utara (Malut)	Maluku Utara (Malut)	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPD-RI	
252	02-32/PHPU-DPD/XVII/2019	01-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019	IKBAL H. DJABID, S.E., M.M.	-	Maluku Utara (Malut)	Maluku Utara (Malut)	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPD-RI	
253	03-18/PHPU-DPD/XVII/2019	02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD	-	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPD-RI	
254	04-02/PHPU-DPD/XVII/2019	03-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019	H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag.	-	Sumatera Utara (Sumut)	Sumatera Utara (Sumut)	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPD-RI	
255	05-34/PHPU-DPD/XVII/2019	04-34/AP3-DPD/PAN.MK/2019	ABDULLAH MANARAY, ST.	-	Papua Barat	Papua Barat	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPD-RI	
256	06-29/PHPU-DPD/XVII/2019	05-29/AP3-DPD/PAN.MK/2019	FATMAYANI HARLI TOMBILI	-	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Sulawesi Tenggara (Sultra)	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPD-RI	
257	07-33/PHPU-DPD/XVII/2019	07-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019	CAREL SIMON PETRUS SUEBU	-	Papua	Papua	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPD-RI	
258	08-33/PHPU-DPD/XVII/2019	09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019	HASBI SUAIB, S.T., M.H.	-	Papua	Papua	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPD-RI	
259	09-02/PHPU-DPD/XVII/2019	08-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019	Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAWANTI LUBIS	-	Sumatera Utara (Sumut)	Sumatera Utara (Sumut)	Tidak Dapat Diterima	Tidak Dapat Diterima	DPD-RI	
260	10-33/PHPU-DPD/XVII/2019	11-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019	Dr. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS	-	Papua	Papua	Ditolak	Ditolak Seluruhnya	DPD-RI	



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110 PO.BOX 999 JKT 10000
Telp. (021) 23529000